

BILA direnungkan fenomena kekinian dalam arus global, maka penting bagi masyarakat Melayu, terutama Melayu Riau, untuk senantiasa melakukan pemutahiran terhadap perilaku-perilaku dan tampilan budayanya agar lebih serasi secara kontekstual. Globalisasi memaksa orang-orang untuk beranjak dari satu keunggulan ke keunggulan lainnya yang lebih baik. Hal ini memerlukan *entrepreneurship* dengan mengembangkan jiwa kreatif dan inovatif yang tinggi. Kalau masyarakat Melayu mau bangkit dari segi ekonomi, maka pemilahan nilai-nilai dalam budaya Melayu yang

menjunjung kemampuan kreativitas yang tinggi, harus lebih digesakan untuk selanjutnya ditanamkan pada generasi mendatang.

UNTUK berjaya di masa depan, dalam sketsa pemikiran penulis, paling tidak dunia Melayu dihadapkan pada dua hal pokok. *Pertama*, mencari titik persinggungan yang paling pas dari setiap nilai yang dipegang oleh berbagai kelompok masyarakat. Heterogenitas masyarakat Riau memerlukan adanya komitmen bersama, bukan pemaksaan kehendak terhadap satu proses tertentu. *Kedua*, karakteristik masyarakat maritim dan agraris sangat berbeda satu sama lain. Kedua karakter itu ada di Riau sehingga perlu ada "jembatan" yang dapat menghubungkannya. Tidak mungkin masing-masing hidup sendiri-sendiri. Infrastruktur dasar sangat urgen dikembangkan sehingga lalu-lintas masyarakat keduanya dapat dipercepat dinamikanya.

KEGELISAHAN dan besarnya harapan akan kegemilangan Melayu Riau di masa depan, membuat penulis buku ini merasa terpanggil untuk berkecimpung di dalamnya. Berbeda dengan penulis kebanyakan, penulis buku ini berusaha menampilkan dan berhasil mengeksplorasikan istilah-istilah Melayu dalam setiap judul tulisannya menyangkut bidang ekonomi. *Raja Buncit Kedekut* adalah salah satu pengistilahan dalam kosa kata Melayu yang menggambarkan fenomena pemimpin yang serakah dan hanya memikirkan keuntungannya sendiri.

ISBN 979-3497-10-6



Membaca Keagungan Menjemput Kecemerlangan

Edyanus Herman Halim

RAJA BUNCIT KEDEKUT
Pembangunan Ekonomi Dalam Kawalan Budaya Melayu

RAJA BUNCIT KEDEKUT

Pembangunan Ekonomi Dalam Kawalan Budaya Melayu



Edyanus Herman Halim



RAJA BUNCIT
KEDEKUT



Sanksi pelanggaran pasal 44: Undang-undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Edyanus Herman Halim

RAJA BUNCIT KEDEKUT

**Pembangunan Ekonomi
dalam Kawalan Budaya Melayu**

Penerbit Alaf Riau
Pekanbaru
2005

Judul : *RAJA BUNCIT KEDEKUT*
Penulis : Edyanus Herman Halim, SE., MS
Editor : Zulkarnain

Sampul: **Das, Unri Press**
Ilustrator Sampul: **T. Syarifah Eiva**
Perwajahan: **Arnain '99**

Diterbitkan pertama kali oleh Alaf Riau, Maret 2005

Alamat Penerbit:
Graha Unri Press
Alaf Riau, Jl. Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru, Riau, Indonesia
Telp. (0761) 22961 Fax. (0761) 857397
e-mail: arnain_99@yahoo.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak
sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis
dari penerbit

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Cetakan pertama: Maret 2005

Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Edyanus Herman Halim, SE., MS
Raja Buncit Kedekut/Pembangunan Ekonomi
Dalam Kawalan Budaya Melayu;
-- Pekanbaru : Alaf Riau, 2005
266 hlm ; 13 cm

ISBN 979-3497-10-6

1. Ekonomi Pembangunan.

I. Judul.

Karya ini dipersembahkan bagi orang-orang yang telah mengisi bagian dalam perjalanan panjang hidup ini. Teristimewa untuk Istriku Tersayang (Rini Sahida, SE) yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke-28. Semoga tetap tabah mengurus anak-anak dan keluarga. Terima kasih atas dukungannya selama ini.

Pengantar Penulis

DIMENSI KEBANGKITAN EKONOMI MELAYU RIAU

Pemikiran dan kesemarakkan wacana tentang ekonomi dan budaya di Riau menggema kembali sejak dicanangkannya Visi dan Misi Riau 2020. Secara nyata dapat dilihat kemampuan visi tersebut menciptakan daya dorong dan keinginan masyarakat Riau untuk memiliki kehidupan ekonomi yang lebih baik dalam kerangka nilai-nilai yang berkesesuaian dengan apa yang mereka anut selama ini. Lebih spesifik konteksnya diterapkan pada kebudayaan Melayu sebagai pemilik tradisional wilayah Provinsi Riau. Meskipun heterogenitas Riau sangat tinggi, pemahaman terhadap budaya Melayu sebagai basis dianggap sah, karena dari latar belakang sejarah ataupun karakteristik nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Melayu dianggap mampu menjadi fundamen dan penguat dinamika Riau ke depan, baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial kemasyarakatan lainnya.

“Dimana tanah dipijak di situ langit dijunjung, dimana air disauh di situ ranting dipatahkan,” menjadi dasar pembenaran utama bahwa budaya Melayu adalah yang paling representatif untuk dikedepankan, dilestarikan, dan diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Riau. Meskipun sumber dari nilai-nilai budaya Melayu itu sangat universal seperti dalam ungkapan, “*Adat bersendi sara’, sara’ bersendi kitabullah*”, tetapi dalam hal-hal tertentu masih nampak adanya differensiasi makna dan epistemologinya.

Keinginan yang kuat untuk menjadikan budaya Melayu sebagai warna dari segala aktivitas mungkin saja dapat diterima. Dorongan yang kuat untuk itu muncul dari perlakuan yang tidak adil dari penguasa terhadap masyarakat di Riau selama ini. Marginalisasi pada zaman Orde Baru menyebabkan sebahagian masyarakat Melayu Riau tidak mampu berkembang. Bahkan secara bertahap mereka kehilangan asset ekonominya. Akibatnya masyarakat Melayu Riau tidak punya banyak kesempatan untuk mempertahankan dan memutakhirkan adat dan tradisinya. Termasuk menjaga kesinambungan lestariannya implementasi budaya Melayu pada anak kemenakan. Falsafah, “*Dak lokang dek pane, dak lapuak dek hujan*”, tidak banyak tercermin dalam kehidupan nyata.

Pada satu sisi, arus globalisasi memberi pe-

luang masuknya nilai-nilai lain yang berbeda, bahkan banyak yang saling berseberangan satu sama lain. Kehadirannya mampu mereduksi pemegangan masyarakat terhadap budaya atau nilai-nilai Melayu. Tuntutan global hanya berkisar pada satu kunci penting, yakni persaingan terbuka. Masyarakat terpecah ke dalam dua kutub utama. *Pertama*, mereka yang ingin menyerap kehidupan keras persaingan global dengan melakukan penyesuaian. Berbagai piranti menuju ke kanchah itu disiapkan dalam dirinya seperti keterampilan, cara hidup, dan atribut-atribut kehidupan lainnya. Kelompok ini percaya bahwa mereka hanya mampu bertahan bila arus kehidupan global dapat diantisipasi dan dikendalikan.

Kedua, adalah mereka yang percaya bahwa arus global telah merusak tatanan kehidupan dan keharmonisan. Orang hanya bisa bertahan dan akan mampu bertahan (*survival*) bila mampu membentengi diri dari arus globalisasi dengan memegang teguh nilai-nilai tradisional mereka. Pengejawantahan nilai-nilai menjadi sangat penting untuk menata kembali sistem kehidupan bersama. Meskipun dihadapkan pada “pemberontakan” kaum muda, mereka yang percaya pada kelompok ini yakin bahwa cara yang terbaik untuk mengharmonisasi kehidupan adalah kembali pada implementasi nilai-nilai tradisional sambil melaku-

kan pemutahiran-pemutahiran terhadap beberapa substansi nilai-nilai yang memang membutuhkan penyesuaian. Apakah itu dalam sistem hukum, upacara adat, maupun hubungan antar manusia, termasuk hubungan antara pemimpin dan masyarakatnya.

Polarisasi integrasi berbagai suku yang hidup di Riau menyebabkan adanya perpaduan dan saling menyesuaikan dalam sosok budaya masing-masing. Jumlah penduduk dari suku Melayu dan suku lainnya hampir sama banyaknya. Meskipun masih dapat dikatakan sebagai rumpun Melayu, namun pada aspek-aspek tertentu (terutama agama dan bahasa) memiliki perbedaan yang signifikan. Toleransi terhadap perbedaan tersebut guna menjaga keharmonisan dan tatanan kehidupan bersama memunculkan tradisi-tradisi baru, dan bahkan kelompok-kelompok masyarakat baru dengan sosok budaya campuran yang “unik”. Sebagai suatu proses dialektika yang dinamis, kebudayaan bergerak lewat dialog atau konflik atau tawar-menawar setiap komponen masyarakat. Meskipun yang terlahir dari proses itu baru berupa sosok budaya kemapanan sementara, namun tidak sedikit orang yang menginginkannya. Kampung halaman bukan lagi persoalan utama yang mesti dikedepankan sebagai kebanggaan. Pokok penting yang harus diciptakan adalah kebersamaan harmonisasi tanpa

melunturkan identitas.

Di Riau persoalan ekonomi mungkin sejak dulunya jauh lebih penting ketimbang terperangkap dengan masa lalu. Proses pemenuhan kebutuhan manusia dengan sumber-sumber yang terbatas banyak yang dapat dipecahkan di Riau. Anugerah sumberdaya alam yang melimpah menjadikan wilayah ini sebagai ajang pemenuhan keinginan dan kebutuhan nasional. Eksploitasi menjadi sesuatu yang paling cocok diletakkan di sini dari aspek tujuan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah selalu menjamin terselenggaranya eksploitasi sumber-sumber ekonomi oleh siapa saja yang dianggap pantas melakukannya. Kolaborasi pemerintah dan swasta memburu setiap jengkal tanah dan kekayaan yang ada di dalamnya ternyata berakibat sangat fatal terhadap nilai-nilai budaya Melayu, dan terutama sekali ekonomi masyarakat Melayu itu sendiri.

PEMAHAMAN terhadap kinerja ekonomi secara makro ditandai dengan beberapa indikator menjadi cerminannya. Ekonomi sejak dulunya secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dan keinginan-keinginan dengan sumber-sumber yang terbatas. Proses demikian melahirkan tidak saja tampilan ekonomi, tetapi juga cara-cara, model-model, dan perilaku untuk

memperolehnya. Proses dialektika dalam sistem perekonomian memunculkan pertarungan hidup yang “mengenaskan” di Riau.

Masyarakat dengan sosok budaya modern hidup di perkotaan dengan aliran yang deras. Dinamika mereka diwarnai oleh konsumsi, eksploitasi, keunggulan dan profit. Interaksi manusia banyak didasarkan pada aspek kepentingan, keuntungan, dan “kenikmatan”. Komitmen tercipta bila satu sama lain berhasil menyepakati bahwa antara mereka terdapat selisih *revenue* dan *cost* yang positif. Sementara itu, di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang masih menggunakan sosok budaya tradisional hidup dalam sistem ekonomi semi autarki. Ketika mereka mampu menghasilkan lebih banyak sentuhan-sentuhan konsumerisme, memerangkap mereka untuk tetap hidup seadanya dalam sistem sosial desa yang sederhana dan tradisional.

Asset ekonomi mereka dipersempit secara perlahan-lahan dan tidak jarang dilegitimasi negara. Hanya sedikit sekali peluang bagi mereka untuk mampu mengakses kepada sumber-sumber ekonomi yang lebih dinamis. Pasar dari proses kreativitas mereka dihadapkan pada perilaku monopsonis/monopolis yang memiliki *bargaining position* yang sangat kuat. Pada akhirnya, masyarakat kelompok ini mencoba bertahan

untuk hidup dengan memanfaatkan apa-apa yang masih tersisa dari keserakahan modernisasi.

Realitas sosial ekonomi yang nampak dari akibat *economic conduct* sebagaimana diuraikan tersebut sangat fatal. Riau menampilkan performa ekonomi yang sangat timpang. Secara struktural dominasi sektor primer masih tinggi dan bergerak membaik. Sedangkan sektor sekunder dan tersier makin buruk.

Pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, tetapi tidak mampu mensejahterakan banyak orang. Tahun 2002 misalnya, pertumbuhan ekonomi Riau sebesar 5,59%, sedangkan Indonesia hanya sebesar 4,12%. Pertumbuhan tertinggi adalah pada sektor transportasi (10,16%) dan terendah pada sektor keuangan (2,45%). Sementara sektor pertanian (5,36%) dan sektor industri (4,72%).

Bila diamati pergeserannya pada kurun waktu lima tahun terakhir, tampak bahwa bergerak dan pergerakannya tidak makin mengarah pada modernisasi ekonomi, tetapi lebih menuju pada ekonomi tradisional yakni pertanian. Gejala ini menunjukkan sektor ekonomi yang dekat dengan sebahagian besar kehidupan masyarakat Riau adalah sektor primer. Tetapi, bila diamati kepemilikan asset sektor-sektor ekonomi primer sebahagian besar sudah menjadi milik sekelompok

kecil orang. Karenanya, pertumbuhan pada sektor primer dengan porsi yang masih dominan tidak menunjukkan adanya perbaikan kehidupan ekonomi masyarakat Riau.

Pada sektor industri sebagai sektor dominan kedua ditandai oleh perkembangan industri besar dan industri pengolahan di wilayah Batam. Ini berarti dampak pembangunan industri tidak memiliki *multiplier effect* yang berarti pada masyarakat. Secara struktural dalam sektor yang bersangkutan terdapat ketimpangan yang mencolok sehingga eksistensi sektor industri hanya menimbulkan perilaku-perilaku ekonomi yang kurang memperhatikan aspek-aspek lain kecuali profit. "Sakitnya" profit tersebut tidak disertai dengan benefit bagi wilayah Riau, karena berbagai prosesnya tidak memiliki *forward linkage* dan *backward* yang berarti.

Ketimpangan perwilayahan juga tergambar dari besarnya peranan Batam. Tahun 2002 peran Batam mencapai 26,45% dan Pekanbaru 12,78%. Kondisi ini mencerminkan wilayah-wilayah perkotaan memberikan kontribusi yang lebih besar sedangkan wilayah pedalaman peranannya sangat kecil. Wilayah pesisir pantai seperti Bengkalis, Indragiri Hilir, dan Rokan Hilir relatif lebih baik dari wilayah pedalaman seperti Pelalawan, Kuantan Singingi, dan Rokan Hulu.

Selain ketimpangan struktur dan perwilayahan, ketimpangan dari sudut kelompok masyarakat juga signifikan. Meski PDRB perkapita tanpa migas sudah mencapai Rp. 5,8 juta dan mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi Indeks Gini Ratio menaik dari 0,29 tahun 1998 menjadi 0,31 pada tahun 2002

Ketiga ketimpangan-ketimpangan ekonomi tersebut membawa implikasi terhadap aspek-aspek sosial lainnya. Perilaku masyarakat semakin apatis dan kepedulian terhadap komunitas tidak makin proaktif menciptakan kebaikan bersama. Masyarakat modern semakin membabi buta melakukan eksploitasi asset-aset ekonomi untuk memperoleh profit jangka pendek. Sementara masyarakat tradisional harus bertahan hidup dengan asset-aset ekonomi yang kian terbatas dan kekuatan ekonomi yang makin melemah.

Sektor-sektor modern yang hanya dimiliki segelintir orang menguasai sebagian besar asset ekonomi menampilkan perilaku ekonomi dan sosial yang makin tidak sehat bagi pengejawantahan nilai-nilai dan Budaya Melayu. Sementara itu sektor tradisional yang dominan melingkup masyarakat menampilkan perilaku-perilaku frustrasi dan berjuang secara kurang elegan (*kemiskinan membawa kekufuran*). Akibat itu, implikasi dan pelestarian Budaya Melayu termasuk pemu-

tahirannya sulit untuk dilakukan. Namun demikian harapan untuk itu tetap saja ada sepanjang pemahaman terhadap kondisi kekinian dapat dilakukan dengan baik untuk memetakan dan menskenario-kan masa depan yang lebih baik.

Bagaimanapun, berbagai perbaikan aspek sosial masyarakat telah banyak pula diupayakan. Meski belum mampu sepenuhnya menjadi eksistensi dan kapabilitas budaya Melayu. Sebagaimana dirilis oleh Prof. Emil Salim bahwa terdapat perbaikan indeks pembangunan manusia yang cukup signifikan di Riau. Selain itu keinginan bersekolah yang makin besar sampai pada jenjang pasca sarjana memberi peluang bagi perbaikan kualitas intelektual masyarakat Riau. Angka harapan hidup yang makin tinggi menyebabkan kesempatan mengabdikan yang kian besar. Realitas-realitas sosial dan ekonomi di atas selanjutnya akan tarik-menarik. Ada yang bersinergi, ada yang berbenturan, dan ada pula yang saling tidak peduli satu sama lain. Semuanya akan melahirkan sebuah realitas baru, dan tentunya sosok budaya baru.

MENURUT pandangan Ong Hok Ham (2002), negara agraris biasanya memakai kelebihan dananya untuk membangun monumen-monumen suci raksasa untuk mengungkap keagungan dewa-raja di karatonnya. Sementara aritokrasi kerajaan

maritim memakai sebagian besar dananya untuk hidup mewah. Mereka banyak membeli produk luar negeri seperti sutra, perhiasan, dan lain-lain. Bila diamati di Riau, monumen suci hanya dapat dijumpai di Muara Takus dalam bentuk candi. Mungkin peninggalan ini menunjukkan bahwa masyarakat di sana merupakan masyarakat agraris dan hidup dari sektor pertanian.

Sedangkan jika berkunjung ke Istana Siak akan dijumpai peninggalan alat musik yang khabarnya saat ini hanya ada dua di dunia, yakni di Siak dan di Inggris. Alat musik dalam bentuk *Gramophone* raksasa yang pada zamannya tentu merupakan barang mewah. Keadaan ini menggambarkan masyarakat di sana merupakan masyarakat maritim yang lebih menyenangi kemewahan, perhiasan, dan produk-produk asing.

Dua ciri masyarakat Riau ini harus diperhatikan secara seksama untuk memetakan kembali kebangkitan ekonomi dunia Melayu. Bagi masyarakat maritim, sumber ekonominya adalah berupa uang tunai dan barang. Kebanyakan penduduknya bekerja sebagai tukang, nelayan, dan pedagang kecil. Negara maritim memperoleh hasil dari bea cukai dan perdagangan. Banyak wilayah maritim tidak memiliki aktivitas pertanian. Mereka mengumpulkan beras dan makanan lainnya dari wilayah agraris.

Dari latar belakang di atas, maka kebangkitan

ekonomi dunia Melayu hanya mungkin dicapai melalui “penyambungan” kedua karakteristik wilayah tersebut. Wilayah maritim dikembangkan sebagai pusat-pusat perdagangan dan pelabuhan antar bangsa. Sementara wilayah agraris ditandai dengan pengembangan pertanian. Untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agraris memperoleh nilai tambah yang lebih baik diperlukan adanya sentuhan pasca produksi agraris. Ini berarti pengembangan agro industri harus lebih dikedepankan untuk menjembatani kebutuhan wilayah maritim dan agraris. Pemerintah harus masuk dalam hal penyedia infrastruktur dasar pengembangan industri maupun transportasi penghubungnya.

Selain itu, Umar Kayam (1996) menjelaskan, bahwa sesungguhnya terdapat dua sosok budaya yang menjadi model sosok budaya nusantara, yakni sosok budaya feodal aristokratis dan sosok budaya paternalistik. Sosok budaya feodal aristokratis dijumpai pada masyarakat Jawa. Dalam sosok budaya ini kehidupan dikendalikan secara vertikal. Sedangkan sosok budaya paternalistik menekankan sistem ekonomi pertanian tradisional yang semi autarki.

Sosok budaya lain yang berkembang selanjutnya adalah sosok budaya kolonial yang sesungguhnya mengadopsi sosok budaya feodal aristokratis. Untuk mampu berkembang ke depan, ketiga

sosok budaya tersebut harus dilepas. Umar Kayam merekomendasikan perlu dilakukan pergeseran ke arah sosok budaya demokrasi modern jika masyarakat Melayu ingin bangkit. Kuatnya akar budaya feodal aristokratis menjadi penghalang bagi terjadinya transformasi ke sosok budaya demokrasi modern. Bagi kebanyakan masyarakat pedalaman di Riau, belenggu sosok budaya paternalistik menyebabkan sulitnya lahir inovasi-inovasi dan produktivitas yang tinggi sebagai ciri utama masyarakat dengan sosok budaya demokrasi modern.

Secara individual dapat pula dipahami bahwa sebenarnya tidak satupun budaya yang dapat dinilai terbaik dan cocok untuk semua ukuran. Menurut John P. Kotter & James L. Heskett (1996) suatu budaya dinyatakan baik apabila ia serasi dan selaras dengan konteks atau kondisi objektif dimana seseorang berada. Hanya budaya yang serasi secara kontekstual dan strategis yang dapat meningkatkan kinerja.

Bila direnungkan pendapat tersebut maka penting bagi masyarakat Melayu untuk senantiasa melakukan pemutahiran terhadap perilaku-perilaku dan tampilan budayanya agar lebih serasi secara kontekstual. Globalisasi memaksa orang-orang untuk beranjak dari satu keunggulan ke keunggulan lainnya yang lebih baik. Hal ini memerlukan *entrepreneurship* dengan mengembangkan jiwa kreatif

dan inovatif yang tinggi. Kalau masyarakat Melayu mau bangkit dari segi ekonomi, maka pemilahan nilai-nilai dalam budaya Melayu yang menjunjung kemampuan kreativitas yang tinggi, harus lebih digesakan untuk selanjutnya ditanamkan pada generasi mendatang.

UNTUK berjaya di masa depan, dunia Melayu dihadapkan pada beberapa hal pokok. *Pertama*, mencari titik persinggungan yang paling pas dari setiap nilai yang dipegang oleh berbagai kelompok masyarakat. Heterogenitas masyarakat Riau memerlukan adanya komitmen bersama, bukan pemaksaan kehendak terhadap satu proses tertentu. *Kedua*, karakteristik masyarakat maritim dan agraris sangat berbeda satu sama lain. Kedua karakter itu ada di Riau sehingga perlu ada “jembatan” yang dapat menghubungkannya. Tidak mungkin masing-masing hidup sendiri-sendiri. Infrastruktur dasar sangat urgen dikembangkan sehingga lalu-lintas masyarakat keduanya dapat dipercepat dinamikanya.

Ketiga, sesuai dengan tantangan global maka tenggelam dan percaya bahwa masyarakat Riau akan berjaya dengan mempertahankan budaya feodal aristokratik dan paternalistik adalah bunuh diri. Untuk mampu bertahan di masa depan bukannya kembali ke masa lalu, tetapi beradaptasi

dan mengembangkan sosok budaya demokrasi modern. Ini momen adanya pemutahiran budaya Melayu pada aspek-aspek tertentu. *Keempat, entrepreneurship* dengan mengembangkan jiwa yang kreatif dan inovatif menjadi tolok ukur penting agar masyarakat Melayu mampu memiliki keunggulan bersaing tiada henti (*sustainable competitive advantage*). Untuk itu perlu diidentifikasi nilai-nilai budaya Melayu yang mampu membangkitkan sosok budaya tersebut untuk dimatangkan dalam sikap hidup generasi mendatang. Dalam masyarakat Kuantan Singingi misalnya filosofi kesejahteraan digambarkan dengan pepatah, “*Padi menguniang, Jaguang meupiah, Toronak bakombang biak, Anak buah sonang santosa, Mamak disombah urang puld*”.

Apabila nilai ini ditanamkan ke generasi mendatang, maka konsekuensi yang timbul menjaga ketersediaan pangan secara berkesinambungan; menjaga perbaikan kualitas hidup manusia (SDM) secara berkelanjutan; dan mempertahankan eksistensi, marwah, dan kapabilitas masyarakat seutuhnya.

KEGELISAHAN dan besarnya harapan akan kegemilangan Melayu Riau di masa depan, membuat saya merasa terpanggil untuk berkecimpung di dalamnya. Maka secara alami mengalirlah serpihan-serpihan pemikiran ini yang kemudian

dimuat di berbagai media cetak. Mengingat tulisan di media cetak mudah dilupakan atau hanya diingat sepintas lalu, maka kuat keinginan untuk mempublikasikannya dalam bentuk yang lebih tahan lama berupa buku ini.

Demikianlah kurang-lebih alasan dan proses singkat kelahirannya. Mengakhiri pengantar tulisan ini, sebagai proses kreatif, saya menyadari buku ini tidak akan terbit tanpa sokongan dan bantuan berbagai pihak. Tanpa menyebut nama dan gelar saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan media cetak di Riau seperti *Riau Pos*, *Riau Mandiri*, *Riau Tribune*, dan lain-lain. Atas kebaikan hati dan perhatian merekalah memungkinkan saya terus menulis dan menulis.

Saya juga mengenang budi atas jasa-jasa kepada mereka yang telah memberikan sumbangan baik berupa materi, tenaga, dan terlebih pikiran. Tersebab terbatasnya halaman ini, maafkan saya tidak dapat menyebutkannya satu-persatu. Satu hal yang pasti, kenangan budi yang telah ditanamkan, tak mungkin saya lupa hingga akhir zaman nanti.

Pekanbaru, 20 Februari 2005,

EHH

SENARAI ISI

PENGANTAR PENULIS

<i>Dimensi Kebangkitan Ekonomi Melayu Riau</i>	7
DAFTAR ISI	13

BAGIAN PERTAMA

EVALUASI DAN PROSPEK EKONOMI RIAU	27
Berjalan Meniti Buih	29
<i>(Renungan Sosial Ekonomi 45 Tahun Provinsi Riau)</i>	
Menggantung Asap Dalam Himpitan	36
<i>(Evaluasi Ekonomi Indonesia Memasuki 2003)</i>	
Ada Batang, Cendawan Tumbuh	43
<i>(Pemilu dan Ekonomi Riau Triwulan I 2004)</i>	
Awan Mengandung Hujan	51
<i>(Prospek Ekonomi Riau 2004)</i>	
Bagai Menepung Tiada Berberas	59
<i>(Evaluasi Ekonomi Riau 2004)</i>	
Berpisah Bukannya Bercerai	66
<i>(Meneroka Ekonomi Riau Pasca Lepasnya Provinsi Kepri)</i>	
Air Pasang, Tepian Beralih	73
<i>(Memetakan Prospek Ekonomi Riau 2005)</i>	

BAGIAN KEDUA

FENOMENA DAN IMPLEMENTASI

PEMBANGUNAN EKONOMI RIAU	81
Angan Lalu Paham Tertumbuk	83
<i>(Menunggu Bukti Nyata Program K2I)</i>	
Tak Lapuk di Hujan, Tak Lekang di Panas	90
<i>(Wacana Pembagian Hasil SDA Riau)</i>	

Arang Habis, Besi Binasa	97
<i>(Mengukur Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan di Riau)</i>	
Jauh Panggang dari Api	104
<i>(Memanfaatkan Momentum Reformasi untuk Riau Baru)</i>	
Bagai Memperlebar Kandang Musang	111
<i>(Fenomena Pendirian Berbagai Perusahaan di Riau)</i>	
Menyuap Makanan Enggang pada Burung Pipit	117
<i>(Evaluasi Kinerja BUMD Riau)</i>	
Ada Musang Berbulu Ayam	123
<i>(Mencermati Perseteruan Proyek Multiyear di Riau)</i>	
Atap Rumbia, Perabung Upih	131
<i>(Fenomena Proses Tender Pembangunan DPRD Riau)</i>	
Ayam Kelaparan Mati di Rangkang	138
<i>(Menggugat Alokasi Kredit untuk Rakyat Miskin di Riau)</i>	

BAGIAN KETIGA

MENANTI BERKAH OTONOMI DI RIAU	145
Upah Lalu, Bandar Tak Masuk	147
<i>(Fenomena Kuznets dan Berkah Otonomi di Riau)</i>	
Ke Hulu Serentak Galah, Ke Hilir Serempak Dayung	157
<i>(Menggali Potensi PAD dalam Konteks Otonomi Daerah)</i>	
Tigo Tungku Sejarahangan	163
<i>(Menata Model Pemerintaban Daerah Otonom)</i>	
Ayam Berinduk, Sirih Berjunjungan	171
<i>(Menyongsong Implementasi Otonomi Desa di Riau)</i>	
Menghela Bambu Sunsang	177
<i>(Reformasi Birokrasi Riau di Era Otonomi Daerah)</i>	
Rumah Jadi, Pahat Berbunyi	183
<i>(Dinamika Riau Pasca Otonomi Daerah)</i>	
Condong Menongkat, Rebah Menegakkan	189
<i>(Fenomena Penyusunan Anggaran Proyek Strategis di Riau)</i>	
Biar Berputih Tulang daripada Berputih Mata	197
<i>(Polemik Dana Alokasi Umum untuk Riau)</i>	

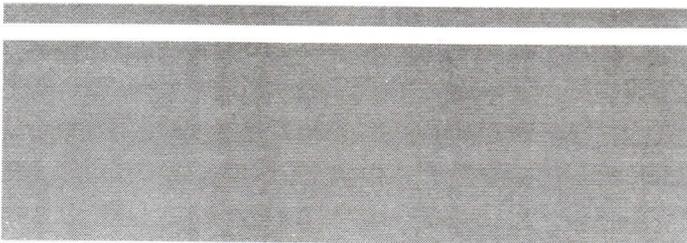
BAGIAN KEEMPAT

DINAMIKA SOSIAL-EKONOMI

RIAU PASCA REFORMASI	209
Nahkoda Lengah, Bahtera Berkecai	211
<i>(Ketimpangan Ekonomi Masyarakat Riau)</i>	
Lubuk Akal Tepian Mandi	217
<i>(Perebutan Laban Perpustakaan Daerah untuk Bank Riau)</i>	
Dayung Serentak, Untung Serempak	225
<i>(Memilih Pemimpin yang “Core Competence” di Riau)</i>	
Duduk Meraut Ranjau, Tegak Meninjau Jarak	232
<i>(Ketergantungan Ekspor Riau pada Singapura)</i>	
Raja Buncit Kedekut	239
<i>(Fenomena Pemimpin dan Masyarakat di Era Reformasi)</i>	
Menangguk di Air Keruh	246
<i>(Mengembalikan Lokomotif Reformasi di Riau)</i>	
Bagai Si Kudung Mendapat Cincin	252
<i>(Ego Sektoral Pembinaan UKM)</i>	
Elok Lenggang di Tempat Datar	258
<i>(Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Riau)</i>	
TENTANG PENULIS	265

BAGIAN I

**EVALUASI
DAN PROSPEK
EKONOMI RIAU**



RESEARCH REPORT
NO. 100

THE
EFFECTS OF
THE
RECENT
ECONOMIC
RECOVERY
ON THE
LABOR MARKET

BY
J. H. HARRIS
AND
J. H. HARRIS

BERJALAN MENITI BUIH

(Renungan Sosial Ekonomi 45 Tahun Provinsi Riau)

Tanggal 9 Agustus 1957 merupakan tonggak sejarah pertama lahirnya Provinsi Riau. Ini berarti usianya telah memasuki 45 tahun dan cukup dewasa jika dibandingkan dengan usia manusia. Dalam usia itu Riau ternyata dihadapkan pada dilema kekinian yang pada dasarnya bisa menjadi sumber bencana. Kita yang kini malang melintang di Riau; apakah itu menjadi pemimpin, menjadi politisi, atau menjadi cendekiawan, atau bahkan menjadi rakyat, pemuda dan lain sebagainya perlu menengok sekejap pada persoalan sosial ekonomi Riau terbaru yang berkembang.

Berdasarkan data statistik yang disampaikan BPS Riau pada acara Pra-Forum Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2002, terungkap beberapa data yang bila dicermati cukup mencengangkan. Ternyata dalam dua tahun terakhir sempena diimplementasikannya otonomi daerah dan dimulainya era desentralisasi fiskal

jumlah penduduk miskin Riau hanya menurun relatif kecil. Pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin Riau adalah sebesar 10,38% dari total penduduk. Sedangkan tahun 2001 berkurang menjadi 10,06%. Ini berarti Riau hanya mampu mereduksi penduduk miskinnya sebesar 3,1%.

Diamati di setiap kabupaten ternyata hanya enam kabupaten yang jumlah penduduk miskinnya mengalami penurunan. Sedangkan sembilan lainnya malah mengalami peningkatan yang cukup spektakuler. Kabupaten yang mengalami kenaikan persentase penduduk miskin tertinggi adalah Kuantan Singingi. Pada tahun 2000 di Kuansing persentase penduduk miskinnya hanya 1,70% tetapi pada tahun 2001 naik menjadi 11,63%. Ini berarti sejak berpisah dengan Indragiri Hulu terjadi lonjakan persentase penduduk miskin mencapai 584,12%. Inhu sendiri sebagai kabupaten induk justru mampu mengurangi persentase penduduk miskinnya dari sebesar 13,97% pada tahun 2000 menjadi hanya 8,54% pada tahun 2001, atau 38,87%.

Hal yang sama juga dialami oleh Kabupaten Kampar, Pelalawan, Rokan Hulu, dan Rokan Hilir. Memilukan sekali bila semua daerah bekas Kampar yang dimekarkan ini jumlah penduduk miskinnya menjadi bertambah. Kampar sebagai kabupaten induk pada tahun 2000 persentase penduduk

miskinnya hanya 5,49% sedangkan tahun 2001 naik menjadi 14,48% (meningkat 163,75%). Pelalawan sebagai kabupaten pemekaran pada tahun 2000 persentase penduduk miskinnya hanya 7,70% tetapi pada tahun 2001 membengkak menjadi 19,49% (meningkat 153,12%). Sedangkan Rokan Hulu pada tahun 2000 persentase penduduk miskinnya hanya 9,44% dan tahun 2001 naik menjadi 17,23% (meningkat 82,52%).

Pecahan Kampar lainnya adalah Rokan Hilir yang mengalami peningkatan persentase penduduk miskin mencapai 18,67%. Pada tahun 2000 persentase penduduk miskinnya 14,94% sedangkan tahun 2001 naik menjadi 17,23%. Beberapa kabupaten lain yang meningkat persentase penduduk miskinnya adalah Kepulauan Riau, yakni sebesar 2,85% pada tahun 2000 naik menjadi 3,85% pada tahun 2001 (meningkat 35,09%), Kabupaten Natuna dari 9,91% pada tahun 2000 naik menjadi 12,36% tahun 2001 (meningkat 24,72%), Kota Batam pada tahun 2000 hanya 1,66% pada tahun 2001 naik menjadi 2,06% (meningkat 24,10%).

Sementara Kota Dumai pada tahun 2000 sebesar 11, 51% pada tahun 2001 naik menjadi 14,31 % (meningkat sebesar 24,33 %). Bila diamati wilayah kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi pada tahun 2001 maka

Pelalawan menempati urutan teratas, yakni 19,49%, diikuti oleh Rokan Hilir sebesar 17,73%, Rokan Hulu 17,23%, Kampar 14,48%, Dumai 14,31%, Bengkalis 13,96%, Natuna 12,36%, dan Kuantan Singingi 11,63%.

Kabupaten yang mampu mengurangi jumlah penduduk miskinnya antara lain adalah Karimun menurun dari 19,72% tahun 2000 menjadi hanya 8,67% tahun 2001, Siak dari 9,31% tahun 2000 menjadi hanya 5,01% pada tahun 2001, Bengkalis dari 25,36% menjadi 13,96%, dan Indragiri Hulu dari 13,97% menjadi 8,54% serta Indragiri Hilir dari 9,20% menjadi 7,96%. Sedangkan Kota Pekanbaru dari 7,10% tahun 2000 turun menjadi 5,82% pada tahun 2001.

Terlepas dari akurasi data yang dilansir BPS Riau tersebut valid atau tidaknya, cerminan Riau saat ini seperti gambaran di atas tentunya membuat bulu kuduk kita menjadi berdiri. Pemekaran kabupaten ternyata belum memberi dampak positif bagi masyarakat kita secara umum. Tidaklah mereka menjadi tambah sejahtera dan bahkan disinyalir aparat pemerintah dan para anggota dewanlah yang menikmati berkahnya. Ditambah lagi dengan uang yang kian berlimpah yang ada di seluruh Riau bukannya makin membuat rakyat Riau menjadi makin sejahtera.

Otonomi daerah ternyata masih belum bergema pada tingkat masyarakat dalam hal mengantisipasi tantangan global saat ini. Transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah ternyata belum mampu “mengungkit batang terendam” Riau. Pada tahun 2002 ini diperkirakan uang yang dicadangkan untuk Riau akan mencapai Rp 8,36 trilyun yang terdiri dari Rp 4,912 trilyun untuk keperluan pengeluaran pembangunan dan Rp 3,123 trilyun untuk keperluan pengeluaran rutin. Jika uang tersebut merupakan pecahan seribu rupiah lalu disambung-sambung satu sama lain mungkin sudah mampu menutup seluruh wilayah Riau ini. Artinya, ketika Riau bergelimang uang mengapa justru kemiskinan rakyat yang meningkat?!

Bila diamati dari aspek pertumbuhan ekonomi, maka Riau justru lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi nasional hanya 3,3% sedangkan Riau mampu tumbuh sebesar 5,05%. Ini menguatkan dugaan bahwa yang menikmati Riau ini masih belum lagi masyarakatnya tetapi justru pihak-pihak tertentu yang mampu mengail di air keruh. Anehnya lagi menurut BPS Riau pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Riau akan melambat sehingga diperkirakan hanya akan tumbuh 5%. Hal ini disebabkan oleh turunnya secara berarti nilai tambah sektor perbankan. Kea-

daan tersebut semakin menguatkan hipotesis kita bahwa kemampuan kita memanfaatkan sumber keuangan yang mulai berlimpah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat masih sangat lemah.

Pada satu sisi pertumbuhan penduduk Riau mengalami peningkatan yang paling tinggi secara nasional. Bila pertumbuhan penduduk nasional hanya mencapai 1,4%, Riau justru mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 3,8%. Angka ini lebih dominan disebabkan oleh migrasi, bukan oleh angka kelahiran. Artinya Riau sedang diserbu penduduk pendatang. Tentunya untuk memanfaatkan kue yang tadinya kian membesar dan selanjutnya dialirkan ke daerahnya. Rakyat Riau masih saja tetap menjadi penonton yang setia dan seringkali berseteru mendiskusikan permainan yang sedang berlangsung dan saling mencaci maki para pemainnya. Padahal pemain itu sendiri sedang menikmati keasyikannya dalam bermain dan bahkan menikmati untung yang sangat besar menjadi pemain. Menjadi penonton memang selalu jauh lebih pandai dari pemain dan memang tidak jarang ketika pemain hanya adem-adem saja, justru penontonlah yang baku hantam satu sama lain.

Dari sekarang, mumpung belum terlambat, perlu kiranya ada kesadaran hakiki dari segenap komponen masyarakat Riau untuk membalikkan

keadaan. Kita harus berpacu dalam kearifan dan kebersamaan, bukannya berseteru untuk menuai kezaliman. Marwah Melayu tidaklah akan mampu bertahan hanya dengan kefasihan kita mengucapkan selogan “Tak Melayu Hilang di Bumi”. Lebih penting dari itu adalah kerja keras dan kearifan kita mengentaskan anak jati Melayu ini dari kemiskinan supaya mereka memang mampu “*Berjalan meniti buih dan berenang sampai ke tepian*”. Bukan hanya menggapai mimpi yang tak kunjung jadi kenyataan. ♦

MENGGANTANG ASAP DALAM HIMPITAN

(Evaluasi Ekonomi Indonesia Memasuki Tahun 2003)

Perkembangan perekonomian Indonesia pada tahun 2002 telah mengalami pasang surut yang berarti. Ditandai oleh beberapa indikator makro pergerakan ekonomi Indonesia seakan mulai menampakkan titik cerah. Ada geliat di beberapa sektor, namun pada satu sisi lainnya berbagai masalah masih menghimpit. Pertumbuhan ekonomi yang relatif cepat pada kuartal ketiga tahun 2002 merupakan momentum yang bagus bagi bergeraknya dinamika ekonomi Indonesia. Pada kurun waktu tersebut ekonomi Indonesia ternyata mampu tumbuh sebesar 3,92%. Hal ini sejalan dengan makin membaiknya perkembangan ekonomi global sehingga pada tahun 2003 ada titik cerah yang dapat diharapkan.

Indikator perbaikan makro ekonomi ditandai pula oleh turunnya suku bunga SBI dari 17,50% menjadi 13,04% dan pada bulan-bulan awal tahun 2003 Bank Indonesia akan berupaya menurun-

kannya sampai di bawah 10%. Ini akan mengakibatkan turunnya suku bunga deposito dan suku bunga pinjaman. Pada akhirnya akan menyebabkan terbukanya kesempatan untuk berinvestasi di sektor riil karena para pengusaha mulai berani memanfaatkan dana bank untuk berbisnis. Pemilik modal juga akan lebih melirik pasar modal ketimbang menempatkan dananya di bank. Ini merupakan salah satu pemicu bagi bergairahnya perekonomian. Para konsumen juga akan menggunakan kesempatan ini untuk membelanjakan uangnya, baik akibat adanya dana murah yang tersedia dari kredit-kredit konsumsi yang ditawarkan perbankan maupun dari dana mereka sendiri yang selama ini mengendap di bank. Permintaan domestik akan naik yang dapat memacu kembali produksi dalam negeri dan membuka peluang kerja.

Perkembangan ekspor Indonesia memberikan cerminan pula bagi membaiknya pasar global bagi produk-produk lokal. Pada kuartal keempat tahun 2002 ekspor Indonesia telah mencapai 5,3 milyar dolar AS yang merupakan angka tertinggi pada tahun 2002. Bila perkembangan ekspor terus membaik maka kesempatan untuk memanfaatkan pasar Internasional dapat menopang perkembangan ekonomi secara lebih baik. Peluang untuk itu terbuka lebar sejalan dengan membaiknya perekonomian berbagai negara Asia, khususnya ASEAN.

Indikator lain adalah membaiknya kinerja mata uang rupiah. Sepanjang tahun 2002 rupiah tercatat sebagai *Best Performing Asian Currency* yang diukur dari margin penguatan nilai tukarnya terhadap dollar AS. Hingga saat ini rupiah telah mengalami apresiasi mencapai 17%. Sedangkan mata uang China justru terdepresiasi -15,8%, Singapura -11,3%, dan Malaysia -8,8%. Hanya saja Thailand memang lebih baik yakni terapresiasi mencapai 22,7%.

Dari sisi keuangan negara hal yang cukup mendukung optimisme ekonomi pada tahun 2003 adalah adanya penurunan rasio hutang. Dalam tempo satu hingga satu setengah tahun terakhir *Debt to Ratio* terhadap PDB berhasil ditekan dari 100% di tahun 2001 menjadi 71,79% pada tahun 2002. Keadaan ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja ekonomi makro Indonesia.

Beberapa masalah yang mungkin menjadi pengganjal perbaikan kinerja ekonomi Indonesia tahun 2003 adalah terkait dengan isu-isu keamanan. Tragedi Bom Bali jelas menimbulkan dampak ekonomi yang tidak sedikit. Hal ini telah menyebabkan adanya perlambatan dalam pergerakan ekonomi, khususnya investasi. Sektor pariwisata mengalami guncangan yang sangat hebat. Derivasi dari sektor ini sangat lebar sehingga implikasinya terhadap perkembangan sektor lain cukup terasa,

seperti transportasi, perhotelan, dan restoran. Pendalaman dari implikasinya adalah pada faktor-faktor produksi dari *leading sector* tersebut. Imbasnya pada penurunan pendapatan dan daya beli domestik pada akhirnya memperlambat kemajuan dan perkembangan ekonomi.

Keberhasilan pemerintah meringkus berbagai pelaku pemboman dan secara transparan mengadilinya akan mampu memulihkan kembali kepercayaan asing terhadap Indonesia. Ditopang oleh keberhasilan perjanjian perdamaian dengan pihak GAM di Aceh maka titik pangkal membangun kepercayaan investor dapat mulai dan digerakkan menuju terciptanya suasana yang kondusif untuk melakukan investasi di Indonesia. Tanpa memperhatikan faktor kepastian hukum dan keamanan negara secara serius maka *risk country* Indonesia tetap akan tinggi dan kemampuan untuk menarik investasi asing tidak akan pernah terealisasi. Biaya yang dikorbankan untuk itu akan sia-sia belaka.

Beberapa kebijakan lain yang perlu secara hati-hati diterapkan di Indonesia adalah menyangkut privatisasi BUMN dan divestasi berbagai aset yang ada di BPPN. Pendekatan yang digunakan hendaknya jangan hanya dari aspek ekonomi semata dalam jangka pendek, tetapi implikasi yang mungkin timbul bila asset-asset tersebut tidak

menjadi milik anak negeri di masa-masa yang akan datang.

Pemicu perkembangan ekonomi Indonesia lainnya pada tahun 2003 adalah bila implementasi otonomi daerah makin baik dan terkoordinasi satu sama lain. Dampak positif dari berbagai pembangunan infrastruktur daerah akan terasa pada paroh kedua tahun 2003. Dinamika masyarakat akan makin tinggi dan arus barang akan makin meluas. Ini berarti perluasan permintaan pasar terhadap berbagai produk akan memberi peluang bagi sektor manufaktur untuk berkembang. Termasuk bila pemanfaatan dana desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang sudah dimulai pada tahun 2001 lalu diperkirakan akan menjadi pemicu baru berkembangnya permintaan domestik.

Hawa politik yang kian memanas perlu diantisipasi secara arif. Budaya politik yang santun sangat diperlukan untuk menjamin terselenggaranya event-event politik di Indonesia secara alami dan positif. Tahun 2003 merupakan *starting point* bagi setiap partai politik untuk mencari konstituen. Meskipun belum dimulai masa kampanye, tetapi tensi politik akan meningkat akibat adanya kampanye-kampanye terselubung yang dilakukan partai-partai. Diharapkan persoalan ini tidak akan mengganggu perbaikan kinerja ekonomi di

Indonesia. Kuncinya adalah melalui penegakan hukum dan kesepakatan bersama terhadap aturan main yang harus ditaati oleh semua pihak.

Tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah harus diperluas pada semakin transparannya pemerintah pusat dalam aspek desentralisasi fiscal. Sumber-sumber dana yang seharusnya sudah menjadi milik daerah harus sesegera mungkin diberikan ke daerah secara pasti dan terbuka. Keadaan ini diperlukan untuk mendorong kemampuan daerah menyusun APBD secara tepat sesuai waktunya. Termasuk sumber-sumber dana dari pusat yang masih dikendalikan secara ketat, seperti Dana Alokasi Khusus. Tahun 2003 disiapkan dana sebesar Rp 625 milyar untuk rehabilitasi 6908 SD dan MI. Sebaiknya pemerintah pusat menyerahkan persoalan perbaikan sekolah dasar ini pada daerah dan dananya diserahkan ke daerah. Berbagai proyek yang didanai oleh DAK juga banyak yang tidak transparan ditentukan pemerintah pusat padahal sumber dananya adalah dari eksploitasi SDA yang ada di daerah.

Berpijak pada berbagai perkiraan dan analisa di atas, maka optimisme perbaikan kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2003 bisa saja jadi kenyataan. Stabilitas keamanan dan kesadaran untuk memulihkan kondisi bangsa yang morat-marit karena multikrisis akan memberi peluang

untuk bangkit. Momentum pertumbuhan yang cukup baik pada kuartal ketiga tahun 2002 akan memicu pertumbuhan yang relatif baik pula pada paruh pertama tahun 2003. Permintaan domestik yang menguat dan pengeluaran pemerintah yang makin terarah, khususnya di daerah, berkembangnya ekonomi global sehingga ekspor dapat dipacu, dan stabilitas nilai tukar yang makin membaik memberi harapan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perkiraan yang optimis pada 2003 ekonomi Indonesia mampu tumbuh di atas 4,5%. Ini dapat terjadi bila faktor-faktor pengganggu dapat terkendali dengan baik dan kepercayaan internasional dapat dipulihkan secara berangsur-angsur. Jangan sampai hanya mampu “menggantung asap”. Indonesia tidak akan pulih ekonominya tanpa kerja keras dengan perencanaan yang matang. Himpitan ekonomi sekarang hanya akan lepas bila momentum perbaikan ekonomi yang terjadi dapat dimanfaatkan dengan baik. ♦

ADA BATANG, CENDAWAN TUMBUH

(Pemilu dan Ekonomi Riau Triwulan I 2004)

Pesta demokrasi di suatu negara tidak jarang membawa bencana dan malapetaka. Di Phillipina misalnya, dalam memperebutkan kursi presiden, terjadi insiden peledakan bom yang menewaskan banyak orang. Pergantian kepemimpinan yang bagaimanapun demokratisnya senantiasa rawan konflik. Bagi negara yang budaya demokrasi sudah mapan dan masyarakatnya yang memiliki etika politik santun kerawanan-kerawanan masih saja harus diperhitungkan. Di mata investor dan para pemburu rente adanya proses pemilihan umum (Pemilu) akan menaikkan resiko investasinya (*risk country*) serta cenderung bermain pada bisnis-bisnis jangka pendek (*speculative*).

Pemilu yang berlangsung di Indonesia faktor resikonya relatif lebih tinggi. Budaya politik yang belum mapan dan rendahnya pemahaman masyarakat Indonesia terhadap perilaku politik

yang baik tidak jarang menimbulkan gesekan-gesekan antar kontestan dan anggota-anggotanya. Pemerintah sendiri, karena belum terbiasa dalam kehidupan politik yang sehat, kurang mampu menyelenggarakan pesta demokrasi yang menjamin tersalurkannya aspirasi politik masyarakat secara optimal. Untunglah hubungan antar anak bangsa masih dilandasi oleh rasa persaudaraan dalam kerangka budaya Indonesia yang Pancasilais, gesekan-gesekan antar pendukung partai tidak menimbulkan gejolak yang berarti. Meskipun diwarnai oleh berbagai protes dan dugaan kecurangan, proses Pemilu Legislatif yang baru saja berlangsung masih dapat terkendali dengan baik. Namun masa-masa rawan tetap saja akan berlangsung karena dua tahapan Pemilu untuk menentukan presiden dan wakilnya masih akan ada.

Implikasinya terhadap perekonomian tetap akan terasa. Menghadapi Pemilu Presiden nampaknya lebih sensitif terhadap stabilitas ekonomi. Nilai tukar rupiah terhadap dollar mulai melemah. Para spekulan mulai mengambil situasi ini untuk menjaga kinerja bisnisnya dan sekaligus bisa saja memanfaatkannya untuk memperoleh rente yang lebih besar. Bahkan saat ini sudah terjadi spekulasi-spekulasi valas yang menyebabkan lemahnya rupiah.

Bagi Riau, penyelenggaraan Pemilu nampaknya cukup signifikan mempengaruhi kinerja

ekonominya. Apalagi Riau juga baru saja menyelesaikan proses suksesi kepemimpinan sehingga pada tahap awal masih membutuhkan banyak penyesuaian-penyesuaian kebijakan. Namun demikian dari aspek pertumbuhan masih menunjukkan adanya pergerakan positif. Pasar nampaknya memandang proses pemilihan gubernur yang berjalan mulus dan aman memberi peluang bagi terselenggaranya perekonomian secara baik.

Berdasarkan data yang dipublikasikan BPS Riau pertumbuhan ekonomi Riau tanpa Migas Triwulan I Tahun 2004 mencapai 7,76%. Keadaan ini tidak jauh berbeda dengan Triwulan IV Tahun 2003 yang tumbuh sebesar 7,58%. Namun jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2004 sentimen ekonomi awal tahun 2004 jauh lebih baik. Pertumbuhan ekonomi Riau Triwulan I 2003 hanya mencapai 6,67% dan pada Triwulan II justru turun menjadi 5,61%. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor keuangan yang mencapai 14,16%. Pertumbuhan ini didongkrak oleh berkembangnya sub-sektor perbankan yang sangat spektakuler, yakni 118,20%. Seakan-akan pada awal-awal tahun 2004 terjadi transaksi bisnis perbankan yang sangat dinamis. Hanya saja tidak ada data yang dapat memberikan indikasi sumber-sumber penyebabnya. Bila hanya terkait dengan Pemilu tentunya hanya akan bersifat temporer belaka. Sumbangan

sektor ini dalam struktur perekonomian Riau hanya sebesar 4,48%.

Sektor yang dominan menguasai perekonomian Riau adalah pertanian dan industri. Sektor pertanian mampu tumbuh sebesar 5,93% yang lebih banyak ditopang oleh perkembangan sub-sektor perkebunan. Pada Triwulan I Tahun 2004 sub-sektor perkebunan tumbuh sebesar 7,53%. Dibanding dengan triwulan sebelumnya kenaikan pertumbuhan sektor pertanian tidaklah begitu berarti karena pada Triwulan IV tahun 2003 sektor pertanian tumbuh sebesar 5,77%. Sektor industri mengalami lonjakan pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada Triwulan I tahun ini mampu tumbuh sebesar 9,39%. Jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang hanya mencapai 6,14%. Keadaan ini ditopang oleh berkembangnya sektor industri non-migas yang mampu tumbuh sebesar 11,70%.

Salah satu sub-sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan yang cukup besar adalah sub-sektor angkutan udara. Pada Triwulan I sub-sektor ini justru terkoreksi mencapai minus 10,65%. Persaingan bisnis yang makin tajam di dunia penerbangan ternyata membawa pengaruh yang cukup signifikan dalam sub-sektor ini. Secara keseluruhan dari sub-sektor pengangkutan masih mampu tumbuh sebesar 4,53%. Hanya saja jika

dibandingkan dengan keadaan pada Triwulan IV 2003 sub-sektor ini pertumbuhannya jauh lebih rendah. Sub-sektor angkutan udara sendiri pada Triwulan IV 2003 masih tumbuh sebesar 9,33% sedangkan sub-sektor angkutan secara keseluruhan mampu tumbuh sebesar 7,53%.

Meskipun masih menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi namun bila dilihat dari komponen penggunaan perekonomian Riau masih diliputi banyak masalah. Struktur penggunaan perekonomian Riau masih didominasi oleh Konsumsi Rumah Tangga. Pada Triwulan II 2004 persinya mencapai 60,71% yang lebih banyak terkonsentrasi pada konsumsi makanan, yakni mencapai 33,29% atau 54,83% dari total konsumsi rumah tangga. Pertumbuhannya pada periode tersebut hanya mencapai 0,83%.

Konsumsi pemerintah justru terkoreksi mencapai minus 8,44%. Padahal pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 10,29%. Keadaan ini sepertinya dipicu oleh belum adanya kegiatan-kegiatan di pemerintahan pada Triwulan I tahun ini yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Belum adanya kepastian tentang APBD dan adanya transisi legislatif dan eksekutif di Riau serta masih belum finalnya penetapan APBD Riau menyebabkan stimulasinya terhadap ekonomi Riau tidak ada. Justru sebaliknya malah menimbulkan

penurunan. Padahal peran Konsumsi Pemerintah dalam struktur perekonomian Riau dari komponen penggunaan masih tinggi yakni 16,30%. Kondisi ini seharusnya memaksa pemerintah untuk menjaga “irama” kegiatannya sehingga tidak menyebabkan fluktuasi yang tajam. Sinkronisasi dalam siklus ekonomi pemerintah perlu dilakukan agar stabilitas ekonomi masyarakat dapat lebih terjamin dan ketidakpastian makin berkurang.

Hal lain yang juga masih memprihatinkan dalam geliat ekonomi Riau adalah kinerja ekspor yang masih banyak terkoreksi oleh kebutuhan impor. Pada Triwulan I Tahun 2004 pertumbuhan ekspor banyak berubah. Bila pada triwulan sebelumnya mampu tumbuh sebesar 9,55%, maka pada triwulan ini turun mencapai minus 0,11%. Artinya, kinerja ekspor Riau terkoreksi cukup tajam jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Sejalan dengan itu aktivitas impor juga mengalami hal yang sama.

Pada Triwulan IV Tahun 2003 tumbuh sebesar 10,78% dan pada triwulan ini menurun menjadi minus 2,14%. Keadaan ini menggambarkan bahwa kegiatan-kegiatan ekspor Riau masih belum mampu memberi pengaruh yang berarti bagi kinerja perekonomian Riau. Apalagi dari segi impor, Riau sangat sensitif karena perubahan dinamika pasar internasional mampu

beresonansi dengan pasar lokal di Riau. Bila resonansi masuk tersebut tidak dapat ditimpali oleh resonansi keluar maka akan terjadi koreksi dalam pertumbuhan ekonomi. Kinerja ekonomi yang lain akan tersedot untuk kepentingan-kepentingan impor.

Dari gambaran di atas nampaknya ada permulaan yang relatif baik bagi berkembangnya perekonomian Riau untuk tiga triwulan mendatang. Meskipun akan berhadapan dengan tantangan yang cukup besar harapan untuk berkembang relatif baik. Tersusunnya “Kabinet” Pemerintahan Gubernur Riau dan tuntasnya penyusunan APBD akan memberikan sentimen yang positif bagi bergeraknya ekonomi Riau ke depan. Khusus dari aspek pengeluaran pemerintah diharapkan sektor swasta akan terpacu untuk mau berinvestasi sehingga kinerja ekonomi tidak banyak bertopang pada Konsumsi Rumah Tangga. Pekerjaan yang cukup berat yang dihadapi dari aspek ekonomi adalah bagaimana memanfaatkan peluang pasar global untuk memperbaiki kinerja ekspor Riau.

Diversifikasi produk dan ekspansi pasar mutlak harus dilakukan agar ketergantungan dapat dikurangi dan rembesannya pada perbaikan ekonomi rakyat makin membesar. Untuk itu dalam APBD 2004 diharapkan adanya anggaran khusus dalam pengembangan ekspor berbasis masyarakat

disamping memacu tersedianya infrastruktur yang mampu mendorong investasi. Sikap pesimis tidak perlu diambil oleh para pebisnis. “*Ada batang, Cendawan tumbuh*”, begitu istilahnya. Meskipun geliat ekonomi Riau belum begitu cerah, tetapi geliat tersebut masih lebih baik ketimbang wilayah lain. Mengais rezeki di Riau masih memiliki prospek yang lebih baik dari tempat lainnya di Indonesia. ♦

AWAN MENGANDUNG HUJAN

(Prospek Ekonomi Riau Tahun 2004)

Survey ekspektasi konsumen yang dilakukan Bank Indonesia di Kota Pekanbaru untuk Triwulan Kedua Tahun 2004 mengindikasikan adanya penurunan keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian sekarang dan prospeknya enam bulan ke depan. Hasil survey menemukan adanya penurunan dalam Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) saat ini dari 82,67 menjadi 74,83. Ini berarti konsumen semakin pesimis terhadap perekonomian yang ada sekarang, baik itu ditinjau dari apa yang diperoleh masyarakat dari dinamika ekonomi yang terjadi maupun persepsi mereka dalam mengkonsumsi berbagai jenis barang.

Secara gamblang hasil survey menggambarkan melemahnya rasa optimisme konsumen atas penghasilan yang mereka peroleh saat ini yang tercermin dari menurunnya indeks dari 147,5 menjadi 135,0. Sumber penyebabnya adalah persepsi konsumen yang mengatakan penghasilannya

akan meningkat mengalami penurunan dari 57,5% menjadi 46,0%. Ini berarti sebahagian besar masyarakat tidak yakin akan terjadi perbaikan pendapatan mereka untuk enam bulan yang akan datang dengan memperhatikan kondisi ekonomi mereka sekarang ini. "*Bak awan mengandung hujan*", segala sesuatunya masih dalam ketidakpastian. Oleh karenanya konsumen berpersepsi bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membeli barang, terutama barang-barang tahan lama. Konsumen yang menyatakan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli barang tahan lama menurun tajam dari 32,5% menjadi 16,5%. Penyebab dari rasa pesimis ini adalah terbatasnya kondisi keuangan dengan prospek yang lebih suram untuk berkembang dan tinggi/mahalnya harga-harga saat ini.

Harapan konsumen ke depan terhadap perekonomian Riau tetap saja besar. Tekanan ekonomi yang terjadi saat ini menumbuhkan keceemasan sekaligus juga rasa ingin berkembang yang semakin besar. Konsumen ingin segera terlepas dari stagnasi ekonomi yang mereka alami saat ini. Survey Ekspektasi Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan adanya peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) dari 96,33 menjadi 99,0. Keadaan ini muncul dari keyakinan konsumen terhadap akan adanya perbaikan per-

ekonomian Indonesia enam bulan ke depan. Namun demikian konsumen merasa bahwa perbaikan pendapatan mereka tidak akan makin membaik. Sebagian besar (64,0%) konsumen menganggap pendapatannya tidak akan berubah dan bahkan memprediksi akan mengalami penurunan. Apalagi trend harga dipersepsikan masih akan berada pada posisi yang tinggi karena situasi sosial politik dan keamanan yang kurang stabil, kurs rupiah terhadap dolar Amerika yang akan melemah, dan berkurangnya ketersediaan barang dan jasa di pasar.

Harapan konsumen akan adanya perbaikan kondisi keuangan mereka untuk 6-12 bulan ke depan mengalami penurunan. Indeks Ekspektasi Keuangan menciut dari 142,25 pada Triwulan I Tahun 2004 menjadi hanya 127,75 pada Triwulan II ini. Ekspektasi konsumen terhadap penghasilannya memburuk dari 159,0 menjadi 141,0. Dengan sendirinya harapan untuk menabung semakin rendah dan hasrat untuk mengkonsumsi barang juga akan melemah.

Dari survey dapat dideteksi adanya penurunan ekspektasi konsumen untuk membeli barang sandang, perumahan, peralatan dan perabot rumah tangga, kendaraan bermotor, serta pengeluaran untuk rekreasi/tamasya. Konsumen cenderung akan membatasi alokasi pendapatannya untuk

keperluan-keperluan dimaksud untuk menjadi stabilitas ekonomi rumah tangganya terutama dalam menanggulangi kebutuhan-kebutuhan primernya. Bila ini benar-benar terjadi maka gairah ekonomi yang bersumber dari investasi dan konsumsi masyarakat akan menurun. Pemerintah diharapkan dapat mendorong berkembangnya perekonomian daerah dari investasi pembangunan yang dilakukannya. Arah dari program-program pemerintah harus tertuju pada mempercepat bergeraknya sektor riil dan menstimulus investasi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur yang menunjang dan signifikan.

Memburuknya persepsi konsumen terhadap perekonomian di Riau bisa saja dipicu oleh belum berjalannya program-program pemerintah di paroh pertama Tahun 2004 ini. Bahkan sentilan yang sangat tajam dari beberapa anggota DPRD Riau terhadap lemahnya kinerja birokrasi Riau dalam mengimplementasikan program pembangunan makin memperkuat keyakinan masyarakat terhadap belum adanya upaya-upaya kongkrit yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi rakyat. Keasyikan melakukan kegiatan-kegiatan seremonial tanpa mempercepat langkah-langkah nyata memperbaiki keadaan dengan sendirinya akan menyebabkan pemerintah kalah cepat dari dinamika ekonomi yang berkembang. Distorsi

ekonomi akan makin membesar dan kehidupan ekonomi masyarakat dapat semakin memburuk akibat tekanan-tekanan pasar yang tidak seimbang (*un-balance market*).

Di Riau kiranya terdapat beberapa hal yang menyebabkan melemahnya ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian, khususnya dikaitkan dengan faktor-faktor di luar ekonomi. *Pertama*, belum selesainya tahapan Pemilu sehingga perhatian dan energi masih akan banyak tercurah dalam kerangka merebut kekuasaan. Ditimpali pula oleh kurang bekerjanya lembaga legislatif dalam melakukan kontrol karena mereka sendiri baru berada dalam masa-masa transisi. Konon, anggota DPRD yang ada sekarang sebahagian besar sudah tidak masuk kantor, padahal DPRD yang baru belum lagi dilantik.

Kedua, belum adanya *platform* yang jelas terhadap pelaksanaan pembangunan di Riau terutama dikaitkan dengan pemusatan anggaran pada isu pokok kemiskinan dan kebodohan yang didengung-dengungkan selama ini. Walaupun sudah ada, namun sampai dengan paroh pertama tahun 2004 ini sosialisasinya boleh dikatakan tidak ada. Masyarakat dengan sendirinya belum faham terhadap “siapa berperan apa”. Artinya prinsip-prinsip pembangunan partisipatif tidak berjalan dengan baik. Pada akhirnya pemerintah hanya akan

bertindak sebagai orang yang paling benar meskipun masyarakat menilai itu tidak benar. Ini berarti otonomi yang dibesar-besarkan dapat disalah-tafsirkan hanyalah upaya untuk menutup kelemahan dalam mengkristalisasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk dicarikan solusinya dalam program-program pembangunan.

Ketiga, banyak langkah-langkah politik yang dilakukan pemerintah Riau yang menimbulkan bias makna dalam masyarakat. Terutama dalam kasus Provinsi Kepri, baik berkaitan dengan penunjukkan *caretaker* gubernur maupun adanya isu upaya permohonan terhadap penangguhan penahanan Huzrin Hood oleh Gubernur Riau. Kalau itu benar maka proses politik yang dimainkan pemerintah daerah sangat tidak bersentuhan dengan upaya-upaya perbaikan ekonomi masyarakat. Bahkan tindakan tersebut justru dapat memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum yang akan membuat masyarakat makin pesimis terhadap perbaikan ekonominya. Di samping itu juga disinyalir porsi kegiatan seremonial lebih besar ketimbang memastikan berjalannya program pembangunan secara optimal.

Keempat, dari beberapa komentar yang dibaca di media masa aroma KKN dalam penempatan birokrasi pemerintah Riau sangat kental.

Jenjang karir dan pendidikan penjenjangan banyak diabaikan. Termasuk latar belakang pengalaman kerja dan profesionalismenya. Bagaimana mungkin seorang yang berpendidikan teknik dan sepanjang karir birokrasinya hanya dalam bidang-bidang teknik bisa ditempatkan pada jabatan yang harus menangani bidang administrasi pemerintahan. Termasuk orang yang lompat pagar tanpa melalui jabatan eselonisasi sebelumnya bisa loncat ke eselon yang tinggi. Sementara yang lainnya dengan persyaratan yang cukup, pendidikan yang memadai, pengalaman yang panjang di bidang itu dan kinerja yang baik, harus gigit jari dan terpaksa menerima kenyataan dilangkahi pejabat karbitan tersebut. Badan Administrasi Kepegawaian seharusnya mampu menempatkan pejabat birokrasi yang bisa mendukung terselenggaranya implementasi program pembangunan secara efisien dan efektif.

Bila perekonomian rakyat mau dikembangkan dan kemiskinan mau dientaskan dari mereka, maka selain indikator-indikator ekonomi yang harus diperbaiki perlu pula diperhatikan indikator lain di luar ekonomi. Tidak jarang *platform* ekonomi yang tersusun baik justru mentah akibat lemahnya kemampuan birokrasi pelaksana, rendahnya kepastian hukum, terganggunya stabilitas sosial politik, dan adanya intervensi negatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga menim-

bulkan kesan inkonsisten. Selain membutuhkan *Integrated Planning* dan *Holistic Approach*, pembangunan ekonomi yang memadai juga membutuhkan situasi yang kondusif dengan kebijakan yang konsisten dan pasti. ♦

BAGAI MENEPUNG TIADA BERBERAS

(Evaluasi Ekonomi Riau 2004)

Kinerja ekonomi Riau selama tahun 2004 ini tidaklah secerah apa yang diharapkan masyarakat. Upaya-upaya perbaikan ekonomi rakyat yang senantiasa didengungkan dalam pidato-pidato justru belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Setahun berjalan nampaknya rakyat Riau seperti terkesima dengan persoalan-persoalan politik sehingga kurang memantau aspek perbaikan ekonomi masyarakat. Berbagai kegiatan politik yang terjadi di tanah air memang memberikan harapan masa datang yang lebih cerah. Sayangnya, ketika peristiwa politik berlalu tidak jarang harapan-harapan menjadi kelabu.

Ekonomi Riau pada Triwulan IV tahun 2003 masih mampu tumbuh sebesar 7,58% ternyata pada waktu yang sama tahun 2004 hanya mampu tumbuh 6,49%. Sepanjang tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Riau senantiasa mengalami kemerosotan. Jika pada Triwulan I masih mampu

tumbuh sebesar 7,76%, maka pada Triwulan II turun menjadi 6,62%. Meskipun pada Triwulan III sedikit membaik menjadi 6,65%, tetapi pada Triwulan IV anjlok lagi menjadi hanya 6,49%. Ini berarti rata-rata sepanjang tahun 2004 ekonomi Riau hanya mampu tumbuh sebesar 6,88%. Ini berarti juga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2004 jika dibanding tahun 2003 yang pertumbuhan rata-ratanya mencapai 7,65%.

Diamati dari aspek sektoral atau sisi penawaran maka sektor pertanian mengalami kemerosotan pertumbuhan yang cukup tajam. Padahal sektor ini kontribusinya relatif besar pada struktur perekonomian Riau. Awal tahun 2004 sektor pertanian masih mampu tumbuh sebesar 5,93%, tetapi pada akhir tahun 2004 pertumbuhannya hanya sebesar 4,44%. Keadaan ini mengindikasikan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian makin tercekik. Sebahagian besar masyarakat Riau bekerja di sektor pertanian sehingga gambar-gembar pemberantasan kemiskinan yang dikumandangkan selama ini dalam kenyataannya justru bertolak belakang. Masyarakat petani malah makin terhimpit dan makin kurang produktif. Padahal pada satu sisi kebutuhan-kebutuhan pengeluaran mereka makin bertambah sejalan dengan naiknya harga-harga kebutuhan bahan pokok.

Sektor yang berkembang pesat adalah perdagangan, hotel, dan restoran. Pada akhir tahun 2003 sektor ini tumbuh sebesar 6,41% sedangkan pada akhir tahun 2004 tumbuh mencapai 7,59%. Ini berarti geliat ekonomi Riau banyak terjadi di pasar-pasar, hotel-hotel, dan restoran. Tidak banyak masyarakat Riau yang semula menjadi petani beralih profesi menjadi pedagang. Perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor perdagangan, hotel, dan restoran tidak terjadi dari desa-desa yang ada di Riau.

Sumber pengadaan tenaga kerjanya justru masuk dari luar Riau. Pedagang pasar banyak yang datang dari Sumbar, sedangkan hotel dan restoran selain dari Sumbar juga banyak datang dari Jawa. Ini menguatkan dugaan bahwa tekanan marginalisasi masyarakat Riau pada tahun 2004 justru bukannya kurang, malah bertambah berat. Keinginan untuk melakukan konsumsi di sektor perdagangan makin besar sementara *income* di sektor pertanian makin mengecil. Secara psikologis ini akan membawa dampak pada makin besarnya potensi terjadinya kerawanan-kerawanan sosial.

Pendapatan masyarakat petani akan semakin banyak disedot oleh pelaku-pelaku bisnis di sektor perdagangan sedangkan pada satu sisi peningkatan pendapatan makin melambat. Oleh karena itulah mungkin saat ini di berbagai wilayah

pedesaan di Riau tidak jarang didengar terjadinya kejahatan-kejahatan pencurian.

Kenyataan di atas makin terasa bila di-dekati dari sudut permintaan. Konsumsi rumah tangga yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi Riau makin melemah. Di satu sisi ini merupakan gejala membaik jika peran investasi dan ekspor makin membesar. Apalagi bila peran pemerintah sebagai stimulan juga berjalan dengan baik. Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS Riau peran pemerintah ternyata tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Pada akhir tahun 2003 peran pemerintah sebesar 16,37% maka pada akhir tahun 2004 hanya naik menjadi 16,46%. Peran pembentukan modal tetap netto justru menurun dari 28,37% pada akhir tahun 2003 menjadi 27,51%.

Tekanan impor non-migas justru makin membesar dibandingkan perbaikan kinerja ekspor. Komponen ini mengindikasikan bahwa produk-produk ekspor berbasis masyarakat belum digarap secara profesional sejalan dengan terbukanya peluang dalam era pasar bebas. Justru sebaliknya produk-produk lokal makin terdesak oleh produk asing yang makin merambah supermarket dan bahkan sampai ke pasar-pasar tradisional. Mulai dari makanan kaleng, buah-buahan, sampai pada makanan cemilan banyak yang berasal dari Malaysia, Singapura, Thailand, dan China.

Pada akhir tahun 2003 pertumbuhan ekonomi dari sisi ekspor sebesar 9,55% dan tahun 2004 naik menjadi 10,13%. Peranannya dalam perekonomian Riau naik dari 77,95% menjadi 78,91%. Sedangkan komponen impor pertumbuhannya pada akhir tahun 2003 sebesar 10,78% pada tahun 2004 naik menjadi 10,81%. Perannya terhadap perekonomian Riau juga mengalami kenaikan dari 77,95% menjadi 79,89% pada akhir tahun 2004. Ini berarti kinerja ekspor tereliminir oleh kebutuhan impor dalam perekonomian Riau dengan peran minusnya sebesar 0,88%.

Sektor lain yang melemah pertumbuhannya adalah listrik dan air bersih. Pada akhir tahun 2003 pertumbuhannya mencapai 6,62%. Sedangkan pada akhir tahun 2004 anjlok sampai hanya mampu tumbuh 3,96%. Padahal sektor ini sangat vital peranannya dalam memikat investasi. Infrastruktur listrik dan air bersih memberikan peranan penting bagi terselenggaranya investasi swasta dan masyarakat. Jika sektor ini tidak bergairah, padahal kenyataannya kebutuhannya masih sangat besar, maka upaya-upaya untuk memajukan perekonomian masyarakat akan menjadi slogan semata.

Peran pemerintah terhadap perekonomian Riau juga tidak mencengangkan. Kontribusi Konsumsi Pemerintah hanya naik dari 16,37% menjadi 16,46%. Padahal dana trilyunan rupiah masuk ke

Riau. Ini berarti kemampuan pemerintah menggerakkan ekonomi Riau tidak makin membaik. Hal ini memang terindikasi dengan kurang berjalannya proyek-proyek pemerintah di Riau. Pemerintah provinsi saja sampai pertengahan Desember 2004 baru mampu merealisasikan kegiatannya sebesar 63,37%. Inipun belum dapat dipastikan apakah proyek-proyek tersebut bersentuhan dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Indikasi *mark-up* dan KKN dalam pelaksanaannya sangat kentara.

Kecurigaan terhadap ini makin menguat dengan besarnya uang yang dikirim ke luar Riau pada Triwulan III dan IV melalui fasilitas RTGS Bank Indonesia. Pada Triwulan II uang yang masuk ke Riau hanya Rp 11,552 triliun sedangkan uang yang keluar Riau mencapai Rp 20,25 triliun. Berarti *money outflow* dari Riau mencapai sekitar Rp 8,7 triliun. Kondisi ini terjadi ditopang pula oleh banyaknya perusahaan-perusahaan non-Riau yang mencari makan di Riau, tetapi tidak berkantor di sini.

Memasuki tahun 2005 tantangan perekonomian Riau bukan akan semakin mengecil. Mulai merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, baik di pusat maupun daerah, kenaikan harga BBM, dampak lanjutan dari bencana alam, tekanan pasar global yang kian deras, dan faktor-faktor endogen lainnya merupakan tanta-

ngan yang harus dihadapi dalam kerangka memberantas kemiskinan dan kebodohan di Riau. Pendekatan untuk menghadapinya tentu tidak bisa dengan hanya sekedar mengumbar harapan kepada masyarakat. “*Bagai menepung tiada berberas,*” demikian kira-kira istilahnya. Perlu perencanaan dan kontrol yang baik dalam mengimplementasikan program. Itu tidak mungkin dilakukan dengan bersolo karir (*one man show*). Sege nap potensi masyarakat harus digalang dengan cara-cara yang transparan, akuntabel, dan berkesinambungan. Termasuk APBD janganlah hanya memperkaya pejabat dan kroni-kroninya. ♦

BERPISAH BUKANNYA BERCERAI

(Meneroka Ekonomi Riau Pasca Lepasnya Provinsi Kepri)

Terpisahinya Kepulauan Riau dari Provinsi Riau tidak serta-merta menyebabkan entitas ekonomi kedua wilayah tersebut menjadi terbagi dua. Administrasi pemerintahan tidak akan menyebabkan adanya garis batas ekonomi antar wilayah. Apalagi kedua wilayah ini masih dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinamika ekonomi akan berjalan seperti apa adanya, bahkan mungkin akan lebih dinamis. Rentang kendali pemerintahan semakin pendek dan ini membuka peluang bagi percepatan pelayanan pemerintah, khususnya dalam memfasilitasi dan memotivasi pihak swasta menanamkan modalnya untuk mengolah sumber-sumber ekonomi yang tersedia di wilayah itu.

Pembangunan infrastruktur dapat semakin difokuskan pada bidang-bidang yang spesifik menunjang dan memperlancar kegiatan ekonomi. Untuk Riau Kepulauan mungkin diarahkan pada

penyediaan air bersih di berbagai pulau dan pengembangan prasarana pariwisata untuk menopang pemasaran dari objek-objek wisata yang bertebaran di berbagai pulau. Prasarana transportasi laut dibangun untuk menunjang lalu lintas orang dan barang. Termasuk memperbesar akses pemanfaatan sumberdaya laut untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pesisir pantai. Ruang gerak perdagangan harus diperluas agar tidak terpusat hanya di Pulau Batam dan Bintan. Pusat-pusat pengembangan ekonomi baru dapat ditumbuhkan, seperti di Karimun dan Natuna.

Bagi Riau Daratan, walaupun sebahagian besar PAD terkuras oleh Riau Kepulauan dan Nilai Tambah Ekonomi yang disumbangkan wilayah itu tidak lagi menopang pertumbuhan ekonomi, namun bukan berarti pergerakan ekonomi wilayah daratan akan langsung mengkerucut. Dinamika ekonomi akan berjalan sebagaimana biasa dan bahkan mungkin ada faktor-faktor lain yang justru akan memberikan dorongan. Salah satu di antaranya adalah pengembalian dana bagi hasil minyak yang selama ini diterima kabupaten non-penghasil di Kepulauan Riau selanjutnya akan mengalir ke beberapa kabupaten non-penghasil di wilayah daratan. Ini berarti akan ada stimulan baru bagi daratan yang bersumber dari *Government Expenditure* pada daerah-daerah kabupaten non-penghasil

yang membesar. Biasanya sektor-sektor yang akan menggeliat adalah sektor konstruksi, jasa, dan keuangan. Termasuk perdagangan dalam mendukung sektor-sektor tersebut.

Hanya saja Pemerintah Riau Daratan harus jeli memilih sektor-sektor ekonomi yang potensial. Pengembangan ekonomi rakyat mutlak dipercepat mengingat ketertinggalan wilayah daratan dari aspek itu sangat kentara. Usaha yang mungkin ditempuh adalah dengan memanfaatkan *marginal revenue* tadi pada pengembangan industri hilir pertanian untuk menjamin persaingan pasar yang sehat dari komoditas pertanian masyarakat. Sentra-sentra pasar baru harus dikembangkan dan infrastruktur yang akan memperlancar arus barang dari sentra produksi ke sentra pasar harus dibangun secepatnya. Termasuk bagaimana menjamin penyediaan listrik yang memadai bagi kebutuhan konsumsi masyarakat dan industri rakyat. Jalan-jalan poros utama yang menghubungkan Riau Daratan dengan provinsi tetangga diperlancar dan jalan poros utama ke wilayah pesisir seperti Buton, Dumai, dan Kuala Enok.

Ada baiknya juga Riau Daratan mengembangkan wilayah ini sebagai kawasan industri baru untuk melengkapi kawasan industri yang sudah ada sekarang. Pengembangan Riau Bagian Selatan sebagaimana yang telah dirintis sebelumnya se-

baiknya diteruskan dan dikaitkan dengan wilayah-wilayah pesisir lainnya. Jalan poros Kuansing ke Pelalawan dan Buton serta Kuansing ke Inhu dan Kuala Enok perlu digesa untuk meningkatkan gairah ekonomi wilayah-wilayah tersebut. Sedangkan wilayah Kampar ke Sumbar dan Pekanbaru diperluas dan Rokan Hulu, Duri, dan Sumatra Utara dan Sumbar diperlancar untuk membuka akses timbal balik wilayah tersebut.

Di balik semua itu, makin cepatnya dinamika ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat tidak jarang mengubah pola hidup dan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Pada masyarakat yang sedang mengalami transisi, apalagi yang relatif cepat sangat rentan terhadap infiltrasi budaya lain di luar dari apa yang dipegangnya sebelum ini. Keadaan ini diperparah oleh kejelian para pemburu rente untuk menawarkan berbagai bentuk produk dan jasa yang bersifat konsumtif dan bahkan sering bersentuhan dengan aroma-aroma maksiat.

Dunia hiburan malam dan berbagai perangkat permainan yang cenderung berbau judi akan marak bila tidak ada benteng yang kuat untuk menghalanginya. Benteng tersebut tidak saja dari adanya proteksi pemerintah tetapi juga kekuatan integritas budaya masyarakat. Jika tidak cepat terpancing untuk keluar dari nilai-nilai budaya

Melayu maka dinamika ekonomi akan tetap sulit memporak-porandakan nilai-nilai budaya tersebut.

Sayangnya, dekadensi moral dan meluntur-nya penerapan nilai-nilai budaya Melayu dalam tata hidup masyarakat di Riau Daratan, khususnya di kota-kota makin menggejala. Ini berarti menempatkan budaya Melayu dalam Visi Riau 2020 sangatlah relevan. Bahkan walaupun sudah terpisah antara daratan dan lautan makna yang terkandung dalam visi itu masih sesuai untuk dicita-citakan. Sebagai provinsi yang baru Riau Kepulauan sebaiknya menentukan visi baru untuk lebih mengedepankan identitasnya, tetapi apapun bunyinya secara harfiah sebaiknya tidak keluar dari adanya keadaan yang menggambarkan masyarakat Melayu yang sejahtera dari segi ekonomi tanpa kehilangan identitas dan integritas kemelayuannya. Artinya apapun yang dilakukan masyarakat dan pemerintahnya hendaklah merupakan upaya untuk mencapai masyarakat Melayu yang sejahtera lahir bathin dalam lingkungan masyarakat yang agamis.

Bagi Riau Daratan juga tidak tertutup kemungkinan untuk mencoba merekayasa ulang bunyi harfiah dan makna-makna yang terkandung dalam sebuah visi ke depan. Hanya saja jangan sampai terperangkap pada sebuah keinginan “tampil beda” semata. Kalau ingin mengubah haruslah lebih baik dari yang sudah ada sekarang. Jangan

malah menghilangkan yang sudah ada, tetapi tanpa melahirkan sesuatu yang lebih bernas dan bermakna. Mengatakan salah, tetapi nggak mampu menunjukkan yang lebih benar. Terutama sekali meyakinkan orang banyak bahwa itulah yang lebih baik dari apa yang sudah ada sebelum ini. Merupakan tantangan yang menarik tentunya bagi pemerintah Riau yang sekarang untuk mencoba melahirkan gagasan-gagasan bernas ke arah itu. Tetapi sekali lagi jangan sampai hanya menjadikan Riau ini sebagai wadah mendiskusikan cita-cita tanpa waktu yang cukup untuk melakukan sesuatu yang dapat mencapai cita-cita dimaksud. Itu *mah* kata orang disebut dengan *NATO (No Action Talk Only)*, jangan hanya pandai bercuap. Beriak tanda tak dalam, tong kosong selalu nyaring bunyinya.

Berpisahannya Kepulauan Riau sebagai provinsi sendiri bukan berarti tali kekerabatan masyarakatnya akan bercerai dan terputus. Mungkin untuk Riau tidak hanya diperlukan dua provinsi. Bila perlu secara administrasi pemerintahan dapat dipecah menjadi empat provinsi, yakni Provinsi Riau Pesisir, Provinsi Riau Kepulauan, Provinsi Riau Daratan, dan Provinsi Indragiri. Bila masing-masing wilayah dapat dikembangkan sumber-sumber ekonomi yang mampu menopang kemandirian wilayah tersebut maka keberadaan administrasi pemerintahan dengan *span of control* yang

lebih pendek akan lebih efektif. Pemerintah sebagai pelayan publik hanya berfungsi sebagai fasilitator dan pelaksana dari komitmen rakyat. Manajemen pemerintahan diarahkan untuk memperlancar penyelenggaraan urusan-urusan publik. Bukannya untuk menguasai dan mencekik rakyat dengan berbagai kewenangan yang justru diberikan rakyat kepadanya.

Biarkan masyarakat berkembang dengan segala bentuk dinamikanya. Tidak lagi mungkin dalam dunia global dengan segala kecanggihan teknologinya ada *barrier* dari pemerintah maupun penguasa. *Mobil Banking* sudah dapat memutus jarak. Serat optic mempersempit ruang dan satelit memperpanjang pandang. Dalam waktu yang tidak berapa lama lagi bukan hanya suara, gerak-gerik, dan warna yang dapat dipindahkan oleh teknologi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam kurun waktu yang bersamaan, tetapi juga bau atau aroma sesuatu. Begitu cairnya peradaban yang tertuang saat ini dan mampukah Budaya Melayu menjadi penapis agar anak jati Melayu tidak “berseng-gama” dengan layar telepon bimbit (*handphone*)-nya. Quo-vadis Riau? ♦

AIR PASANG, TEPIAN BERALIH

(Memetakan Prospek Ekonomi Riau 2005)

Potret suram ekonomi Riau di tahun 2004 bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Bagi kalangan pebisnis peluang untuk berkembang tetap menjanjikan. Mulai akhir tahun 2003 sampai tahun 2004 proses pergantian pimpinan nasional dan daerah banyak menyita energi. Setelah proses itu berjalan masih pula diperlukan berbagai penyesuaian dengan gaya pemimpin yang baru. Kebijakan-kebijakan baru lahir dan terkadang tidak jarang melupakan aspek kesinambungan dari apa yang dilansir sebelumnya. Di Indonesia setiap kali pergantian pimpinan selalu pula mengadakan perubahan-perubahan. Bak kata pepatah, “*Sekali air pasang, sekali tepian beralih.*”

Untuk menangkap peluang bisnis yang mungkin terbuka, berbagai kebijakan pemerintah secara nasional dan daerah memang harus dipantau secara seksama dan teliti. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat menjadi tantangan dan dapat pula menjadi peluang yang

menguntungkan. Bahkan mungkin akan menjadi penghambat yang permanen. William F. Gluek dan Lawrence R. Jauch dalam bukunya *Strategic Management and Business Policy* mengingatkan bahwa falsafah pemerintah dalam hubungannya dengan perusahaan dapat berubah sewaktu-waktu. Ini merupakan aspek penting yang harus ditelaah para perencana strategi perusahaan.

Hukum dan peraturan serta kebijakan pemerintah lainnya dapat mengubah cara perusahaan beroperasi dari hari ke hari. Baik karena peraturan itu sendiri berkenaan langsung dengan perusahaan maupun karena imbasnya pada aspek lain, tetapi dapat mengganggu atau bahkan memberi peluang yang signifikan terhadap dinamika usaha masa datang. Termasuk kebijakan anggaran pemerintah dalam menstimulus perkembangan perekonomian masyarakat.

Dalam konteks Indonesia saat ini gebrakan yang dilakukan pemerintah SBY-JK pada satu sisi sangat memberi prospek yang cerah bagi perekonomian. Pemberantasan korupsi, bila dijalankan secara sungguh-sungguh, akan memberi kepastian berusaha yang transparan dan akuntabel. Persaingan usaha akan semakin adil bila suap-suap dalam tender proyek pemerintah dapat dikurangi. Ini berarti akan ada margin tambahan bagi para pengusaha. Efek lanjutannya adalah membaiknya

konsumsi sektor swasta dan terbukanya peluang kerja baru di sektor ini. Namun demikian kebijakan menaikkan harga BBM akan menimbulkan dampak yang cukup besar pada kenaikan harga-harga sehingga daya beli masyarakat makin turun. Padahal peran konsumsi masyarakat dalam menopang pertumbuhan ekonomi selama ini sangat besar.

Bila program pengalihan subsidi BBM tidak berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi beban-beban tetap masyarakat maka gangguan terhadap stabilitas ekonomi akan muncul. Apalagi para spekulan minyak yang selama ini sangat menikmati disparitas harga dalam negeri dan luar negeri akan ikut bermain mempengaruhi masyarakat yang terkena dampak jangka pendek dari kenaikan BBM. Termasuk para konglomerat yang selama ini sangat nyaman dengan adanya subsidi BBM.

Di tingkat lokal persoalan ditariknya kembali sebahagian kewenangan pemerintah daerah dalam hal anggaran dan personil akan menimbulkan nuansa baru lagi bagi para kontraktor daerah yang selama ini telah menjamur. Meski pemerintah pusat berteriak akan memberantas KKN, tetapi di lapangan persoalan-persoalan itu tetap menjamur. KKN yang terpusat dapat saja muncul kembali sehingga pengusaha daerah dengan kemampuan manajerial dan dana yang terbatas akan sulit me-

menangkan kompetisi. Namun bagi Riau, mengingat besarnya anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah (APBD), baik propinsi maupun kabupaten peluang-peluang untuk memacu berkembangnya ekonomi masyarakat Riau masih terbuka lebar. Hal ini dapat direalisasikan bila kebijakan anggaran yang dilakukan diarahkan untuk memacu investasi swasta masuk ke Riau. Caranya tentu bukan dengan membengkakkan anggaran untuk pakaian dinas, perawatan kesehatan pegawai, biaya rumah tangga, makan/minum kantor dan lain-lain yang berbau pemborosan. Bayangkan saja untuk pemerintah propinsi semua biaya-biaya tersebut dalam RAPBD diancang sekitar Rp 93 milyar lebih.

Pemanfaatan dana publik untuk kepentingan perbaikan mutu hidup masyarakat sangat urgen diterapkan kalau Riau tidak mau terpuruk di masa datang. Biaya cetak yang mencapai Rp 5 milyar di salah satu instansi memang sangat memprihatinkan. Bila jumlah penduduk Riau Daratan 4,5 juta jiwa dengan harga cetak Rp 100,- per lembar maka setiap orang akan kebagian sebanyak 11 lembar blangko hasil cetakan. Tanpa peduli orang itu baru lahir atau sudah manula.

Tantangan lain ekonomi Riau tahun 2005 adalah giatnya China merambah pasar komoditas dunia. Peluang pasar global akan bersaing dengan produk-produk China daratan yang cenderung

menggunakan praktik *dumping*. Selain itu relokasi perusahaan-perusahaan Malaysia dari industri berbasis sumberdaya alam ke *high-tech and robotic industry* merupakan hal-hal yang perlu diantisipasi sesuai dengan karakter bisnis yang digeluti pengusaha-pengusaha Riau. Kesempatan untuk investasi *downstream* industri dengan basis CPO dan hasil olah karet alam cukup menjanjikan bagi perbaikan ekonomi rakyat Riau. *Backward linkage* industri ini akan memacu perbaikan pendapatan petani. Peluang kerja secara horizontal akan terbuka sejalan dengan kebutuhan-kebutuhan bawaan dari industri hilirnya. Ini mengindikasikan bahwa bila pandai mengelola daerah ini maka upaya-upaya peningkatan pendapatan petani secara spektakuler bukanlah sesuatu yang mustahil.

Sinyal akan diimplementasikannya otonomi desa oleh pemerintah Riau yang disejajarkan pula dengan beberapa kebijakan lainnya seperti pembangunan perkebunan rakyat, sertifikasi lahan, redistribusi asset, dan termasuk mungkin upaya-upaya pemanfaatan lahan tidur merupakan kebijakan yang akan sangat mendorong dinamika ekonomi di tingkat akar rumput. Bila dijalankan secara sungguh-sungguh oleh aparaturnya pelaksana di lapangan maka akan terjadi keseimbangan pergerakan ekonomi antar wilayah. Uang yang berputar di desa akan makin besar dan peluang mas-

varakat miskin untuk memperbaiki sumber-sumber pendapatannya makin terbuka. Melalui perbaikan infrastruktur desa dan dukungan permodalan akan terjadi perluasan usaha masyarakat. Konsumsi dengan sendirinya akan meningkat sehingga sektor perdagangan akan makin berkembang.

Limpahan penduduk dari daerah sekitar juga merupakan tantangan dan peluang tersendiri bagi rakyat Riau untuk berkembang. Bila yang datang adalah para *entrepreneur* maka kesempatan untuk bersaing dan mungkin bermitra akan terbuka lebar. Paling tidak ada usaha-usaha baru yang akan muncul dan sumber-sumber bahan bakunya akan mengolah produk-produk rakyat Riau. Dulu tidak banyak Pecel Lele dan Nasi Uduk yang mangkal di pinggir-pinggir jalan kota, sekarang menjamur bak cendawan tumbuh. Peternak Ayam dan Ikan Lele memiliki pasar yang cukup potensial sejalan dengan banyaknya konsumen yang makan Nasi Uduk dan Pecel Lele. Setiap warung tenda tidak jarang membawa enam orang pekerja. Ini tentunya akan menjadi konsumen baru di Riau. Mal dan Supermaret tetap akan memiliki pengunjung dan pembeli yang memadai. Roda perputarannya akan tetap naik sehingga investasi baru akan muncul dan tenaga kerja akan memiliki peluang untuk bekerja.

Banyak hal-hal yang sangat berpotensi untuk menggerakkan ekonomi Riau tahun 2005.

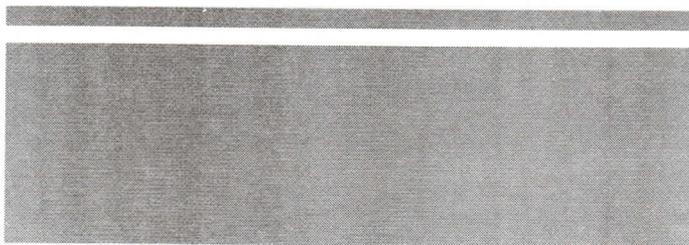
Berkembangnya sektor perdagangan, membaiknya harga komoditas primer masyarakat sejalan dengan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang dilakukan pemerintah. Tumbuhnya industri-industri hilir yang berkait erat dengan masyarakat serta adanya dukungan permodalan untuk industri rumah tangga di pedesaan memungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2005. Pemerintah yang kian stabil, meski masih akan diwarnai oleh maraknya Pilkada, merupakan dukungan positif untuk mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi Riau seperti sebelum terjadinya krisis ekonomi di Indonesia.

Bila kondisi-kondisi tersebut tidak sepenuhnya dapat terjadi asal perbaikan infrastruktur yang mampu memperlancar arus produk masyarakat ke pasar dan pabrik dapat berjalan maka gairah ekonomi Riau Daratan tidak akan tertinggal dari wilayah lainnya. Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,6% bukanlah sesuatu yang sulit untuk dicapai. Apalagi bila ekspor melalui pintu-pintu perdagangan internasional seperti Dumai, Bengkalis, dan Inhil makin dikembangkan secara terpadu dan profesional. Pelaku bisnis di Riau juga dapat bersandar pada makin terbukanya kran kredit perbankan untuk mendinamisir usahanya. Tetapi tentunya bukan dengan hanya berpangku tangan dan mengharapkan “susuan” dari pemerintah

belaka. Diperlukan langkah-langkah yang strategis dan jaringan bisnis yang kuat, serta yang paling utama adalah mengedepankan mutu (*quality*) sebagai kompetensi untuk bersaing. ♦

BAGIAN 2

FENOMENA DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN EKONOMI RIAU



ANGAN LALU PAHAM TERTUMBUK

(Menunggu Bukti Nyata Program K2I di Riau)

Program K2I yang didengungkan oleh pemerintah Provinsi Riau merupakan pemusatan dari berbagai program pembangunan yang selama ini dianggap tidak fokus yang dilaksanakan di Riau. Diharapkan dengan menciutkan hanya pada tiga bidang utama, yakni kemiskinan, kebodohan, dan infrastruktur (K2I), maka sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Riau akan semakin jelas dan terukur. Berbagai kegiatan pembangunan akan lebih fokus diarahkan bagi mengentaskan masyarakat Riau dari kemiskinan dan kebodohan.

Selama ini Riau yang terkenal kaya akan sumberdaya alam ternyata merupakan kantong masyarakat miskin yang di dalamnya terdapat orang-orang, yang tidak saja rendah pendapatannya, tetapi juga sangat minim pendidikannya. Bahkan dalam percaturan kehidupan semakin terpinggirkan akibat kebijakan-kebijakan yang tidak menguntungkan mereka.

Meski sulit untuk dipahami apakah K2I lebih berorientasi pada program atau malah berpijak pada masalah dan mungkin masih jauh dari kinerja, namun keinginan untuk memberantas kemiskinan di Riau merupakan sesuatu yang patut disikapi secara positif. Persoalan kemiskinan bukanlah hal yang sederhana. Di Indonesia kemiskinan tidak hanya berkait dengan faktor struktural tetapi juga melingkup pada faktor kultural. Sudah banyak program dan upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan tetapi hasilnya belumlah memuaskan. Program penanggulangan kemiskinan memang mudah diucapkan dan bahkan secara teori dapat dicarikan jalan keluarnya. Hanya saja ketika tiba untuk melaksanakannya ternyata banyak hambatan yang harus diselesaikan dan tantangan untuk dihadapi. Implementasinya menjadi rumit dan berbelit. Bak kata orang Melayu, “*Angan lalu paham tertumbuk*”, yang mudah secara teori tetapi sukar dilaksanakan.

Kemiskinan sebenarnya di mana-mana ada. Bahkan di California, AS, pada tahun 2002 masih terdapat sebanyak 17% lebih masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut Anwar Ibrahim di Malaysia meskipun jumlah penduduknya 60% adalah pribumi tetapi kekuatan ekonominya tidak sampai 20%. Artinya, ketimpangan ekonomi antar kelompok masyarakat masih sangat

dominan. Kemiskinan di Indonesia malah tidak hanya berakar pada pilihan-pilihan politik yang salah yang dilakukan pemerintah selama ini, tetapi juga hilangnya kemampuan negara menentukan prioritasnya sendiri bagi masyarakatnya. Pembangunan hanya mampu memberikan pelayanan kepada aparatur birokrasi dan kroni-kroninya.

Berbagai pendekatan telah dilakukan untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Bahkan untuk mengatakan orang itu miskin saja banyak cara yang dilakukan. Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP) mendefinisikan garis kemiskinan sebagai orang yang bekerja dengan pendapatan 2 \$US per hari atau, kalau dengan kurs saat ini sekitar Rp 19.000.- Artinya, orang yang pendapatannya kurang dari itu termasuk sebagai kategori masyarakat miskin.

BPS mendefinisikan garis kemiskinan dari besarnya rupiah yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi setara dengan 2100 kalori per kapita per hari. Ditambah kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, perumahan, pendidikan, dan bahan bakar. Sedangkan pendekatan kemampuan dasar melihat kemiskinan sebagai keterbatasan seseorang dan keluarganya untuk menjalankan fungsi minimal dalam lingkungan kemasyarakatan. Keterbatasan kemampuan dasar ini menyebabkan terhambatnya seseorang dan

keluarganya untuk hidup sehat dan berkesempatan terlibat dalam pengambilan keputusan, bahkan untuk menentukan pilihan pribadi.

Kembali ke Program K2I di Riau maka yang perlu dipertanyakan, pertama khususnya dalam upaya pemberantasan kemiskinan adalah dari mana program tersebut bertitik tolak. Setelah itu baru ditelusuri apakah program dan proyek-proyek yang diancang dan diimplementasikan sesuai dengan tempat berpijaknya dan berapa hasil yang akan mampu dicapai sehingga pada tahun-tahun berikutnya bisa berubah tempat berpijak dan berubah pula prioritasnya.

Kalau diamati hasil tahun 2004 ternyata berdasarkan ukuran BPS di Riau terdapat penambahan jumlah masyarakat miskin dan naiknya jumlah pengangguran. Dalam berbagai kesempatan Pemerintah Provinsi Riau memang baru mencaangkan akan adanya Program K2I dan implementasinya baru akan dimulai tahun 2005. Ini berarti untuk tahun 2004 jangankan menikmati hasil yang nyata dari pengentasan kemiskinan, programnya saja belum ada dan baru sedang diancang untuk dilaksanakan. Padahal dari satu sisi dinamika yang terjadi di masyarakat sangat kompleks dan berputar dengan cepat.

Pertanyaan yang mungkin diajukan adalah apakah tahun 2005 ini sudah akan ada program

pengentasan kemiskinan yang benar-benar berakar pada persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Riau? Dari mana Program K2I akan dimulai dan dari pendekatan mana akan berpijak? Jika diamati apa yang diancang Pemerintah Riau dalam RAPBD 2005, maka isu K2I nampaknya hanya sekedar cara untuk mengelompokkan proyek-proyek dalam ketiga kategori itu. Sangat tidak terlihat adanya kesatuan program antar dinas instansi dalam menanggulangi yang namanya kemiskinan. Aspek-aspek yang selama ini menjadi penyakit dalam penyusunan anggaran pemerintah seperti *mark-up*, proyek “jadi-jadian”, dan proyek yang tidak memiliki dasar berfikir logis, masih tetap mewarnai RAPBD 2005.

Orientasi strategi pembangunan yang mengarah pada pemberantasan kemiskinan dan kebodohan di dalam RAPBD saja tidak tercermin secara substansif, koordinatif, dan runtut. Masing-masing dinas masih sibuk dengan ego sektoralnya dan berebut mendapatkan anggaran yang besar meskipun dalam kenyataannya belum tentu dapat dilaksanakan. Pendekatan proyek untuk keuntungan sendiri masih lebih dominan terlihat ketimbang menganggarkan dana untuk upaya-upaya konkrit menanggulangi kemiskinan dan kebodohan.

Di Riau sebenarnya persoalan kemiskinan

tidak jauh berbeda dengan persoalan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Masyarakat miskin pedesaan maupun yang perkotaan memiliki persoalan yang kompleks dan berbeda satu sama lain. Untuk itulah menurut Arne Bigsten dalam sebuah tulisan berjudul *Kemiskinan, Ketimpangan dan Pembangunan*, untuk orang miskin di pedesaan faktor terpenting yang diidentifikasi adalah akses untuk mendapatkan lahan, pengetahuan, dan kredit. Untuk itu, kebijakan harus diarahkan pada pemberian saluran untuk memperoleh hal-hal tersebut secara mudah dan terkendali. Sedang bagi masyarakat miskin di perkotaan strategi membuka peluang kerja dan peningkatan produktivitas serta akses yang lebih mudah pada berbagai fasilitas umum dan memperoleh perumahan yang layak merupakan faktor penting dalam menyusun orientasi program dan strategi pembangunan.

Beberapa hal penting yang tidak boleh lepas dari upaya-upaya pengentasan kemiskinan perlu menjadi dasar penyusunan program dan proyek pembangunan. *Pertama*, kesempatan kerja produktif bagi kaum miskin harus ditumbuhkembangkan secara jelas dan terukur. Untuk itu dana-dana publik harus diarahkan pada program yang mampu menciptakan peluang usaha dan membuka kesempatan kerja. *Kedua*, peningkatan investasi di sektor pertanian tradisional dan indus-

tri hilirnya. Pemerintah harus membuat program yang mampu mengundang investor untuk melabur pada industri hilir produk pertanian dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkesesuaian.

Ketiga, menghapus segala hambatan yang mungkin timbul bagi kelancaran dinamika usaha ekonomi masyarakat. Perda maupun berbagai ketentuan lainnya harus dihapus kalau itu malah mengganggu aktivitas dan perkembangan ekonomi masyarakat. Walaupun pada kenyataannya Perda tersebut melahirkan PAD bagi daerah yang bersangkutan. *Keempat*, mengembangkan fasilitas dan pelayanan yang makin memadai bagi sektor informal yang selama ini sudah amat berjasa dalam menyediakan kebutuhan pokok rakyat. Berpijak pada keempat faktor penting tersebutlah semua program pengentasan kemiskinan harus disusun dan dianggarkan dalam APBD sehingga K2I tidak hanya sekedar menjadi pepesan kosong belaka. ♦

TAK LAPUK DI HUJAN, TAK LEKANG DI PANAS

(Wacana Pembagian Hasil SDA Riau)

Wacana mengenai pembagian hasil sumberdaya alam kembali menghangat. Keinginan pemerintah Riau memperoleh bagi hasil yang lebih besar sebenarnya merupakan tuntutan yang wajar. Hanya saja keinginan tersebut, karena datangnya dari pemerintah, beberapa kalangan merasa terkejut. Perjuangan menuntut bagi hasil SDA sebelum ini memang merupakan milik bersama masyarakat Riau.

Berbagai komponen masyarakat Riau sebelumnya bahu-membahu, dan bahkan sampai berdarah-darah untuk memastikan adanya keseriusan pemerintah pusat meneteskan kembali hasil-hasil alam yang dieksploitasi di daerah. Perjuangan tersebut dapat dikatakan berhasil meskipun belum memuaskan masyarakat daerah. Lahirnya UU No. 22/1999 dan No. 25/1999 memberi peluang kepada daerah untuk berkembang secara otonom dan mendapatkan sebahagian kecil dari hasil SDA yang dikuras di wilayahnya.

Setelah berjalan selama tiga tahun ternyata dari dana yang demikian besar ditemukan adanya penggunaan-penggunaan yang menurut analisa beberapa kalangan sangat tidak bermanfaat dan bahkan sarat dengan KKN.. Oleh karenanya ketika pemerintah Riau mengajukan tuntutan 40% bagi hasil SDA timbul pertanyaan, Apakah ini merupakan perjuangan untuk kepentingan rakyat atau mengorbankan marwah daerah ini dan jati diri anak Melayu untuk memenuhi ambisi-ambisi pribadi dan kelompok serta memuaskan kepentingan sesaat para politisi dan aparatur birokrasi daerah? Apakah tidak lebih baik memfokuskan perhatian untuk menangani persoalan-persoalan krusial yang dihadapi rakyat Riau ketimbang harus berdarah-darah lagi memperjuangkan bagi hasil yang lebih besar?

Ada juga yang menilai ini hanya sekedar wacana untuk mengalihkan isu dan perhatian masyarakat dari ketidakberdayaan memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat Riau saat ini seperti maraknya judi, kelangkaan minyak tanah, mahalnya biaya pendidikan, kelangkaan gula, dan lain-lain. Rakyat bahkan belum melihat apalagi memahami program konkrit pemerintah untuk kepentingan kesejahteraan mereka melalui perencanaan dan implementasi program pembangunan yang transparan, akuntabel, holistik dan berkesinambungan. Pembangunan jangan lagi sekedar pidato

dan bualan kosong belaka.

Sekarang muncul pula adanya gejala memanfaatkan fenomena tuntutan pembesaran bagi hasil SDA untuk kepentingan permainan-permainan politik yang tidak bersentuhan dengan substansi tuntutan itu sendiri. Termasuk kekhawatiran terhadap para petualang yang ingin mencari keuntungan dengan menekan berbagai perusahaan di Riau atas dalih perjuangan pembesaran bagi hasil SDA. Entah harus berapa banyak jalan protokol yang harus ditutup hanya untuk mendirikan posko-posko relawan yang akan bergabung merapatkan barisan menuntut bagi hasil SDA yang lebih besar bagi Riau.

Suasana psikologis masyarakat dalam menuntut bagi hasil SDA dulu dengan sekarang memang jauh berbeda. Pada saat awal reformasi suasana moral masyarakat belum terkontaminasi oleh adanya perilaku-perilaku birokrasi dan legislatif di Riau yang terkesan kurang optimal menggunakan dana tersebut untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat ketika itu bulat suara untuk menuntut pemerintah pusat karena kesamaan tujuan dan kepentingan. Kini, setelah memperoleh bagi hasil SDA selama empat tahun terakhir masyarakat memiliki beragam penafsiran. Tidak ada yang tidak setuju tentunya bila Riau memperoleh bahagian yang lebih besar. Namun,

di balik semua itu yang terpenting akankah uang yang kian besar itu hanya menyuburkan KKN dan memperkaya raja-raja kecil di daerah. Rakyat tetap saja menderita, termarginalkan, dan bahkan kian patah arang melihat perilaku birokrasi dan anggota DPRD yang hanya mengedepankan kepentingan-kepentingan kekuasaan dan kekayaan pribadi mereka.

Mengapa masyarakat Riau harus menuntut bagi hasil yang lebih besar terhadap SDA yang dikuras di wilayahnya? Sebagai wilayah yang berhadapan langsung dengan pusat dinamika global (Singapura, Malaysia, dan Hongkong) rakyat Riau harus memiliki kemampuan untuk hidup berdampingan dan saling mengisi satu sama lain dengan pusat-pusat perubahan tersebut dengan tetap menjaga identitas dan integritasnya sebagai Puak Melayu yang madani.

Dalam kerangka itu mengandalkan kemampuan sumberdaya manusia pada sesi/jangka pendek sangat tidak memungkinkan. Justru upaya-upaya *me-mutu*-kan SDM merupakan salah satu misi penting bagi tercapainya Visi Riau 2020. Satu-satunya jalan adalah menggunakan ketersediaan sumber-sumber alam sebagai basis pemberdayaan SDM. Waktu yang tersedia untuk itu relatif pendek mengingat sisa dan umur ketersediaan SDA itu sendiri sudah makin menipis dan menyempit.

Depresi SDA yang demikian besar yang bersumber dari eksplotasinya di Riau telah menimbulkan pula dampak-dampak lanjutan yang berantai. Kehilangan isi hutan (kayu, rotan, dll), perut bumi (minyak, gas, dan hasil tambang lainnya), dan kemurnian air (pencemaran, dll) telah menimbulkan masalah-masalah lanjutan yang sangat menyengsarakan rakyat Riau. Pengorbanan yang telah diberikan masyarakat Riau untuk kepentingan membuat Indonesia ini masih ada dalam peta dunia tidak cukup sebenarnya diukur hanya dengan sejumlah dana dari bagi hasil SDA.

Pengorbanan itu nilainya jauh melebihi dari apa yang masih mungkin diterima Riau dari pembesaran bagi hasil SDA sampai 100% pun. Oleh karenanya, permintaan untuk mendapatkan bagi hasil SDA yang lebih besar hanyalah untuk memastikan agar upaya-upaya memberdayakan masyarakat Riau memang dapat berjalan secara optimal. Kepedihan dari sadisnya penjarahan yang terjadi selama ini tidak mungkin terobati. Pembesaran bahagian Riau dari SDA yang dikuras di daerahnya hendaknya dipandang sebagai upaya yang dapat menaikkan kepercayaan diri masyarakat Riau bahwa setelah SDA itu habis masih tersedia kemampuan diri (SDM yang berkualitas) untuk berdiri tegak sebagai Anak Jati Melayu yang, *“Takekan lapuk dek bujan dan tak lekang dek panas.”*

Pada sisi lain, fakta yang terjadi di Riau bukan lagi merupakan persoalan kecil. Terdapat sebanyak 35.000 orang lulusan SD yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi setiap tahunnya. Hanya 10% lulusan SLTA yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Membengkaknya pengangguran sebagai imbas dari migrasi penduduk yang berlebihan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2003 hanya 54,87%. Dari jumlah tersebut sebanyak 6,67% merupakan pengangguran murni (*unemployment*). Angkatan kerja yang bekerja hanya 48,20% dimana 73,51% di antaranya sebagai pekerja penuh (*full employment*) sedangkan yang setengah menganggur mencapai 26,49% atau sebesar 12,77% dari total penduduk berumur sepuluh tahun ke atas.

Ditambah dengan jumlah penganggur murni, maka total pengangguran di Riau tahun 2003 mencapai 19,44% dari jumlah penduduk berumur sepuluh tahun ke atas. Beban penduduk ini makin berat jika dimasukkan mereka yang bukan angkatan kerja yang hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga saja yang jumlahnya mencapai 22,06% serta penduduk umur sepuluh tahun ke atas yang masih sekolah (*attending school*) sebesar 20,41%. Ironisnya lagi, ternyata 47,72% pekerja Riau menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Sebanyak 28,92% di antara mereka adalah

berusaha sendiri (*self employed*) dan 10,87% sebagai pekerja tidak dibayar (*unpaid woker*).

Penanganannya membutuhkan sumber dana yang tidak sedikit. Pada tahap awal haruslah ada kontrak moral yang jelas bahwa menuntut bahagian yang lebih besar dari hasil SDA Riau hanyalah untuk penggunaan yang berkaitan dengan perbaikan kualitas SDM. Meskipun tidak akan panen dalam jangka pendek investasi sumberdaya manusia mutlak dilakukan, seperti perbaikan pendidikan, pembimbingan, kesehatan, dan perbaikan ekonomi keluarga. Harus diharamkan penggunaan dana untuk pembangunan kantor-kantor pemerintah, mobil-mobil pejabat, rumah-rumah dinas, segala “tetek-bengek” tunjangan anggota dewan. Apalagi untuk studi banding di dalam negeri dan ke mancanegara. Termasuk proyek-proyek mercusuar dengan segala dalih pbenarannya. ♦

ARANG HABIS, BESI BINASA

(Mengukur Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan di Riau)

Ketika melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Arah Kebijakan Umum (AKU) APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2005 antara DPRD dan Gubernur Riau, kedua petinggi ini melontarkan pernyataan yang sangat menarik. Ketua DPRD Riau mengungkapkan bahwa Program Pembangunan Riau akan difokuskan pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan penyediaan infrastruktur. Adapun standar keberhasilannya akan diukur lewat kondisi yang terjadi di masyarakat. Sedangkan gubernur dalam kesempatan itu juga mengulas bahwa tidak mungkin budaya instan dipergunakan untuk mengukur keberhasilan sebuah pembangunan (*Riau Pos*, 17-8-04). Harus ada proses yang tidak sekedar lansung jadi, seperti sulap. Harus ada perubahan perilaku untuk menjadi masyarakat yang siap mendukung kebijakan pemerintah secara bersama-sama.

Tidak perlu kiranya didiskusikan pernyataan-pernyataan tersebut, apakah masih dalam para-

digma baru pembangunan masyarakat yang seharusnya dilakukan saat ini. Niat baik untuk memiliki standar ukuran yang jelas dalam mengukur keberhasilan pembangunan sudah merupakan langkah besar. Selama ini pertanggungjawaban administratif lebih mengemuka yang dilakukan pemerintah ketimbang hasil-hasil logis yang dapat dinikmati masyarakat. Rakyat tidak akan serta merta mendukung pemerintah bila apa yang dilakukan pemerintah bukan merupakan upaya-upaya konkrit untuk mensejahterakan pemerintah.

Dalam domain *good governance* pemerintah bukanlah orang serba paham dan serba bisa. Perilaku masyarakat yang siap mendukung tidak berpunca dari pihak pemerintah saja. Rakyat selaku pemberi amanah memiliki hak dan kewenangan untuk menentukan sikap yang berbeda jika ia menilai apa yang dikerjakan pemerintah bukan sesuatu yang layak untuk mereka terima. Pemerintah adalah fasilitator pemenuhan kepentingan-kepentingan rakyat yang tidak mungkin dikerjakan secara individu. Pemerintah adalah pelaksana regulasi yang disepakati rakyat agar lalu-lintas *society* dan *private sector* terjamin kelancarannya dan tidak saling mengeliminir satu sama lain.

Dalam pengukuran keberhasilan pembangunan yang dipercayakan rakyat kepada aparaturnya pemerintah dan dalam pengawasan wakil-wakilnya

di DPRD berbagai kriteria dapat saja digunakan asal memang dapat diterima secara umum dan dalam kerangka acuan yang jelas, terukur, dan teruji. Para ahli yang mengupas tentang pembangunan telah banyak menguraikannya. Sumitro Djojohadikusumo dalam buku berjudul *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* menyatakan bahwa pembangunan mengandung arti yang sangat luas. Pembangunan merupakan suatu transformasi dalam arti perubahan struktural. Dalam kaitannya dengan ekonomi maka pembangunan merupakan perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang merupakan perubahan pada perimbangan-perimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi.

Arief Budiman dalam buku berjudul *Teori Pembangunan Dunia Ketiga* mensitir perbedaan arti pembangunan di Indonesia. Sebahagian menyatakan bahwa pembangunan sebagai usaha memajukan kehidupan masyarakat danarganya. Namun bagi sebahagian orang pembangunan yang dilaksanakan pemerintah adalah malapetaka yang mendamparkan hidup rakyat. Akibat adanya pembangunan rakyat harus tergusur, tertindas, dan dimarginalkan. Untuk sebuah pembangunan mereka harus kehilangan kesempatan untuk menikmati berkah alam semesta. Pembangunan akhirnya

didefinisikan sebagai penggusuran, pengungsian, dan pemaksaan kehendak pemerintah.

Untuk memaknai pembangunan secara benar maka pendekatan penting yang dilakukan adalah mengukur keberhasilan pembangunan secara komprehensif. Arief Budiman memaparkan lima hal yang harus dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Secara teknis diukur dengan GNP dan GDP. *Kedua*, pemerataan yang menunjukkan tidak adanya perbedaan yang mencolok keadaan seseorang dengan orang lain, wilayah satu dengan wilayah lainnya. *Ketiga*, kualitas kehidupan yang diukur melalui usia harapan hidup, kematian bayi, dan melek huruf dan pencerdasan masyarakat. *Keempat*, berkaitan dengan kerusakan lingkungan dimana pembangunan diwajibkan untuk memelihara kelestarian alam sekitar. *Kelima*, keadilan sosial yang meliputi tidak saja secara statis tetapi juga hubungan antar masyarakat secara dinamis.

Lantas dengan melihat fakta-fakta yang terjadi sekarang dikaitkan dengan berbagai tolok ukur tersebut sudah berhasilkah pembangunan kita? Jawabannya sangatlah beragam. Namun, bila mengamati antrian panjang ibu-ibu untuk memperoleh minyak tanah tidaklah sulit kita mengatakan bahwa ketimpangan ekonomi yang terjadi masih sangat tinggi dan pembangunan aspek

pemerataan dengan sendirinya gagal dilaksanakan. Ditambah lagi dengan masih besarnya jumlah masyarakat yang makan nasi campur ubi kayu, bahkan Balita KEP masih saja menggelantung di dada ibu-ibu bergizi buruk. Dalam bidang pendidikan ternyata data yang diungkap oleh Kepala Dinas Pendidikan Riau tidaklah dapat mencerminkan sebuah keberhasilan pembangunan. Sekolah saat ini bagi sebahagian masyarakat merupakan sesuatu yang sangat mahal. Jarang akan kita dengar seorang anak tukang sapu jalan mampu menamatkan perguruan tinggi karena untuk masuk ke perguruan tinggi memerlukan biaya yang tidak kecil.

Pendidikan yang diselenggarakan swasta hanya membantu menyediakan lembaga pendidikan alternatif. Mutu pendidikan masih sangat tertinggal kecuali pada sekolah-sekolah yang ber-tarif tinggi. Sekolah negeri banyak yang dikelola asal jadi. Biayanya pun tidak tergolong murah. Banyak cara yang dilakukan sekolah untuk meng-grogoti kantong wali murid. Komite Sekolah yang dibentuk bukannya meringankan beban, malah mereka lebih berfungsi melegitimasi pengelola sekolah membebani biaya macam-macam kepada muridnya.

Di sisi lain ternyata sampai saat ini masyarakat belum mampu menikmati air bersih secara baik dan merata. Listrik hidup-hidup mati dan

bahkan sudah cenderung mengakibatkan kerusakan kepada berbagai peralatan rumah tangga masyarakat. Di tengah-tengah kegelapan malam itu maling pun makin menjamur. Keamanan masyarakat sangat terusik. Di siang bolong pun rampok merajalela. Kualitas kejahatannya makin tinggi dan senjata yang digunakan juga makin canggih.

Nyata sekali perbedaan antara si kaya dan si miskin. Tidak sedikit seminar dan *statement* yang dilontarkan pada si miskin, tetapi kehidupan rakyat jelata belum juga mampu dientaskan dari kemiskinan itu. Mereka dikejar-kejar oleh aparat karena “korupsi” menggunakan badan jalan untuk berjualan. Padahal aparat yang memporak-poranda gerobak itu adalah mereka-mereka yang mengkorupsi pembangunan jalan. Lingkungan rusak berat sementara perusaknya justru mendapat fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Rakyat yang sudah sengsara menampik dampak kerusakan lingkungan malah disalah-salahkan. Kesinambungan pembangunan bukannya difikirkan tetapi malah dirusak oleh keinginan-keinginan jangka pendek. Dana reboisasi malah dikorupsi dengan dalih yang tidak dapat diterima akal sehat.

Sementara itu, ditinjau dari aspek pemerintahan yang bersih dan berwibawa makin terungkap bahwa justru pembersih malah yang berbuat tidak bersih. Terkait dana Parpol 22

pejabat di Kampar diperiksa. Anggota DPRD di berbagai kabupaten mulai terungkap permainan-permainan curangnya dalam menyusun dan menggunakan uang rakyat. Kepercayaan yang diberikan rakyat justru dibalas dengan penipuan-penipuan terhadap rakyat. Apakah itu dengan nama dana purna bakti, tunjangan baju, tunjangan kesehatan, dan setumpuk pembenaran lainnya. Ironisnya lagi, ternyata 30 wajib pajak Riau terancam disandera karena lalai melunasi kewajibannya. “*Arang habis besi binasa*” merupakan perumpamaan yang mungkin sangat relevan untuk menggambarkan keadaan tersebut. Sekarang tinggal memilih, akan dibiarkankah keadaan tersebut terus berlangsung atau memang kita harus berubah bersama?!◆

JAUH PANGGANG DARI API

(Memanfaatkan Momentum Reformasi untuk Riau Baru)

Pembangunan daerah di Riau pada mulanya menjadi harapan yang menggunung dari segenap masyarakat. Setelah sekian lama tidak mampu mendudukkan putra daerah menjadi orang nomor satu di Tanah Melayu, akhirnya Saleh Djasit duduk sebagai Gubernur Riau menggantikan Soeripto. Ketika itu semua orang menggantang harap akan kembalinya kejayaan Puak Melayu. Inilah sebuah momentum yang sangat berharga dan menjadi salah satu tonggak bagi bergemanya kembali marwah anak jati Riau. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk menghela sejumlah masyarakat Riau keluar dari kungkungan kemelaratan yang membelenggunya.

Beriring dengan itu reformasi pun menggetakan di Indonesia. Soeharto, setelah bercokol demikian lama di Indonesia, berhasil dilengserkan. Meskipun antek-anteknya masih bermain dan rezimnya tak mungkin dikikis secara tuntas dalam waktu singkat namun suasana telah mulai berubah.

Pemerintahan yang semula sangat represif mulai menunjukkan adanya perkembangan pernik-pernik demokrasi. Ini merupakan momentum yang sangat berharga bagi Riau.

Di bawah rezim represif yang dikomandoi Soeharto dan anak-anaknya Riau selalu dijadikan ajang perburuan. Betapa banyak sumber-sumber Riau yang dihisap hanya untuk kepentingan kroni-kroni mereka. Rakyat Riau bukan saja tidak menikmati dari apa yang dieksploitasi di sekitar mereka, bahkan dampak negatif dari eksploitasi itulah yang mereka rasakan. Bak kata pepatah "*Orang yang makan nangka anak jati Melayu Riau yang bergelimang getahnya*". Setelah rezim tersebut mulai lunglai dan wacana baru menguak, maka terbuka pula satu pintu bagi Riau untuk merebut kembali hak-hak mereka. Meskipun tidak terlalu besar celah yang terbuka, namun gerbang ini sebenarnya lebih dari cukup bagi Riau untuk keluar dari ruang gelap yang selama ini meliputinya. Ada laluan yang seharusnya mampu dijadikan liang menjulurkan badang untuk bernapas dan lega di ruang yang lapang.

Kejatuhan Soeharto diikuti pula oleh pergantian kepemimpinan nasional yang berjalan cepat. Habibie hanya mampu bertahan sementara, lalu Gus Dur pun terdepak dalam waktu yang singkat. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Megawati yang juga masih belum tentu bisa lama bertahan.

Namun sederas apapun pergulatan politik di tingkat nasional ada buah manis yang dapat dipetik daerah. Desakan untuk melepas belenggu sistem pemerintahan yang sentralistik ternyata sangat kuat dan pada akhirnya membuahkan hasil. Diundangkannya UU No. 22/1999 dan No.25/1999 merubah mekanisme pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Era ini lazim disebut sebagai era Otonomi Daerah. Riau yang selama ini tidak memperoleh bagian dari sumber-sumber alamnya dalam era otonomi ini mendapat bagian yang dapat dikatakan relatif memadai. Meskipun di sana-sini pemerintah pusat masih saja mencekoki bagian yang seharusnya diterima Riau, namun berkah otonomi cukup lumayan untuk dijadikan bekal berlari mengejar ketertinggalan sehingga masyarakat tidak lagi tertindas oleh pergerakan zaman.

Tiga momentum di atas yang bergelora dalam skala nasional merupakan peluang yang amat berharga dan dapat dipastikan memberikan manfaat yang besar bila pandai menggunakannya. Di luar itu, dalam skala regional, baik ASEAN maupun ASIA-PASIFIK pergerakan ke arah perbaikan ekonomi dan politik menjadi penstimulus berjalannya ekonomi Riau secara riil. Singapura dan daratan Asia Timur mulai menggeliat dan berimbas pada terbukanya peluang ekonomi wilayah lainnya.

Pada dasarnya era sekarang adalah era yang dapat dijadikan tonggak awal bagi kebangkitan Riau ke depan. Kinilah saatnya menyusun anca- ngan dan memadukan langkah untuk menegakkan “bendera” marwah, walaupun tak ingin dikatakan sebagai “Bendera Riau Merdeka”. Keluar dari jerat kemiskinan dan keterhimpitan bukanlah pekerjaan gampang. Tidak semudah membalik telapak tangan. Harus disusun cara yang bernas untuk sampai kepada tujuan yang disepakati bersama. Pada tahap itu sebenarnya sangat diperlukan kehati-hatian dan kearifan dalam mengumpulkan semua kekuatan dan menggunakannya pada bidang yang tepat. Hal ini penting bila tidak ingin peluang itu terbang tak berbekas. Sudahkah Riau memulai pembenahan tentang itu?

Pada taraf perencanaan nampaknya Riau berangsur menapak. Rakyat melalui DPRD dengan usulan pemerintah telah mampu mensepakati kemana bahtera hendak dibawa. Visi Riau 2020 bergema ke seluruh pelosok kampung. Ada misi dan strategi yang menggiringnya. Berkah otonomi dilansir untuk memberdayakan masyarakat lapis bawah yang dikategorikan rakyat miskin. Jumlahnya di Riau tidak tanggung-tanggung. Sampai tahun 2002 masih mencapai 42,7%. Berbagai prog- ram ditaja untuk itu. Setiap kabupaten berbenah untuk mencari sesuatu yang terbaik bagi daerahnya.

Itulah impian dan harapan semula. Tapi, apakah yang terjadi di lapangan sesuai dengan mimpi itu?

Beberapa pernik yang terkuak nampaknya seperti, “*Jauh panggang dari api.*” Momentum dan harapan tidaklah dimanfaatkan sebagai tonggak mencapai keberhasilan. Para wakil rakyat yang mengemban amanat reformasi lebih disibukkan untuk memperbesar gaji dan tunjangannya. Lebih parah lagi mereka malah sibuk terlibat dengan berbagai kegiatan proyek pemerintah yang pada dasarnya adalah merupakan apa yang seharusnya mereka basmi. Di tingkat kabupaten hal ini malah dilakukan dengan cara-cara yang sudah sangat kasar. Pada akhirnya yang muncul adalah kongkalikong antara eksekutif dan legislatif yang satu di antara mereka saling mengintai.

Pada tingkat masyarakat puak-puak menjadi bagian yang terpisahkan dan satu sama lain tak hendak dirangkai menjadi kekuatan yang lebih besar. Kepri tak lagi mau ditautkan dengan daratan. Sementara itu di wilayah pesisir dikumandangkan pula keinginan untuk bercerai dengan usul membentuk Provinsi Riau Pesisir. Meski tak lari dari kata Riau, tetapi keinginan untuk bersama dalam lingkup Riau itu sendiri nampaknya terburai dan terungki oleh sesuatu yang masih kabur keberadaannya. Ini tentunya bukan momentum yang sesungguhnya yang dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan anak jati Melayu.

Banyak budak Melayu saat ini yang mulai sensitif terhadap perbedaan, tetapi tidak pula konsisten terhadap kebersamaan. Sebaliknya banyak pula yang mengumandangkan kebersamaan, tetapi lebih banyak berbuat untuk mengentalkan perbedaan hingga tak ada tuas untuk saling berkait. Sangat malu bila dinyatakan bahwa masyarakat Melayu seperti memanjat Pohon Pinang. Tapi, tidak pula dapat dipungkiri bahwa memang masyarakat Melayu tidaklah seperti Rumpun Bambu yang tegak saling menunjang.

Ada apa dengan Riau? Inilah pertanyaan yang kiranya perlu direnungkan bersama. Mumpung film *Ada Apa dengan Cinta (A2DC)* lagi laris di pasaran maka pertanyaan yang sama tentunya patut diajukan pada segenap lapisan budak Melayu Riau. Ini penting untuk mengungkitkan kembali kesadaran bersama bahwa sesungguhnya kita perlu memanfaatkan berbagai momentum di atas. Peluang tidak mungkin datang dua kali dan kesalahan menggunakan kekuatan untuk menangkap peluang itu hanyalah kesia-siaan belaka. Apalagi bukannya menyusun kekuatan untuk menangkapnya. Memasuki era yang lebih sulit dua tahun mendatang perlu kiranya segenap anak jati Melayu menanamkan tekad untuk berani mengakui kekurangan dan dengan penuh kesadaran merangkai kebersamaan.

Jangan sampai *orang buta dua kali kehilangan tongkat, dan tak mungkin dua kali pisang berbuah*. Ke depan adalah era kita dan jangan campakkan itu hanya oleh kepentingan dan kenikmatan sesaat. Itu namanya sama dengan Narkoba...!!!◆

BAGAI MEMPERLEBAR KANDANG MUSANG

(Fenomena Pendirian Berbagai Perusahaan di Riau)

Sejak beberapa waktu yang lalu, Pemprov Riau sudah mengumandangkan mendirikan beberapa perusahaan yang akan menjadi penopang berkembangnya perekonomian di wilayah ini dalam era otonomi daerah. Di bidang transportasi, dikembangkan wacana untuk mendirikan *Riau Airline*. Dalam upaya memupuk modal dalam bentuk investasi asing, digagas pula rencana mendirikan *Riau Investment Corporation*. Khusus untuk membekap permodalan bagi ekonomi rakyat, diancang pendirian perusahaan *Permodalan Ekonomi Rakyat*. Sementara untuk mengantisipasi berakhirnya pengelolaan Blok CPP, maka didorong pula lahirnya *Riau Oil Company*.

Dalam perspektif manajemen pemerintahan, seolah-olah Pemprov Riau ingin melakukan *Reinventing Government*. Sehingga, berbagai upaya pelayanan masyarakat mulai diserahkan pada pihak ketiga (swasta). Instansi dinas atau badan yang ada di lingkungan pemerintahan dikurangi perannya.

Hal ini dilakukan karena instansi/dinas selama ini cenderung hanya bersifat *cost center*, boros, berindikasi KKN dan lebih dekat istilah “proyek” ketimbang pelayanan masyarakat yang optimal dan efisien.

Mewiraswastakan birokrasi memang merupakan langkah penting dalam menghadapi peracaturan global mendatang. Sebab, tuntutan kualitas dalam dinamika masyarakat yang kian cepat dan tanpa batas (*borderless*) meningkat deras. Nampaknya Gubernur Riau tidak sabar lagi dengan kinerja aparat birokrasinya.

Gagasan pemberdayaan ekonomi rakyat yang dikumandangkannya sejak mulai dilantik sampai saat ini belum mampu ditindaklanjuti pada tingkat implementasi program secara memuaskan. Termasuk pemberian modal dengan dana murah melalui alokasi APBD 2001 sebesar Rp 77 miliar sampai akhir November 2001, yang belum menunjukkan sebuah kemajuan program yang memang dapat diandalkan untuk mengangkat kesejahteraan rakyat. Untuk itulah mungkin diperlukan adanya pengalihan ke pihak ketiga (swasta) agar program pemberdayaan ekonomi rakyat ditangani secara profesional dengan mendirikan Perusahaan *Permodalan Ekonomi Rakyat*.

Pada bidang strategis lainnya seperti penerbangan tentunya sulit untuk dipercayakan penge-

lolaannya secara langsung pada dinas perhubungan. Pengelolaan migas memang tidak mungkin diserahkan pada Dinas Pertambangan, karena aturan utamanya memang menghendaki adanya perusahaan swasta sebagai pengelola. Sedangkan dalam memupuk modal asing bagi pengelolaan sumberdaya strategis di Riau tidak mungkin berharap dari kemampuan Badan Promosi dan Investasi (BPI).

Sebab instansi ini (BPI), sebelumnya malah tidak memfungsikan diri sebagai lembaga yang mengakomodir datangnya investasi. Akan tetapi, malah lebih dominan sebagai alat kontrol dalam melakukan investasi. Bahkan, terkesan sebagai salah satu faktor penghambat penanaman modal dalam negeri dan asing karena perilaku birokratis yang mereka mainkan. Ini berarti, pendirian perusahaan *Riau Investment Corporation* menjadi urgen adanya.

Kekhawatiran akan berkurangnya fungsi dinas/instansi dari proses swastanisasi berbagai bidang kerja mereka tidak perlu dicemaskan. Dalam perspektif otonomi daerah, peran dan wewenang dinas/instansi di tingkat provinsi memang sudah jauh berkurang. Otonomi daerah menitikberatkan pelimpahan wewenang pada tingkat kabupaten/kota. Oleh karena itu, fungsi dinas/instansi tingkat provinsi hanya akan lebih banyak sebagai koordinator dan mediator.

Hal-hal yang bersifat pelayanan masyarakat dan pengelolaan sumber-sumber ekonomi, sebaiknya memang diserahkan pada pihak swasta. Sehingga gubernur dalam perannya sebagai kepala pemerintahan dan kepala daerah dapat lebih lincah dan tidak “digandoli” oleh aparat birokrasi yang besar, namun lembek dan tidak efisien. Banyak bidang yang sebenarnya dapat dialihkan pada pihak swasta seperti pengelolaan perdagangan, perkebunan, pertanian, dan perlengkapan-perengkapan rumah tangga. Selama ini, fungsi dinas/instansi juga hanya sebagai pemegang proyek, sedangkan pelaksanaannya sudah diserahkan pada pihak swasta. Padahal seharusnya mereka cukup sebagai pengawas yang didasarkan pada standardisasi yang jelas dan disepakati bersama. Dengan demikian kebocoran anggaran dapat dikurangi.

Bagaimanapun baiknya gagasan itu, pihak DPRD selaku representasi rakyat juga harus wanti-wanti dalam menyikapinya. Jangan sampai pendirian berbagai perusahaan ini malah seperti istilah, “*Memperbesar kandang musang dan mempersempit kandang ayam.*” Tidak jarang berbagai perusahaan yang didirikan pemerintah hanya digunakan untuk pengalihan anggaran dan hasilnya malah membebani APBD. Di Riau, mungkin hanya BPD Riau saja yang sudah memberikan kontribusi kepada APBD. Perusahaan daerah lain sepertinya hanya

“menyusu” saja pada pemerintah daerah.

Banyak hal yang harus dicermati DPRD dalam memberikan persetujuan pendirian berbagai perusahaan dimaksud. *Pertama*, bentuk badan usahanya kalau berbentuk Perusahaan Daerah (PD) rasanya akan percuma, sebab kerjasama dengan pihak asing tidak mungkin dilakukan. Hal ini mengingat bentuk badan usaha tersebut tidak dikenal dalam hukum dagang internasional. Contoh konkritnya, BPD Riau yang selama ini tidak bisa menjadi Bank Devisa karena bentuk badan usahanya masih Perusahaan Daerah (PD). Sedangkan untuk membentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT) masih terkendala akibat belum adanya Perda yang mengatur tentang itu, yang diselaraskan dengan UU No 1/1995 tentang PT.

Kedua, fungsi perusahaan dalam konstelasi perbaikan kinerja birokrasi harus ditata sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran, khususnya dalam pengawasan dan pembinaan. Dalam memperjuangkan marwah Riau saja, pengaruh ini sudah dominan, apalagi nanti kalau sudah ada “kue”nya. Harus ada aturan yang jelas tentang siapa dan apa tanggung jawab masing-masing dalam perkembangan pengelolaan perusahaan. Termasuk menentukan pemegang sahamnya, karena akan terkait dengan lintas kabupaten.

Ketiga, pertanggungjawaban anggaran. Mo-

dal dasar perusahaan tersebut akan menggunakan dana publik (APBD). Harus jelas bagaimana mekanismenya dan sistem pertanggungjawabannya. Termasuk hasil dari perusahaan tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat, baik positif maupun upaya mengantisipasi dampak negatifnya.

DPRD tidak bisa bersantai ria menghadapi persoalan ini. Mereka segera harus membuat Perda yang memungkinkan daerah punya perusahaan dalam bentuk PT, namun dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Jangan sampai niat baik mendirikan perusahaan-perusahaan tersebut hanya menyediakan kesempatan pada pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab “menjarah” Riau, tanpa memberikan perlindungan dan perbaikan hidup bagi 43,6% masyarakat Riau yang masih miskin dan berada dalam kesulitan.

Perlu pula diingat bahwa krisis global kedua diperkirakan akan melanda dunia pada paruh pertama tahun 2002. Indonesia diperkirakan akan mengalami dampak yang cukup parah, dan Riau tentunya tidak akan terlepas dari itu. Sepantasnyalah diambil kebijakan, yang memang strategis untuk mampu melindungi masyarakat dari hem-pasan krisis. ♦

MENYUAP MAKANAN ENGGANG PADA BURUNG PIPIT

(Evaluasi Kinerja BUMD Riau)

Masyarakat Riau tampaknya belum dapat bernapas lega dari apa yang dijanjikan Gus Dur soal Blok CPP. Meskipun ada garansi dari presiden untuk mendapatkan modal, termasuk mengemis keluar negeri. Pengelolaan Blok CPP oleh BUMD menjadi tantangan yang cukup sulit untuk dijawab. Pada satu sisi, tantangan itu dapat menjadi sebuah perangkap yang akan menyudutkan posisi tawar-menawar (*bargaining position*) daerah. Namun di sisi lain, daerah dapat menjadikan ini sebagai *starting point* untuk menguasai sumber-sumber ekonomi daerah secara lebih *fair*.

Untuk mendapatkan rezeki minyak pada Blok CPP, pemerintah daerah harus memiliki sebuah BUMD yang profesional di bidang usaha Migas. Ini tentunya bukan pekerjaan yang gampang bagi Pemda Riau. BUMD yang ada sekarang saja kontribusinya bagi daerah boleh dikatakan sangat minim. Bila dibanding dana yang dikeluarkan untuk membinanya, hasil yang diperoleh BUMD Riau,

sangat tidak memadai. Kontribusi beberapa BUMD Riau terhadap PAD hanya sekitar 1,4%, dan itupun 99% berasal dari BPD. Mencengangkan sekali, bila sebuah pompa bensin yang dikelola BUMD hanya mampu menyumbangkan Rp 24 juta secara tetap setiap tahunnya. Pengalaman buruk kinerja BUMD selama ini akan menciutkan semangat dan optimisme masyarakat mendapatkan Blok CPP.

Gus Dur sepertinya sangat paham dengan kondisi tersebut. Jangankan BUMD, pada tataran nasional BUMN yang telah diberi lisensi monopoli, bahkan tidak mampu menunjukkan profesionalismenya. Jadi, secara tidak langsung, Gus Dur bagaikan "*Menyuapkan makanan Enggang pada seekor Burung Pipit.*" Jangankan tertelan, terkunyah saja mungkin tidak. Sulit bagi Riau untuk melahirkan sebuah BUMD yang profesional. Ketersediaan SDM dapat saja diatasi dengan membentuk konsorsium, tetapi nampaknya kondisi politik belum menunjang untuk itu.

DPRD sebagai representasi masyarakat Riau, seharusnya mencermati itu pada tataran perundang-undangan dan standar operasional yang dibutuhkan untuk pengawasan. Sedangkan aparat birokrasi Pemda selayaknya melakukan konsolidasi kekuatan searah dengan kebutuhan dan bidang bisnis yang dikelola. Bila kedua lembaga ini dapat men-

sinergikan langkahnya, diharapkan lahirnya sebuah institusi bisnis yang profesional yang dimiliki daerah Riau. Bila sebaliknya, maka tidak akan pernah ada kesempatan bagi daerah untuk menguasai sektor-sektor bisnis strategis yang ada di Riau.

Ke depan, tentunya kondisi semacam itu tidak dapat lagi diabaikan. Ini mengingat begitu banyak SDA strategis yang dimiliki Riau. Sejalan dengan perkembangan demokratisasi dan giliran reformasi, Riau harus mempersiapkan BUMD yang profesional. Setiap kabupaten seyogyanya tanggap. Secara dini harus didata sumber-sumber yang dapat dikelola melalui BUMD, termasuk SDA yang selama ini dikelola asing, agar diantisipasi kapan kontrak kerjanya habis. Selanjutnya, dapat digantikan oleh BUMD yang telah dibentuk secara profesional.

Pemupukan modal harus melibatkan rakyat dengan menjual saham pada rakyat sampai di pedesaan. Permodalan kolektif seperti ini akan mampu membentuk akuntabilitas usaha yang lebih transparan. Pemda harus mampu memangkas BUMD yang selama ini biasanya cuma “netek”. Kemudian, memilih yang terkait dengan penyediaan kebutuhan pokok rakyat untuk tetap dibina sebagai alat pemerataan. Selanjutnya, baru membentuk BUMD baru pada sektor-sektor bisnis strategis. Reformasi seperti ini sangat mutlak

dilakukan untuk menopang PAD.

Limpahan dana dari pusat, sejalan dengan desantralisasi fiskal, harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan daerah memperoleh pendapatan dari sektor produktif dan terbaharui. Menjadi aneh sekali bila di suatu daerah yang bertaburan danau-danau kecil tidak dapat dikonsolidasi terbentuknya BUMD yang berbasis masyarakat yang mampu, mengelola usaha perikanan darat sampai menghasilkan produk-produk lanjutannya seperti pakan ternak, pengalengan ikan, dan ekspor komoditi perikanan lainnya.

Di Kabupaten Rokan Hulu pernah diinformasikan terbuangnya 800 ton jagung petani transmigran yang tidak bisa dijual akibat rendahnya harga jual. Kondisi ini tentunya sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Bila ada institusi yang secara profesional memanfaatkan sumber-sumber seperti itu, masyarakat dengan sendirinya akan sangat tertolong. Jagung tersebut dapat diolah di wilayah tempatan menjadi produk-produk yang kompetitif.

Untuk membuat sebuah BUMD yang profesional, Pemda harus memulainya dengan mengesampingkan arogansi birokrasi yang selama ini telah terbukti sangat merugikan semua pihak. Investigasi profesional pada bidang usaha yang akan dikelola harus secara dini dilakukan. Kemudian secara

otonom mereka diberi peluang untuk menciptakan unit usaha strategis pada bidang tersebut. Agar tidak kebablasan DPRD dan Pemda harus membuat rambu-rambu yang hanya digunakan untuk *monitoring* dan menjamin akuntabilitas BUMD tersebut bagi kepentingan pembangunan daerah. Oleh karena itu, meskipun pendekatannya lebih bersifat swastanisasi, itu harus diartikan sebagai usaha untuk menciptakan BUMD yang kompetitif.

Selanjutnya, BUMD harus dibangun dalam sistem yang transparan, sehingga informasi tentang kinerjanya dapat dipantau masyarakat, termasuk penggunaan hasil keberhasilannya. Pengelolaan teknis dan organisasional, dapat saja dilakukan dengan pendekatan manajemen modern kemitraan atau bahkan *joint operations*. Tetapi, sepanjang tenaga dan *skill* dari daerah memungkinkan, haruslah digunakan secara optimal.

Usaha patungan diperlukan benar-benar hanya untuk kepentingan transfer teknologi dan ilmu pengetahuan. Rencana waktunya harus ditentukan secara pasti, walaupun dengan pola bertahap. Kepemilikan saham harus bersifat kolektif dan Pemda hanya sebagai *penstimulus* (perangsang) pergerakan semangat investasi masyarakat. Namun demikian, organ komisaris harus memasukkan unsur-unsur profesional yang diharapkan mampu menjadi pengawas yang optimal. Dukungan politis

dari Pemda hanya diberikan dari adanya opsi-opsi teknis dan strategis yang disodorkan BUMD tersebut. Ini untuk menghindari BUMD yang bisanya hanya menggrogoti keuangan daerah. Pada jajaran direksi penunjukannya harus didasarkan pada kapabilitas, kompetensi, dan aspek moralnya yang teruji.

Jangan sampai ada direksi yang setelah BUMD mendapat proyek malah mensubkontrakkannya pada perusahaan pribadi yang dimilikinya. Perilaku seperti ini, tentunya bukan merupakan kondisi objektif untuk mendapatkan BUMD yang profesional secara optimal. Pola *corporate governance* yang dibentuk oleh DPRD dan Pemda melalui perancangan sistem harus dapat dipatuhi semua pihak yang ada di BUMD maupun oleh DPRD dan Pemda itu sendiri. Artinya, konsistensi menjadi tolak ukur penting. Menjadikan BUMD sebagai sumber dana kampanye partai, tentunya akan sangat mengganggu profesionalisme kehadiran BUMD. ♦

ADA MUSANG BERBULU AYAM

(Mencermati Perseteruan Proyek Multiyears di Riau)

Perdebatan tentang pelaksanaan pembangunan di Riau selalu saja ramai dan meriah. Kadang memberikan makna bahwa Riau memang memiliki masyarakat yang dinamis dan sangat demokratis sehingga satu usulan program tidak serta merta bisa lolos tanpa silang pendapat dan adu argumentasi yang keras. Pada sisi lain seperti ingin menunjukkan betapa orang Riau sangat lemah daya kebersamaannya sehingga sulit mencari titik temu untuk saling sepakat terhadap sesuatu hal.

Bagaimanapun positifnya sebuah ide dan gagasan jika tidak melingkup semua unsur dan elemen pastilah akan mendapat tantangan dari elemen-elemen yang merasa ditinggalkan. Orang Riau dalam konteks ini seperti memanjat batang pinang. Saling berebut dan injak menginjak untuk memastikan bahwa ialah yang paling patut dan paling mungkin memperoleh sesuatu. Tidak seperti rumpun bambu yang saling menopang.

Perdebatan terbaru di Riau yang makin seru misalnya adalah menyangkut pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang akan menghubungkan beberapa wilayah Riau yang sebelum ini sangat terisolir. Berbagai dikotomi mengemuka dalam menyikapi program dan proyek ini mengingat dana yang dibutuhkan untuk merealisasinya memang tidak kecil dan sistem pembayarannya juga harus melalui beberapa kali penganggaran tahunan APBD (multiyears).

Pertama, dikotomi antara DPRD lama dan DPRD baru. Silang pendapat dimulai dari perdebatan tentang siapa yang berhak mengesahkan proyek-proyek tersebut dianggarkan di APBD Riau. Masa tugas DPRD 1999-2004 sudah akan berakhir dan bakal diganti oleh DPRD hasil Pemilu 2004. Pada akhir-akhir masa jabatan tersebut (*the last minute*) anggota DPRD lama menyetujui dan mengesahkan adanya program dan proyek pembangunan yang mencapai nilai Rp 1,7 trilyun dengan pola penganggaran multiyears. Berbagai kalangan mencurigai ini merupakan program dadakan dan DPRD lama seolah-olah melakukan praktek-praktek yang tidak terpuji. Bahkan kecurigaan bahwa mereka telah melakukan KKN dengan menerima *fee* sebesar 7% dari nilai proyek mengemuka. Proyek dianggap sebagai sarang korupsi dan pemerintah mengambil momentum akan berakhir-

nya masa jabatan DPRD lama untuk mengesahkan dan menyetujuinya. Sisi lain dari dikotomi ini membenarkan bahwa tidak ada salahnya DPRD lama mengesahkan itu karena memang mereka masih punya hak untuk melakukan fungsi *budgeting* meskipun itu pada menit-menit terakhir masa baktinya.

Kedua, dikotomi antara APBD murni dan APBD ABT. Sebagian kalangan menilai bahwa dana pembangunan yang demikian besar tidak pantas untuk dimulai penganggarnya dalam pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) oleh pihak eksekutif ke legislatif. Media ABT hanya digunakan untuk mengajukan perbaikan anggaran dan penambahan atau mengurangi program dan proyek pembangunan dari kelebihan atau kekurangan pendapatan yang diterima daerah. Pembiayaan pembangunan yang sifatnya berkait dengan anggaran yang besar dan bahkan membutuhkan penganggaran multi-tahunan sebaiknya dilakukan dalam penganggaran APBD murni. Penganggaran dalam ABT justru memberi kesan adanya pemaksaan anggaran tanpa kajian yang matang dari segi urgensitas, substansi, dan kelayakan nilainya. DPRD tidak punya banyak waktu untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran yang diajukan pemerintah dalam ABT.

Sisi lain dalam dikotomi ini berpendapat

bahwa dalam APBD, ABT juga dapat diusulkan proyek-proyek baru yang harus didanai oleh daerah meskipun pembiayaannya tidak sanggup didanai melalui satu tahun anggaran. Perhatian hanya ditujukan pada urgensi proyek dan prioritasnya dilaksanakan di Riau. Bila proyek itu sangat dibutuhkan maka di media penganggaran manapun (murni atau ABT) DPRD dapat memainkan hak *budget*-nya.

Ketiga, dikotomi berkembang pada siapa yang bakal mengerjakan proyek yakni antara pengusaha lokal dan luar lokal. Perseteruan pendapat semakin bergeser pada aspek kepentingan. Melalui penganggaran dengan cara *multiyears* akan mengunci kesempatan pengusaha lokal untuk terlibat. Nilai proyek yang demikian besar membutuhkan kualifikasi perusahaan yang berkantong tebal. Pengusaha-pengusaha seperti ini baru hanya ada di Jakarta. Sedangkan di Riau belum mencapai kualifikasi seperti itu sehingga kesempatan mereka untuk ikut tender menjadi tertutup.

Ada kekhawatiran pengusaha lokal bila proyek-proyek pembangunan di Riau ditenderkan secara sekaligus untuk satu paket pekerjaan saja dengan nilai dana proyek yang tinggi, maka peluang pengusaha lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan menjadi tertutup. Mereka tidak akan pernah menjadi besar dan bahkan pemerintah

daerah dinilai justru mematikan usaha mereka. Menjadi penonton orang makan di rumah sendiri sangatlah menyakitkan bagi mereka.

Pendapat lain dalam dikotomi ini adalah mereka yang tidak memperhitungkan adanya proteksi bagi pengusaha lokal. Pendekatannya adalah profesionalisme dan kepentingan proyek tersebut dikerjakan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pemenang tender dapat saja melibatkan rekanan lokal dalam *men-support* mereka untuk mengerjakan proyek, tetapi tetap mengacu pada pertimbangan bahwa pengerjaannya harus berpijak pada efisiensi dan kualitas.

Keempat, proyek multiyears telah memunculkan dikotomi puak. Masyarakat Riau Pesisir yang bakal menerima limpahan pelaksanaan proyek merapatkan barisan untuk memastikan kegiatan tersebut terlaksana di wilayah mereka. Puak Riau Pesisir justru mengumandangkan akan “Merdeka” dari Provinsi Riau bila proyek tersebut tidak jadi dilaksanakan di wilayah mereka. Keinginan untuk memutus isolasi daerah di wilayah pesisir bagi mereka nampaknya sudah merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawa-tawar lagi. Ini adalah kegiatan yang nyata dan sangat signifikan dalam mencapai Visi Riau 2020.

Sementara di sisi lain ada anggapan bahwa diskusi pembangunan sudah masuk pada tataran

politik dan kepentingan. Upaya-upaya untuk melegitimasi proyek (apapun adanya) dilakukan dengan tanpa mempertimbangkan penelusuran terhadap substansi dan kelayakan anggarannya. Riau dapat terjebak pada perseteruan horizontal dalam memperjuangkan kepentingan wilayah masing-masing tanpa kajian yang holistik dari segi urgensi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan.

Mencermati berbagai dikotomi pendapat di atas sebenarnya tidaklah rumit untuk mencari jalan keluarnya. *Pertama*, haruslah dimengerti bahwa pembangunan prasarana transportasi di wilayah Riau adalah merupakan syarat mutlak untuk memajukan masyarakat Riau. Selama ini kemiskinan dan kebodohan justru banyak berpunca pada kondisi wilayah Riau yang memencilkan masyarakatnya. Prasarana transportasi yang tidak memadai telah menyebabkan rakyat terisolir dan tidak mampu berkembang.

Kalau kita mau jujur dan ikhlas memberdayakan masyarakat maka setiap rupiah dan pembangunan yang ada di APBD provinsi dan kabupaten haruslah terlebih dahulu diarahkan untuk pembangunan prasarana transportasi. Jangan dulu diarahkan untuk pembangunan kantor, rumah sakit, rumah pejabat, mobil pejabat dan proyek-proyek boros lainnya yang tidak memiliki sentuhan

langsung dengan perbaikan hidup masyarakat.

Kedua, penganggarannya tetap dapat dievaluasi oleh DPRD yang baru untuk setiap pengajuan anggaran, baik di ABT maupun murni karena memang setiap tahun bakal diajukan pemerintah untuk disahkan DPRD sesuai dengan sifat pendanaannya yang multiyears. Pendekatannya adalah anggaran berbasis kinerja dengan mengedepankan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitasnya. Jangan didekati dengan basis ingin ikut bermain untuk mengganti biaya kampanye yang sudah terkuras dalam masa pemilu lalu. Itu namanya, “*Maling teriak maling*” atau “*Musang berbulu Ayam*.” Tak ada alasan untuk meniadakan pembangunan prasarana transportasi di Riau ini, tetapi sangat terbuka kemungkinan untuk melakukan koreksi bagi terlaksananya pembangunan itu secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga memang optimal bagi pemberdayaan masyarakat Riau.

Ketiga, kerjakan proyek pembangunan tersebut dengan pola konsorsium. Pengusaha luar yang lebih profesional dapat dipilih untuk menjadi *leader* dengan melibatkan pengusaha lokal sebagai mitra kerja. Persyaratan seperti ini perlu dibuat untuk melakukan pemberdayaan pengusaha lokal. Tapi ingat jangan dipilih pengusaha yang hanya punya akte dan papan nama yang kerjaannya hanya

membeli-beli dokumen penawaran dan hidup dari uang tolak sebagai pendamping. Pilih pengusaha yang profesional, jujur, dan terpercaya. Kalau itu memang tak ada di Riau apa boleh buat, beri mereka pelajaran untuk nanti bisa menjadi pengusaha syariah di bumi Melayu yang islami ini. ♦

ATAP RUMBIA, PERABUNG UPIH

(Fenomena Proses Tender Pembangunan DPRD Riau)

Pertelagahan antara Ketua Komisi III DPRD Riau dengan Ketua DPRD Riau menyangkut Pembangunan Baru Gedung DPRD Provinsi Riau menjadi menarik untuk disimak. Perbedaan pendapat muncul akibat tidak ditaatinya apa yang sudah digariskan oleh Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara implementasinya dengan apa yang digariskan dalam APBD yang justru ditetapkan oleh DPRD bersama-sama dengan pihak eksekutif. Implikasinya sangat besar. Dimulai dari terhambatnya akses kontraktor lokal sampai pada adanya dugaan kolusi dan *mark-up* anggaran proyek.

Berbagai media memuat perbedaan pendapat kedua wakil rakyat tersebut. Beragam tanggapan muncul dan bahkan makin dilarikan kepada wilayah politik. Anehnya perbedaan pendapat tidak dicoba diselesaikan secara terbuka dan transparan.

Padahal rakyat menunggu ujungnya. Bagaimana mungkin sebuah permasalahan yang cukup besar seperti itu tidak dapat dianalisis dan dicari permasalahannya serta dibuat alternatif untuk keluar dari permasalahan itu oleh para wakil rakyat yang telah memanfaatkan segala fasilitas yang disediakan oleh rakyat pemilihnya. Ironis sekali memang perbedaan pendapat tersebut tidak melahirkan penyelesaian masalah yang efisien dan makin optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Polemik di media masa hanya akan menghasilkan praduga dan tidak menyentuh akar penyelesaian yang harmonis. Upaya untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bertanggung jawab tidak dapat ditempuh melalui gembar-gembor persoalannya ke wilayah publik tanpa diikuti oleh pencarian solusi yang komprehensif. Rakyat tidak akan terpuaskan oleh adanya publikasi tentang adanya dugaan berbagai ketidakbenaran yang dilakukan oleh pejabat publik. Semakin banyak kenyataan seperti itu diungkap hanya akan makin menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan menumbuhkan bibit-bibit pembangkangan yang dapat mengganggu stabilitas berbangsa dan bernegara.

Rakyat lebih membutuhkan adanya pemberitaan yang menyajikan adanya penyelesaian yang

efisien dan optimal dari setiap persoalan yang timbul. Pendidikan politik yang amat berharga terhadap masyarakat sebenarnya harus dimulai dari pemberian informasi yang transparan dari permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan negara dan solusi yang diambil untuk mengatasinya. Berbagai alternatif dapat saja dimunculkan sehingga ruang bagi publik untuk memilih menjadi terbuka lebar dan proses pendewasaan politik pun dimulai. Rakyat akan semakin terlatih mencari solusi terbaik dan siap untuk hidup di alam demokrasi yang santun. Inilah yang harus dikedepankan oleh setiap pejabat publik di tengah-tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

Kembali pada persoalan polemik Pembangunan Gedung Baru DPRD Riau maka penelusuran tentunya harus dimulai dari tahap perencanaannya. Ini berarti harus menilik apa yang ditetapkan oleh DPRD melalui APBD. Ambil contoh dari ketetapan APBD 2002. Pada kode kegiatan 2P.0.16.1.01.002 pada kolom 2 disebutkan Proyek Peningkatan Fasilitas dan Prasarana Fisik Gedung DPRD Propinsi Riau. Pada kolom 3 dituliskan dengan hurup besar **TURN KEY** dan tiga item pembebanan biaya yakni; I. *Administrasi dan Pengendalian Proyek Rp 30.000.000,-* II. *Pembangunan Gedung DPRD Propinsi Riau (Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai/ Turn Key) Rp*

35.774.549.700,- dan III. *Pengurusan Sertifikat Tanah lokasi Proyek Kantor DPRD Rp 20.000.000,-*. Dari apa yang digariskan dalam APBD terlihat bahwa pengalokasian anggaran pada tahun 2002 tidak untuk dibayarkan langsung pada pelaksana proyek pembangunan gedung tersebut tetapi pembayaran dilakukan pada saat pekerjaan telah selesai.

Kelemahan dari APBD ini adalah tidak menyebutkan penyelesaian seluruh pekerjaan. Secara teoritik istilah *Turn Key* memang hanya digunakan untuk menunjukkan bahwa setelah seluruh tahapan pekerjaan selesai barulah pembayaran dilakukan. Namun kalimat yang tercantum dalam APBD tetap mengandung interpretasi yang beragam. Kalimat “Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai” dapat ditafsirkan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan Tahun 2002 atau Tahapan Pekerjaan tertentu.

Sayang sekali di dalam APBD tidak secara tegas dinyatakan bahwa “Pembayaran dilakukan setelah seluruh proses pekerjaan Pembangunan Gedung Baru DPRD Propinsi Riau selesai dikerjakan dan siap ditempati yang dibuktikan dengan adanya tanda terima hasil perkerjaan”. Kekurangan ini nampaknya menyebabkan munculnya peluang untuk mengubah system *Turn Key* menjadi system baru dengan istilah yang muncul belakangan yakni *Semi Turn Key*.

Dalam praktek nampaknya dilakukan secara mendua pula. Untuk urusan tender tetap digunakan istilah *Turn Key Project*. Akibatnya kontraktor lokal kehilangan kesempatan untuk menangkap peluang usaha yang terbuka pada pembangunan gedung tersebut. Menyedihkan sekali bagi kontraktor lokal yang *nota bene* tidak hanya anak jati Melayu Riau karena mereka hanya mampu menggigit jari menyaksikan tumpukan kue yang tak dapat mereka cicipi. Lantas apakah dalam pelaksanaan pekerjaan sistem *Turn Key* ini memang dilaksanakan?

Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan yang ditandatangani pihak Dinas Kimpraswil Riau dengan Kontraktor Pelaksana terlihat persoalan yang sama. Kontrak kerja tersebut seperti “banci” yang juga tidak jelas jantan betinanya. Mungkin memanfaatkan peluang adanya bias makna dalam APBD maka kontrak kerja tersebut pun menjadi sangat aneh. Pada pasal 1 ayat 1 surat perjanjian tersebut dicantumkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) dalam bentuk dan sistem kontrak terima jadi (*Turn Key Contract*).

Pada ayat 2 dijelaskan bahwa maksud sistem kontrak terima jadi adalah PIHAK PERTAMA membayarkan pada PIHAK KEDUA

sesuai dengan dana yang tersedia dalam DIPDA tahun anggaran 2000, tahun anggaran 2001, tahun anggaran 2002, dan tahun anggaran 2003, dan PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia menyelesaikan seluruh tugas pekerjaan Pembangunan Baru Gedung DPRD Propinsi Riau pada akhir tahun anggaran 2002. Pada ayat 3 disebutkan PIHAK PERTAMA belum dapat membayar seluruh biaya pekerjaan kepada PIHAK KEDUA pada tahun anggaran 2002, PIHAK KEDUA bersedia dibayarkan biaya pelaksanaan pekerjaan pada tahun anggaran 2003.

Membaca ketiga ayat dalam surat perjanjian tersebut maka pihak kontraktor ternyata selamat dari sistem *Turn Key Project* yang murni. Kontraktor tetap akan memperoleh kucuran dana sesuai dengan dana yang tersedia dalam DIPDA yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari APBD yang ditetapkan oleh DPRD. Artinya mereka tidak perlu merogoh kocek terlebih dahulu secara penuh untuk membangun gedung tersebut. Mereka akan menerima dana secara berkala melalui setiap tahun sesuai dengan periode tahun anggaran. Ini dinyatakan dalam pasal 12 surat perjanjian tersebut. Hanya pembayaran untuk tahun anggaran 2003 yang akan mereka tanggulangi terlebih dahulu mengingat gedung baru tersebut harus selesai pada akhir tahun 2002.

Mengamati kedua Dokumen Negara ter-

sebut nampaknya tidak ada yang perlu dirisaukan. Pada APBD *toh* tidak dinyatakan penyelesaian pekerjaan harus selesai 100% dan pada perjanjian pelaksanaan pekerjaan penjelasan tentang sistem *Turn Key* dituangkan sesuai dengan perspektif mereka yang menandatangani perjanjian tersebut. Persoalannya sekarang adalah, Adakah peluang untuk KKN dalam cara-cara seperti itu atau mungkin terjadi hal-hal yang kurang pada tempatnya dalam sistem yang seperti itu?

Menjawab persoalan ini tentu tidak mungkin hanya dengan satu dua orang saja. Semua yang terkait sebenarnya harus dapat duduk bersama menyiasatinya sehingga tidak menimbulkan prasangka dan silang sengketa. Terlalu sulitkah mencari jalan keluar dari persoalan yang amat sederhana seperti ini? Bukankah yang terpenting adalah optimalisasi kinerja dan kebenaran proses untuk mencapainya. Jangan sampai segala sesuatu yang baik justru bercampur baur dengan yang buruk. Ini namanya, “*Atap rumbia perabung upih.*” Hanya saja kontraktor lokal memang tetap harus mawas diri. Nampaknya keberuntungan belum lagi berpihak kepada anda dan proses seperti ini tentunya harus diikuti oleh pemberdayaan para “tukang tempatan”. ◆

AYAM MATI KELAPARAN DI RANGKIANG

(Menggugat Alokasi Kredit untuk Rakyat Miskin di Riau)

Dalam sebuah *workshop* bertajuk *Prospek Dunia Usaha dan Potensi Pembiayaannya* yang diselenggarakan di Jakarta 27 Juli 2004, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Maman H Somantri memprihatinkan kecilnya kredit yang dialokasikan untuk sektor pertanian. Sampai akhir Triwulan II tahun 2004 hanya Rp 25,5 trilyun kredit untuk sektor pertanian atau 5,4% dari total kredit perbankan yang tersalurkan. Dibanding dengan alokasi untuk sektor industri yang mencapai Rp 131 trilyun atau 27,5% dari total kredit perbankan alokasi untuk sektor pertanian berada pada urutan terendah. Salah satu sebabnya disinyalir adalah akibat tingginya resiko agribisnis dalam pembelian kredit.

Gambaran ini menunjukkan daya tarik bisnis sektor pertanian masih rendah di mata dunia perbankan sehingga keleluasaan masyarakat petani untuk mendapatkan dana bagi pengembangan usahanya relatif terbatas. Di sisi lain keadaan ini

bisa saja muncul karena sektor pertanian sudah mulai ditinggalkan masyarakat dan mereka cenderung berpindah ke sektor lain untuk mengadu nasib dan peruntungan. Bila kondisi demikian berlanjut, tingkat urbanisasi akan meningkat, jumlah masyarakat miskin perkotaan semakin bertambah.

Sumber-sumber alam pedesaan tidak tergarap dan pada akhirnya akan memberi peluang pada “petani berdasi” untuk memperoleh lahan secara murah. Mesin-mesin bisnis mereka akan secara leluasa menguasai asset-asset ekonomi rakyat. Bila pemerintah tidak hati-hati maka pembesaran alokasi kredit ke sektor pertanian tidak lagi akan dinikmati petani miskin, tetapi jatuh pada kelompok konglomerat pertanian. Marginalisasi masyarakat pedesaan semakin parah dan kemiskinan sebahagian besar masyarakat akan makin sulit dientaskan.

Di Riau kondisi yang terjadi relatif berbeda. Sampai dengan akhir Triwulan I tahun 2004 *outstanding* kredit untuk sektor pertanian mencapai Rp 3,63 triliun atau 20,77% dari total *outstanding* kredit yang ada. Sampai dengan bulan April 2004 *outstanding* kredit perbankan di Riau mencapai Rp 17,482 triliun. Jumlah ini telah mencapai 90,43% dari dana masyarakat yang berhasil dihimpun perbankan Riau. Dengan demikian dana masyarakat yang tersisa di perbankan Riau hanya tinggal

9,57% atau lebih kurang Rp 1,851 trilyun. Sedangkan alokasi kredit untuk sektor industri mencapai Rp 4,774 trilyun.

Dibandingkan dengan keadaan tahun 2003 *outstanding* kredit perbankan untuk sektor pertanian mengalami peningkatan dan sektor industri justru sedikit menurun. *Outstanding* kredit untuk sektor pertanian akhir tahun 2003 baru mencapai Rp 3,488 trilyun atau 20,26%. Sedangkan sektor industri mencapai 29,58% atau sekitar Rp 5,092 trilyun. Sektor ekonomi yang memiliki porsi yang besar menyerap kredit perbankan adalah sektor perdagangan. Pada tahun 2003 *outstanding* kredit sektor ini sebesar Rp 2,211 trilyun atau 12,85% dan Triwulan I tahun 2004 naik menjadi Rp 2,414 trilyun atau 13,81% dari total *outstanding* kredit yang ada.

Ditinjau dari penggunaannya porsi terbesar adalah untuk kredit investasi dan modal kerja. Pada tahun 2003 kredit untuk investasi mencapai Rp 8,474 trilyun atau 49,22%. Jumlah ini meningkat pada akhir Triwulan I tahun 2004 yang mencapai Rp 8,626 trilyun. Sedangkan kredit modal kerja sampai akhir Triwulan I tahun 2004 pangsanya mencapai 33,31 dan kredit konsumsi sebesar Rp 2,976 trilyun atau 17,02%.

Khusus untuk Usaha Kecil Menengah pangsa kreditnya relatif kecil. Pada tahun 2003

hanya sebesar Rp 2,907 trilyun atau 16,88% dari total *outstanding* kredit yang ada di Riau. Alokasinya untuk sektor pertanian mencapai 35,89% dan perdagangan mencapai Rp 675,919 milyar atau 23,25% serta industri hanya 1,84%. Porsi penggunaannya hampir merata antara kepentingan investasi, modal kerja, dan konsumsi. Pada akhir Triwulan I tahun 2004 *outstanding* kredit untuk UKM sudah mencapai Rp 2,888 trilyun atau 16,52%. Jumlah ini teralokasi untuk sektor pertanian sebanyak 34,82% sektor perdagangan 26,20% serta industri sebanyak 1,84%.

Keadaan ini selain menunjukkan gambaran alokasi kredit yang masih rendah untuk UKM sasaran penggunaan dan tujuan penggunaannya pun masih perlu pemikiran ke arah perubahan. Masih rendahnya alokasi kredit untuk industri diperkirakan akibat tidak berkembangnya industri rakyat di Riau. Sedangkan dari aspek penggunaannya pangsa untuk kredit konsumsi yang relatif besar menunjukkan rakyat kecil masih terbuai oleh kepentingan-kepentingan konsumtifnya ketimbang kreativitas berinvestasi untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi rumah tangganya.

Pangsa kredit yang relatif kecil untuk kalangan masyarakat kecil mungkin ditandai dengan belum berkembangnya lembaga keuangan mikro yang ada di Riau. Jumlah Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) dan kantornya di Riau sampai dengan Maret 2004 baru mencapai 9 buah. Ditambah dengan BPR Syariah sebanyak 2 buah maka jumlah BPR di Riau baru mencapai 11 buah. Sedangkan Badan Kredit Desa baru ada 1 buah saja. Porsi kredit yang mampu dialokasikan BPR baru sekitar Rp 56,316 milyar atau 0,3% dari total *outstanding* kredit di Riau. Penggunaannya lebih banyak terarah untuk modal kerja dan konsumsi. Pada akhir Triwulan I tahun 2004 pangsa kredit untuk modal kerja mencapai Rp 36,633 milyar dan konsumsi sebesar Rp 17,856 milyar. Sedangkan untuk kepentingan investasi hanya sebesar Rp 1,807 milyar.

Berdasarkan gambaran data tersebut menunjukkan keadaan yang sedikit memprihatinkan yang terjadi di Riau. Meskipun alokasi kredit untuk pertanian relatif besar tetapi orang yang menikmatinya bukanlah masyarakat kecil yang ada di pedesaan. Ini namanya, "*Ayam bertelur di dalam rangkiang, tapi mati kelaparan.*" Sektor perkebunan yang menyerap sebagian besar kredit perbankan lebih banya dimiliki oleh para "petani berdasi" dalam bentuk perkebunan-perkebunan sawit dalam skala besar. Kalaupun ada masyarakat jumlahnya relatif kecil dalam bentuk petani plasma. Perkebunan perseorangan yang memanfaatkan kredit bank hanyalah para pekebun-pekebun dari masyarakat golongan ekonomi

menengah keatas.

Kredit untuk UKM porsinya masih relatif kecil. Meskipun sudah sebahagian besar teralokasi untuk pertanian namun belum mampu menggerakkan perbaikan ekonomi rakyat secara baik. Penggunaannya untuk kepentingan investasi modal kerja dan konsumsi masih hampir berimbang. Keadaan ini terjadi akibat masih minimnya Lembaga Keuangan Mikro pada tingkat akar rumput. Masyarakat kecil dan petani gurem masih sulit mengakses kredit karena institusi keuangan masih jauh dari jangkauan mereka.

Ke depan, dalam rangka menggerakkan dinamika ekonomi masyarakat kecil, khususnya di pedesaan diperlukan beberapa langkah penting. *Pertama*, menumbuhkembangkan Lembaga Keuangan Mikro. Baik dalam bentuk BPR ataupun Badan Kredit Desa. Beberapa Usaha Ekonomi Desa (UED) yang sudah ada dapat dikembangkan dan dirangkum untuk secara bersama-sama menjadi pemilik dan perpanjangan BPR. Beberapa wilayah kecamatan yang memiliki potensi bisnis yang baik sebaiknya memiliki BPR untuk mengurangi tekanan para tengkulak. Pemerintah provinsi dan kabupaten dapat secara patungan membentuk BPR dengan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di wilayah mereka.

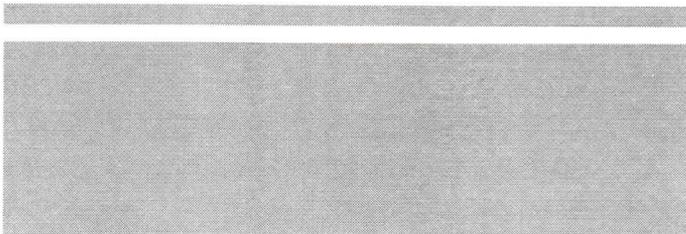
Kedua, memperbaiki kondisi ekonomi mas-

yarakat desa melalui pengembangan infrastruktur ekonomi yang memadai. Jalur distribusi sentra-sentra produksi harus diperlancar. *Bargaining position* masyarakat kecil yang selama ini sangat lemah oleh posisi pasar mereka yang terjepit dalam struktur pasar oligopsonis harus diubah. Hambatan-hambatan struktural yang selama ini melilit mereka harus diungkit untuk memberi ruang gerak yang lebih leluasa bagi masyarakat dalam memperbaiki kesejahteraan ekonominya.

Ketiga, memupuk terus semangat kewirausahaan masyarakat. Inovasi dan kreativitas rakyat harus dipancing agar menjelma menjadi karya-karya nyata yang bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pendampingan dan penuluran kemampuan dan teknologi sangat penting artinya disamping memberikan mereka dana pembiayaan yang relatif mudah, murah, terkendali dan dapat digulirkan kembali kepada mereka. Pemerintah tidak seharusnya Phobia memberikan kredit pada masyarakat dari berbagai pengalaman yang ada sebelum ini. Mengalokasikan dana rakyat untuk kepentingan pemberdayaan rakyat jauh lebih baik dari sekedar membangun kantor-kantor pemerintah yang megah dan membeli mobil-mobil mewah pejabat di tengah-tengah rakyat yang terhimpit kehidupan ekonominya. ♦

BAGIAN 3

**MENANTI
BERKAH
OTONOMI DI
RIAU**



UPAH LALU, BANDAR TAK MASUK

(Fenomena Kuznets dan Berkah Otonomi di Riau)

Provinsi Riau secara geografis dan klimatologis merupakan wilayah yang mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Terdapat tiga karakteristik wilayah Riau yang masing-masing memiliki potensi ekonomi tersendiri. Wilayah daratan memiliki potensi ekonomi pertanian, kehutanan, dan barang-barang tambang. Wilayah pesisir di samping perkebunan juga sangat potensial menghasilkan komoditas-komoditas pertanian pasang-surut. Sedangkan wilayah kepulauan di samping potensi perikanan juga sangat baik untuk perkembangan pariwisata dan perdagangan. Sebagai wilayah yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia, Riau mempunyai kesempatan untuk memanfaatkan pasar global bagi komoditas yang dihasilkannya.

Kondisi yang menguntungkan tersebut menyebabkan Riau mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Meskipun

terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia, namun bagi wilayah Riau pengaruhnya tidak begitu besar. Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia ekonomi Riau memang mengalami kontraksi, tetapi masih lebih baik dari keadaan nasional secara keseluruhan. Tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Riau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,81%. Ketika itu, ekonomi Indonesia anjlok sampai -14,22%. Sektor yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam di Riau adalah sektor konstruksi -27,99%.

Hal ini dapat dimaklumi mengingat pada saat itu terjadi peralihan pemerintahan di Indonesia dan berbagai gangguan stabilitas keamanan sehingga banyak proyek-proyek pembangunan fisik dan infrastruktur yang tertunda pelaksanaannya. Namun sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang dominan terhadap struktur perekonomian Riau justru mengalami pertumbuhan yang tinggi. Sektor pertanian mampu tumbuh mencapai 11%, listrik dan air bersih sebesar 17,16%. Termasuk perdagangan, angkutan, dan komunikasi serta jasa masih mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Riau masih di atas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Riau pada tahun tersebut adalah sebesar 5,59% sedangkan Indonesia hanya mencapai 4,12%.

Struktur ekonomi Riau lebih dominan dipengaruhi oleh pertanian dan industri pengolahan. Peranan industri justru lebih besar dari pertanian. Pada tahun 1998 peranan sektor pertanian adalah sebesar 22,56%. Kemudian ditopang oleh sektor perdagangan sebesar 17,58%. Pada tahun 2002 peranan sektor pertanian semakin meningkat yang mencapai 26,02%. Sektor industri berperan sebesar 25,99% sedangkan sektor perdagangan 17,94%.

Keadaan ini menggambarkan bahwa ekonomi Riau lebih mengarah pada perkembangan sektor tradisional yakni pertanian. Kalau dilihat dari tiga klasifikasi utama sektor ekonomi, maka terdapat kecenderungan perkembangan ekonomi Riau mengarah pada sektor primer. Sektor sekunder dan tersier justru mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 1998 sektor primer kontribusinya besar mencapai 25% dan pada tahun 2002 naik menjadi 28%. Sedangkan sektor sekunder pada tahun 1998 berperan sebesar 33% turun menjadi 32% pada tahun 2002. Demikian pula dengan sektor tersier dari 41% pada tahun 1998 turun menjadi 39% pada tahun 2002

Berkembangnya sektor primer dalam struktur perekonomian Riau terkait dengan naiknya peranan ekonomi wilayah-wilayah Riau yang lebih mengandalkan sektor pertanian sebagai basis

ekonomi masyarakatnya. Sesuai dengan karakteristik wilayahnya maka untuk wilayah pedalaman peranannya makin membesar. Pada tahun 1998 perannya baru mencapai 17,94%, maka pada tahun 2002 naik menjadi 19,47%. Wilayah pesisir pantai juga mengalami perkembangan peranan yang besar dalam struktur perekonomian Riau. Pada tahun 1998 berperan sebesar 15,58% dan tahun 2002 naik menjadi 20,38%.

Wilayah-wilayah pesisir ini juga erat kaitannya dengan sektor pertanian, baik perkebunan maupun pertanian tanaman pangan. Kontribusi ekonomi untuk wilayah kepulauan pada tahun 1998 adalah sebesar 10,33% dan pada tahun 2002 turun menjadi 9,55%. Keadaan yang sama juga terjadi di wilayah perkotaan dimana pada tahun 1998 kontribusi ekonominya mencapai 48,03% dan tahun 2002 turun menjadi 45,62%. Penurunan kontribusi wilayah perkotaan terjadi akibat menurunnya peranan Batam dari 30,83% pada tahun 1998 menjadi 26,54% pada tahun 2002.

Pada awal 2001 di Indonesia mulai diterapkan otonomi daerah. Implementasinya sangat menguntungkan Provinsi Riau. Adanya kewenangan yang lebih besar dari implementasi otonomi daerah di Indonesia membuka kesempatan bagi Riau untuk mengelola SDA yang dimilikinya. Melalui UU No. 25/1999 transfer keuangan dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah cukup besar. Riau sebagai penghasil SDA yang besar memperoleh transfer keuangan yang besar pula dari pemerintah pusat, baik untuk pemerintah propinsi maupun untuk pemerintah kabupaten.

Pada tahun anggaran 1998/1999 total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau baru mencapai Rp 325,812 milyar, maka pada 2002 jumlahnya naik lagi menjadi Rp 1.916,321 milyar. Kondisi yang sama juga terjadi pada pemerintah kabupaten dan kota di Riau. Tahun 2002 transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Riau (provinsi dan kab/kota) mencapai Rp 8,036 triliyun.

Fenomena di atas membuktikan bahwa ketersediaan SDA dan dana yang besar tidak menjamin wilayah itu akan berkembang. Kesenjangan daerah kota dan desa menunjukkan masalah yang melekat dalam pengembangan wilayah Riau. Diperlukan adanya strategi dan program pembangunan yang tepat untuk menjamin adanya pengurangan ketimpangan tersebut. Jangan hanya mengerjakan proyek yang sia-sia dan melakukan pemborosan belaka. Proyek-proyek yang menghabiskan biaya tetapi tidak bermanfaat bagi rakyat dan tidak memberikan tambahan hasil bagi Riau harus dienyahkan dalam program pembangunan Riau. Jangan sampai terjebak pada apa yang

disenarai orang Melayu sebagai, “Upah lalu bandar tak masuk.”

Melalui otonomi daerah diharapkan *performance* pembangunan akan lebih baik. Terutama bila dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah distribusi pendapatan. Berdasarkan data ternyata di Riau terdapat pengurangan porsi penerimaan pendapatan bagi penduduk 40% berpendapatan rendah. Pada tahun 1998, 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati 23,47% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riau dan pada tahun 2002 turun menjadi 21,74%.

Sedangkan kelompok penduduk 20% berpendapatan tinggi pada tahun 1998 memperoleh porsi mencapai 40,15% dan pada tahun 2002 naik menjadi 40,99%. Kelompok penduduk 40% berpendapatan menengah mampu menikmati distribusi pendapatan sebesar 36,38% pada tahun 1998 dan naik menjadi 37,28% pada tahun 2002. Meskipun masih tergolong moderat, kenyataan ini menunjukkan adanya peningkatan kesenjangan dalam distribusi pendapatan di Riau selama lima tahun terakhir.

Kesenjangan ekonomi yang terjadi di Riau juga dapat diamati dari naiknya *Index Gini Ratio* (IGR). Pada tahun 1998 IGR adalah sebesar 0,2937, sedangkan pada tahun 2002 naik menjadi

0,3100. Semakin besar IGR maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan. Selain itu, jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau pun masih relatif besar dan bahkan cenderung meningkat. Berdasarkan data BKKBN pada tahun 1998 penduduk Prasejahtera Alasan Ekonomi mencapai 2,86% dan Sejahtera I sebesar 8,09%. Berarti jumlah masyarakat miskin di Riau pada tahun tersebut mencapai 10,95%. Ironisnya pada tahun 2002 jumlah penduduk prasejahtera naik menjadi 7,06% dan Sejahtera I membengkak menjadi 15,07%. Berarti pada tahun 2002 penduduk miskin Riau karena alasan ekonomi mencapai 22,13%.

Ternyata di Riau dalam era otonomi dan desentralisasi terjadi ketimpangan pendapatan yang makin tinggi meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi dan dana anggaran pemerintah (*government expenditure*) makin membesar. Fakta ini menunjukkan adanya *trade-off* antara pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, atau semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita, maka semakin besar perbedaan antara kaum kaya dengan kaum miskin.

Hal ini sejalan dengan apa yang selama ini dikenal dengan *Hipotesis Kuznets* (Norman G, 1992) yang menyatakan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan kesenjangan pen-

dapatan. Dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi yang negatif. Hanya saja untuk kasus Riau tidak dapat ditentukan seberapa lama waktu jangka pendek tersebut akan dan harus berlangsung.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan naiknya jumlah penduduk miskin karena alasan ekonomi di Riau. *Pertama*, sebagai akibat dari meningkatnya kesenjangan di Riau baik dalam distribusi pendapatan maupun penguasaan asset-asset ekonomi. *Kedua*, implementasi program pembangunan yang belum mampu memberdayakan masyarakat. Tarik-menarik antara kepentingan legislatif dan eksekutif telah melahirkan program dan alokasi anggaran yang kurang optimal, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ketiga, sejalan dengan implementasi otonomi daerah maka Riau menjadi wilayah yang sangat menarik bagi pencari kerja di luar Riau. Anggaran pemerintah daerah yang meningkat memberi daya tarik tersendiri bagi datangnya orang-orang ke Riau untuk memperbaiki hidupnya. Berdasarkan data tahun 2002 migrasi ke Riau mencapai 206.514 orang. Akibatnya pertumbuhan penduduk Riau relatif tinggi yakni 3,73% pertahun dan sebagian besar disebabkan oleh migrasi masuk yang tinggi. Bila diamati dari perkembangan tingkat pengangguran terbuka keadaan tersebut sema-

kin terbukti. Pada tahun 2002 terjadi kenaikan yang sangat tajam Tingkat Pengangguran Terbuka di Riau. Bila tahun 1998 baru sebesar 5,1% maka pada tahun 2002 naik mencapai 8,05%.

Adanya berbagai fenomena di atas mencerminkan masih diperlukannya kebijakan-kebijakan pembangunan yang mampu secara sinergis menggunakan setiap potensi ekonomi yang ada di Riau bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan melakukan pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian produktivitas yang tinggi, tetapi juga adanya penduduk yang makmur dan sejahtera secara merata. Kebijakan ekonomi yang terpadu secara lintas wilayah mutlak diperlukan untuk memperoleh hasil yang optimal dari pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia bagi berkembangnya kesejahteraan masyarakat Riau secara merata dan berkesinambungan.

Kebijakan pembangunan harus diarahkan pada kelompok sasaran yang tepat terutama sekali melalui redistribusi asset ekonomi yang berorientasi pemerataan. Bagi masyarakat miskin pedesaan akses untuk mendapatkan lahan, pengetahuan, kredit dan interaksi yang adil terhadap pasar harus dimiliki masyarakat miskin secara optimal. Sedangkan untuk masyarakat miskin perkotaan harus diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan perbaikan produktivitas dari pekerjaan yang sudah

ada. Kebijakan yang ditujukan terhadap peningkatan pemerataan pendapatan dan penghapusan kemiskinan jelas harus mempunyai komitmen politik yang memiliki persesuaian antara tujuan dan cara pencapaiannya. Sekedar niat baik saja tidaklah cukup. Penanggulangan masalah memerlukan penanganan yang rinci, holistik, dan berkesinambungan. ♦

KE HULU SERENTAK GALAH, KE HILIR SEREMPAK DAYUNG

(Menggali Potensi PAD dalam Konteks Otonomi Daerah)

Otonomi daerah telah semakin dipertegas dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Berbeda dengan UU No. 5/1974, keberadaan daerah kabupaten nantinya memiliki peran yang lebih besar. Di satu sisi, keadaan ini memberi peluang pada daerah untuk berkembang atas kemampuannya sendiri. Di lain sisi, membawa konsekuensi berkembangnya organisasi yang memerlukan penataan secara profesional, terutama bidang SDM dan keuangan daerah.

Konsep otonomi daerah pada dasarnya berkaitan erat dan berpangkal pada tiga masalah pokok, yakni pembagian wewenang, pembagian tanggung jawab dan tersedianya sumber-sumber keuangan yang ada pada berbagai tingkatan pemerintahan. Menurut GK. Shaw (1999) dalam *Inter-*

governmental Fiscal Relation, hal terpenting dalam otonomi daerah adalah mereka mempunyai sumber pendapatan yang elastis, tidak tergantung dari pada asal dana tersebut. Selain itu, GK. Shaw juga menyebutkan daerah mempunyai keleluasaan dalam pengeluaran-pengeluarannya, sehingga dapat melaksanakan fungsi untuk memberikan pelayanan masyarakat terbaik.

Keleluasaan daerah dalam hal keuangan menurut KJ. Davey (1999) dalam *Financing Regional Government* dapat dibedakan dalam empat tingkatan. *Pertama*, pemerintah daerah mempunyai kebebasan penuh dalam penentuan tujuan maupun jumlah pengeluaran-pengeluarannya. *Kedua*, pemerintah daerah mempunyai kebebasan penuh dalam penentuan tujuan pengeluaran-pengeluarannya dalam batas-batas yang digariskan pusat. *Ketiga*, pemerintah daerah mempunyai kebebasan dalam penentuan tujuan pengeluaran sesuai dengan fungsi dan dalam jumlah yang telah digariskan pemerintah pusat. *Keempat*, pemerintah daerah mempunyai kebebasan menggunakan uang dalam batas tujuan dan jumlah yang telah digariskan pusat.

Persoalan otonomi daerah di Indonesia memang telah mengalami banyak perubahan. Mulai dari UU No. 1/1945, UU No. 22/1948, UU No. 1/1957, UU No. 18/1965, UU No. 5/1974, dan terakhir UU No. 22/1999 dan UU No. 25/

1999. Sampai pada pemberlakuan UU No. 5/1974, pelaksanaan otonomi daerah tersebut hanya bagus di atas kertas. Aturan pelaksanaan untuk merealisirnya sangatlah tidak memadai. Sistem pemerintahan masih terjebak pada tingkat keempat dalam urutan keleluasan daerah.

Pemberlakuan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 menjadi tumpuan yang sangat penting bagi daerah. Sistem pemerintahan berdasarkan undang-undang ini memberikan keleluasaan daerah (*local discretion*) untuk menjalankan fungsinya secara lebih baik. Semakin besar keleluasaan daerah dalam menggali potensi yang ada di daerah, maka semakin besar pula kesempatan daerah mendapatkan pendapatan untuk pembiayaan pembangunan di daerahnya. Menyikapi hal ini, NP. Hepworth (1999) dalam *Public Expenditure Controls and Local Government* memandang bahwa semakin independen suatu daerah, akan makin memungkinkan daerah tersebut untuk memperoleh pendapatan yang besar. Sehingga, posisinya akan semakin baik dalam memberikan pelayanan masyarakat (*public service*) yang berkualitas.

Pada masa mendatang, jika pemerintah Indonesia yang baru nanti memang konsisten untuk menerapkan azas otonomi daerah yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan makna kedua undang-undang tersebut, diperlukan

upaya yang konkrit untuk mengidentifikasi potensi yang mungkin digali sebagai sumber-sumber pendapatan daerah. Dana perimbangan yang bakal diterima harus dijadikan modal untuk mendorong tumbuhnya kemandirian daerah, khususnya dari aspek terbentuknya kreativitas daerah melahirkan sumber pembiayaan (*revenue centre*).

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) nantinya akan terdiri dari empat macam, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan sumber pendapatan daerah itu sendiri selain PAD akan diperoleh dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain PAD yang sah. UU No. 25/1999 pada penjelasan pasal 5 ayat 1 jenis-jenis pajak daerah dan distribusi daerah sudah akan disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan ke daerah.

Selama ini masih banyak sumber PAD yang belum tergali dengan baik. Komponen PAD pada umumnya relatif sangat kecil, walaupun secara kuantitatif komponen ini banyak. Mekanisme pungutan PAD juga terlalu birokratis, sehingga hasil pungutan dibebani biaya tinggi. Lebih rumitnya lagi, sistem informasi pemerintahan dan kemasyarakatan di Indonesia sangat tidak memadai sehingga potensi kurang dapat diukur dan diestimasi secara optimal.

Masyarakat sendiri belum memiliki kesadaran yang menunjang. Peran sertanya masih minim, sehingga efektivitas pungutan dan efisiensinya rendah. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi unit usaha strategis dan profesional di daerah tidak pula memadai. BUMD banyak yang hanya menjadi *cost centre*, bukannya berfungsi sebagai pendapatan. Selain BPD Riau, perusahaan daerah yang lain kontribusinya sangat tidak memadai atau bahkan tidak ada sama sekali. Justru yang terjadi keberadaan perusahaan tersebut hanya menjadi beban APBD.

Mengamati perkembangan Provinsi Riau yang begitu pesat dan tuntutan perkembangan terhadap pelayanan masyarakat, peningkatan PAD perlu dilakukan dengan menggali potensi dan pola pengelolannya secara optimal. Jaringan informasi terpadu sangat dibutuhkan agar keberadaan potensi terdata dengan akurat. Pemerintah tidak dapat hanya mengandalkan keberadaannya sebagai aparat birokrasi yang selama ini relatif arogan. Tanpa partisipasi dan peran serta masyarakat, serta didukung sistem informasi yang terpadu antar lembaga, maka upaya meningkatkan PAD tidak akan memadai.

DPRD harus pula tanggap untuk melahirkan perangkat hukum dalam bentuk Perda agar potensi PAD yang ada dapat direalisasikan. Dalam perspektif

masyarakat Melayu istilah, “*Ke bulu serentak galah ke bilir serempak dayung*,” kiranya bisa dijadikan syarat mutlak untuk diberlakukan. Mengisi “kocek” daerah memang memerlukan kerja keras, namun muaranya adalah kemandirian dan keleluasaan untuk berbuat bagi kepentingan daerah itu sendiri. Untuk memulainya, transparansi, dan prinsip keadilan menjadi dasar utama yang harus dibangun dan dikedepankan. ♦

TIGO TUNGKU SEJARANGAN

(Menata Model Pemerintahan Daerah Otonom)

Otonomi daerah sebagai *starting point* dalam pemberdayaan rakyat, nampaknya masih akan mendapat ganjalan oleh banyak hal. *Pertama*, diajukannya Rancangan Undang-undang Keselamatan dan Keamanan Negara (RUU KKN) yang apabila disahkan secara langsung akan berakibat pada tidak terlaksananya otonomi. Undang-undang ini hanyalah perubahan bentuk dari undang-undang subversif yang sebelumnya telah dicabut.

Kelahiran UU KKN akan memberikan kekuasaan yang terpusat pada presiden selaku Panglima Tertinggi TNI. Ini akan memberikan peluang terciptanya pemerintahan militer terselubung di Indonesia secara *de jure*. Namun, fakta di lapangan akan menempatkan pihak keamanan (TNI dan Polri) semakin dominan mengambil alih sektor-sektor masyarakat seperti yang selama ini terjadi.

Kedua, selama pemerintahan transisi, keber-

hasilan menyusun undang-undang tentang otonomi tidak diikuti oleh upaya untuk merujuknya dalam politik pemerintahan Indonesia. Buktinya nampak dengan disiapkannya *country program* sebagai pengganti JPS oleh pemerintah. *Country program* yang bersifat jangka menengah, tidak lain merupakan sarana legitimasi sentralisasi kebijakan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan masyarakat.

Meskipun pengelolaannya bersifat desentralisasi, namun tingkatnya masih mengarah pada kebijakan yang terpusat. Ada baiknya, program pemberdayaan rakyat tidak dirancang oleh pusat, tetapi diserahkan kepada daerah, mengingat pemantauan permasalahan masyarakat secara konkret hanya dapat dilakukan di daerah. Untuk itu, segala program pembangunan masyarakat harus diserahkan ke daerah secara utuh. Apalagi yang berasal dari pinjaman luar negeri agar kebocoran tidak banyak terjadi.

Ketiga, rencana eksodus SDM pusat ke daerah. Masalah klasik ini ternyata masih dijadikan pembenaran terhadap kebijakan yang justru kontra-produktif dengan pemecahan masalah SDM itu sendiri. SDM di daerah, tidak akan pernah mendapat pembelajaran yang efektif, bila ia tidak diberi kesempatan untuk menentukan kebijakan sendiri.

Untuk mengatasi kelangkaan tersedianya

SDM di bidang teknik di daerah misalnya, tidaklah diperlukan eksodus SDM dari pusat. Biarkan proses itu terjadi secara alami. Ibarat kata pepatah, “*Di mana ada gula di situ ada semut*”. SDM daerah akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas dirinya agar tidak digrogoti “semut-semut” pendatang. Bila semut-semut itu dipaksakan dan sengaja didatangkan dari pusat untuk menggrogoti “gula daerah”, maka yang akan terjadi adalah konflik kecemburuan.

Keempat, suhu politik yang memanas, khususnya dalam mengantisipasi Sidang Umum MPR, menyebabkan aspek yang lebih essensial bagi pemberdayaan rakyat menjadi dinomorduakan. Orientasi elite politik lebih mengarah pada perebutan kursi presiden dan berbagi kekuasaan. Bermunculannya kasus perbankan, sebenarnya tak terlepas dari kaitan itu. Muatan politiknya lebih tinggi, ketimbang upaya membersihkan bangsa ini dari para koruptor dan kolutor.

Mencermati keempat fakta tersebut di atas, masyarakat di daerah harus cepat tanggap. Daerah harus berpacu dengan waktu dan kecepatan pemerintah pusat dalam mempreteli pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempretelinya untuk mempertahankan dominasi kekuasaan pusat terhadap daerah. Sedangkan pemerintah dan masyarakat di daerah harus mempretelinya untuk melihat pe-

luang yang sesegera mungkin untuk ditindaklanjuti dari terbukanya pintu gerbang otonomi daerah melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999.

Daerah harus memformulasikan sistem dan model pemberdayaan masyarakatnya secara mandiri. Model dan sistem tersebut harus dimulai dengan mengatur tata pemerintahan yang berorientasi pada budaya masyarakat tempatan. Artinya, harus diupayakan mengintegrasikan segenap komponen dalam pengambilan keputusan pembangunan masyarakat.

Tigo Tungku Sejarangan

Sistem dan mekanisme pemerintahan terpadu antara aparat pemerintah formal dengan pemimpin informal yang ada (adat dan agama) harus diciptakan, sehingga partisipasi masyarakat dapat ditumbuhkan secara melembaga. Melalui UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 kemungkinan untuk itu semakin lebar. Selama ini, keterlibatan tokoh adat dan agama hanya dilakukan bagi kepentingan politik aparat birokrasi. Dalam pengambilan keputusan pembangunan dan pelaksanaannya, mereka hanya menjadikan alat stempel atau justifikasi saja.

Integrasi adat dan agama dalam tata pemerintahan sebenarnya sudah teruji keampuhannya. Rezim pemerintahan Orde Baru justru melemah-

kan eksistensi itu untuk kepentingan mempertahankan kekuasaannya. Dalam perspektif adat, di Kuantan Singingi misalnya, keterpaduan antara penguasa dengan pemimpin adat dari agama tercermin dari falsafah adat mereka.

Pemerintah yang kokoh dalam perspektif adat Kuantan Singingi harus ditopang oleh apa yang disebut *Tigo Tungku Sejarahangan*, yakni pemuka adat, alim ulama, dan cerdik pandai (cendikiawan). Artinya, keberhasilan pemimpin akan ditentukan oleh dukungan ketiga elemen tersebut, baik dalam pengambilan kebijaksanaannya maupun dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Oleh karena itu, ketiga elemen tadi sering disebut *Tigo Tali Sepilin*. Sebab ketiganya merupakan sub-sistem yang tak terpisahkan dalam suatu sistem secara keseluruhan. Manajemen pemerintahan akan lebih mudah dijalankan karena tiga komponen tadi. Mengakar ke masyarakat dan problematika masyarakat dapat disalurkan melalui ketiga pintu itu. Tidak ada dominasi kekuasaan yang mengarah pada kediktatoran, karena eksistensi penguasa justru lahir dari masyarakat melalui pemuka agama, pemuka adatnya, dan para cendikiawannya.

Kualitas keberadaan rakyat dalam tata pemerintahan yang mengacu pada adat, jauh lebih baik dari apa yang selama ini diterapkan oleh rezim

Orba. Kedudukan seseorang dipandang sebagai pribadi utuh sesuai kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat. Ini tercermin dari apa yang disebut adat, *Nan kuriak iolah kendi, nan sirah iolah sago. Nan baiak iolah budi, nan indah iolah baso. Anyuik batuluang, ilang bacari* (Yang kurik ialah kendi, yang merah ialah sago. Yang baik adalah budi, yang indah ialah bahasa. Hanyut ditolong, hilang dicari).

Tujuan tatanan masyarakat seperti ini adalah menghormati yang tua dan mengasihi yang kecil. Sama besar dibawa berkawan dan yang lemah dibantu. Untuk itulah, kedudukan seseorang sebagai anggota komunitas memiliki kewajiban yang sama, *Sehino semalu, seborek seringan*.

Susunan masyarakat tertumpu pada urutan yang sistematis, *Negori berompek suku, dalam suku beporuik. Kampuang dibori betuo, rumah dibori betung-ganai, dengan ketentuan, Kemenakan berajo ke mamak, mamak berajo ke penghulu. Penghulu berajo ke mupokat, mupokat berajo ke nan bonar nan manuruik alua jo patuik. Ado nan patoik tapi dak mungkin, ado nan mungkin tapi dak patuik*. Kedudukan seorang pemimpin ditata untuk bersifat adil dan mengayomi sebagaimana yang disebut dalam adat, *Mengati samo borek, menguji samo sira. Tibo pek poruik jan dikempekan, tibo pek mato jan dipiciangkan, Godang jan meimpik, lowe jan menyaok*.

Kewajiban pemimpin terhadap masyarakatnya sangat tegas dan rinci. Sebagaimana dituangkan dalam aturan adat, *Kayu godang di tonga padang, boke belinduang kepanasan, boke betodua kenjanan. Urek boke baselo, batang boke besandar. Tetogak menjadi pagaran, telilik menjadi pengobek, tebelintang menjadi pelibai. Kan poi boke betanyo, baliak boke becerito.* Peluang untuk mengembalikan tata pemerintahan seperti ini, terbuka lebar dengan diberlakukannya UU No. 22/1999 yang memuat otonomi daerah. ♦

AYAM BERINDUK, SIRIH BERJUNJUNG

(Menyongsong Implementasi Otonomi Desa di Riau)

Proses pembangunan di Riau memasuki babak baru yang harus disikapi secara seksama dan berkelanjutan. Sejak berpisah dengan Kepulauan Riau luas wilayah makin berkurang. Luas wilayah daratan makin dominan karena sebagian besar wilayah perairan menjadi milik Provinsi Kepri. Namun, sebahagian besar wilayah pesisir masih berpotensi untuk menghubungkan Riau daratan dengan berbagai pintu gerbang perdagangan dunia.

Walaupun dalam percaturan global entitas ekonomi tidak lagi mampu dibatasi oleh aspek perwilayahan administrasi pemerintah, bukan berarti strategi pembangunan ekonomi masyarakat Riau Daratan tidak perlu ditata ulang. Dengan karakteristik pedesaan aliran sungai dan pesisir pantai proses pembangunan membutuhkan transformasi sektor primer ke arah industri yang tidak saja memiliki keterkaitan lini depan-belakang (*forward and backward linkage*), tetapi juga pembe-

saran kesamping (*multiplier effect*) yang merata.

Realitas ekonomi yang terjadi selama ini menunjukkan perbedaan yang menonjol antara Riau Daratan dengan Riau Kepulauan. Ciri ekonomi Riau Daratan lebih agraris dan mengandalkan produksi sektor primer. Sedangkan Riau Kepulauan berkembang melalui sektor sekunder dan tersier yang banyak ditopang Batam sebagai basis industri. Konsentrasi ekonomi pada sektor primer di Riau Daratan menyebabkan masyarakat wilayah ini kurang berkembang. Kondisi infrastruktur yang kurang memadai semakin memperparah ruang gerak ekonominya. Nilai tambah yang diperoleh masyarakat petani menjadi sangat minim. Struktur pasar komoditas pertanian yang oligopsonis (dengan berkolusi cenderung berperilaku monopsoni) menyebabkan penghisapan yang mengena terhadap kelayakan hidup petani. Padahal sebagian besar masyarakat Riau Daratan tinggal di pedesaan dan menggantungkan nafkahnya pada pertanian.

Menyikapi kondisi tersebut Riau Daratan seharusnya menata kembali strategi pembangunannya. Wajar saja bila ada keinginan untuk mengubah-suai sasaran jangka panjang dan target jangka pendek pembangunan Riau Daratan ke depan. Fokus perhatian memang harus lebih dipertajam ke arah pemberdayaan rakyat untuk

masuk dalam dinamika ekonomi yang lebih cepat dan lebih mengandalkan mutu sebagai kompetensi untuk memenangkan percaturan hidup.

Keterbelakangan ekonomi yang dialami masyarakat pedalaman Riau Daratan selama ini berawal dari terkonsentrasinya mata pencaharian pada satu sub-sektor, yakni perkebunan, karet, dan kelapa. Infrastruktur yang tidak memadai dan tekanan para tengkulak menyebabkan kehidupan ekonomi rakyat terbelenggu pada *system ijon* yang sangat mencekik. Mereka tinggal di pedesaan dengan mengandalkan teknologi bertani yang kurang memadai. Pendidikan yang rendah menyebabkan kemampuan untuk mandiri relatif terbatas. Untuk itu, perhatian yang lebih serius terhadap pembangunan pedesaan merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Pemerintah Provinsi Riau yang ingin mengisi tahun 2005 ini dengan program pembangunan melalui pemberian otonomi desa sangat menjanjikan. Jika implementasinya dapat berjalan baik maka rakyat pedesaan akan merasakan adanya keberpihakan yang nyata. “*Ayam memang harus berinduk dan sirih haruslah berjunjungan.*” Posisi mereka yang lemah tidak mungkin dilepas untuk bersaing dengan kelompok masyarakat lain yang lebih maju.

Menurut AT. Birowo (1982) dalam tulisannya berjudul *Perencanaan Pembangunan Pedesaan dan Pelaksanaannya*, pembangunan pedesaan adalah

suatu proses perubahan dalam masyarakat desa, dimana kemiskinan akan dihapuskan dan kreativitas serta tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh lapisan miskin akan dimanfaatkan sepenuhnya. Lapisan miskin harus mampu memanfaatkan sumber-sumber masyarakat dan lingkungan yang tersedia dan juga harus didorong untuk ikut dalam kontrol sumber daya yang berasal dari luar lingkungan pedesaan. Dewasa ini sudah banyak sumber-sumber pedesaan yang terkuras dan bahkan berpindah tangan kepada para pemburu rente. Oleh karenanya pembangunan pedesaan harus melingkup tiga strategi, yakni peningkatan standar kehidupan, partisipasi massal, dan merangsang proses yang mandiri (*self-sustaining process*).

Sangat perlu disadari bahwa kesejahteraan, perdamaian, dan kebahagiaan hidup masyarakat pedesaan tidak mungkin “dianugerahkan” oleh pemerintah. Masyarakat sendiri harus bertindak dan bekerja. Kriteria keberhasilan dalam pengembangan SDM pedesaan bukan hanya pemenuhan dan penyediaan kebutuhan material, tetapi juga kemampuan masyarakat desa itu sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Junjungan hanyalah media untuk menjalar, sirihlah yang harus berbuah. Lebih tegas lagi jangan sampai pula junjungan yang menghisap makanan sirih sehingga bukannya ia berdaun tetapi malah mati kekeringan.

Berkenaan dengan penguatan otonomi desa dalam Rakor Gubernur tanggal 16-17 Juli 2005 dikeluarkan beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan pemerintah c/q Departemen Dalam Negeri. *Pertama*, segera menetapkan pedoman tentang alokasi bantuan keuangan dan standarisasi dan kriteria pengalokasian bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten kepada Desa dalam rangka mempercepat perwujudan otonomi desa. Berbagai pedoman teknis yang berkaitan dengan otonomi desa untuk pemerintah provinsi, kabupaten, dan perangkat desa harus segera dipersiapkan

Kedua, mengadakan sosialisasi makna otonomi desa pada seluruh jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten. Termasuk melakukan publikasi tentang makna otonomi desa melalui media massa. *Ketiga*, menetapkan standarisasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyelenggara pemerintahan desa dalam mengelola desa dan melakukan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat. *Keempat*, menerbitkan data wilayah desa dan pedoman teknis pengelolaan sumber-sumber pendapatan desa.

Menurut Selo Sumardjan, di dalam rangka otonomi ukuran baik adalah apabila pemerintah yang otonom di daerah itu mengarahkan pemerintahannya kepada keamanan, kesejahteraan, dan

kebahagiaan masyarakat desa. Pemerintah harus mengarahkan sebahagian besar kekuatan dan sumberdayanya untuk mengurus kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu menjadi penting dipahami karakteristik rakyat di desa dengan segala dinamikanya dan pemetaan yang jelas akan seperti apa perkembangannya. Pemerintah harus mencari cara agar perkembangan ke depan dari masyarakat desa menjadi makin sejahtera, bukannya malah membuat kehidupan rakyat desa semakin rumit dan terpinggirkan.

Sulit untuk membiarkan sendiri masyarakat desa berkembang ke pola-pola hidup yang modern. Ini malah akan menyebabkan kehidupan mereka menjadi tidak nyaman. Untuk mengadakan suatu sistematis dalam melihat masyarakat desa, Selo Sumardjan menjelaskan harus melihat kepada kebudayaannya sebagai hasil dari pemikiran rakyat yang menimbulkan ideologi sebagai hasil perasaan yang menelorkan nilai-nilai dan hasil dari pekerjaan yang membuahkan produk-produk nyata.

Model implementasi otonomi desa yang ingin ditaja oleh Pemerintah Riau dengan sendirinya harus berpijak pada seberapa kuat kemampuan rakyat memperbaiki kehidupannya dan sebesar apa kekuatan pemerintah yang dibutuhkan untuk menopang atau memberi junjungan agar kualitas kehidupan rakyat desa semakin membaik. Birokrasi

yang berbelit-belit hanya akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan program dijalankan secara baik malah berkurang. Kontrol yang asalan dapat mempertegas anggapan selama ini bahwa setiap yang dikerjakan pemerintah untuk rakyat hanyalah hibah yang tak perlu dipertanggungjawabkan secara sungguh-sungguh.

Selama ini memang tidak ada sanksi yang tegas bagi para perusak program pemberdayaan rakyat. Pemerintah memang harus berpihak kepada rakyat, tetapi itu bukan berarti menjadi sinterklas. Memahami rakyat, memberi mereka kepercayaan, mendampingi mereka untuk memberikan pertolongan terhadap hal-hal yang kurang mereka pahami dan mewaspadaai secara dini adanya faktor pengganggu (aparatur yang korup, budaya rakyat yang ingin serba instant), serta membebaskan rakyat dari tekanan *rente-isme* adalah kata kunci untuk berhasilnya program otonomi desa. ♦

MENGHELA BAMBU SUNSANG

(Reformasi Birokrasi Riau di Era Otonomi Daerah)

Tidak terbayangkan bagaimana gejolak pikiran para petinggi Riau sempena kunjungan Mengan Hultikultura ke Kecamatan Bukitraya Pekanbaru. Sebagaimana diberitakan ada jawaban spontan masyarakat ketika ditanya oleh Pak Menteri yang mengungkapkan bahwa tidak diterimanya beras Operasi Pasar Khusus (OPK) oleh mereka selama ini. Padahal laporan yang diberikan oleh pejabat Riau pada Pak Menteri sebelumnya menyebutkan bahwa masyarakat sudah menerimanya.

Entah apa yang ada di benak para birokrat saat ini, sehingga beras untuk kaum miskin pun mereka sikat. Perasaan malu kepada diri sendiri sepertinya sudah tenggelam. Mungkin rasa takut pada Allah Swt juga tidak lagi mampu mengusik mereka, sehingga begitu beraninya mereka memakan hak fakir miskin.

Kejanggalan seperti ini mungkin tidak akan terungkap pada masa lalu. Sebab, setiap kunjungan

pejabat tinggi pusat ke daerah untuk bertemu wicara dengan masyarakat selalu disiapkan orang yang akan bertanya dan menjawab. Laporan asal bapak senang (ABS) menjadi *trend* pemerintah rezim Orba. Pada era reformasi sekarang, ternyata mereka kena batunya. Spontanitas masyarakat menunjukkan bahwa mereka mulai terdidik untuk membela kepentingannya dan transparansi, ternyata mampu dijadikan alat untuk mengefisien kinerja pembangunan.

Dalam tataran yang lebih luas, di Indonesia saat ini memang sedang bermunculan berbagai kasus kejahatan birokrasi (*bureucratic crime*) yang memprihatinkan. Dimulai dengan *Soeharto Gate*, *Truck REO gate*, *Ghalib Gate*, dan banyak *gate-gate* lainnya. Kasus paling akhir yang sangat menghebohkan adalah *Bali Gate*. Belum lagi kasus-kasus yang berkaitan dengan berbagai peristiwa kerusuhan di seantero tanah air seperti Aceh, Ambon, dan Batam. Masyarakat seperti disuguhkan sebuah sandiwara bersambung yang tak kunjung usai. Babakan demi babakan makin menyengsarakan rakyat, namun anehnya penyelesaian yang ditunggu makin kabur.

Dalam suasana demikian, para birokrat ternyata makin tidak bijak. Mereka justru makin mengkhawatirkan perilaku massa tanpa mencoba untuk menelusuri sebab timbulnya perilaku ter-

sebut dalam kaitannya dengan perilaku mereka. Kaum birokrat masih membutuhkan mata dan hati terhadap berbagai kritik yang dialamatkan pada mereka. Banyak sekali penyelewengan yang terjadi dari tujuan organisasi para birokrat. Pelayanan senantiasa diubah menjadi penguasaan. Kasus BPPN adalah contoh konkrit dari masalah ini.

Secara fundamental, disfungsi birokrasi di Indonesia terjadi karena sistem yang dibangun selama ini mengandung banyak kelemahan. *Over departmentalization* misalnya, telah menimbulkan ego sektoral yang bermuara pada kerancuan perencanaan pembangunan dan pelaksanaan yang tidak mengenai sasaran. Proses koordinasi menjadi tidak berjalan, karena masing-masing departemen memiliki target sendiri yang menjadi ukuran prestasi mereka.

Kecenderungan lain adalah rumitnya formalitas, yang justru mereka bangun sendiri, telah mengakibatkan inefisiensi dalam pengambilan keputusan. Regulasi dibuat pada mulanya untuk menata sistem, namun karena saling terpisah menyebabkan berbagai produk perundang-undangan saling berbenturan satu sama lain. Pada akhirnya yang terjadi adalah melakukan pelecehan terhadap aturan itu sendiri.

Sepanjang mereka memperoleh manfaat dari keadaan demikian, maka perilaku seperti ini

ditolerir saja. Hasilnya adalah menaburnya kolusi dan korupsi di Indonesia. Secara spesifik dalam kancah perekonomian, ternyata banyak pula pejabat birokrasi pemerintah dengan dukungan mesin politiknya menguasai lisensi usaha. Kontradiktifnya muncul ketika penguasaan terhadap lisensi itu tidak mampu menilai dampak didirikannya suatu usaha bisnis masyarakat. Lisensi hanya menjadikan “mesin uang” para birokrat melalui perilaku kolusinya dengan aktor ekonomi. Para birokrat menjadi tidak mampu menilai apakah usaha itu layak dibuka dari kaca mata kesejahteraan rakyat. Kasus BMA, JRS, SC, dan perusahaan-perusahaan kayu yang membabat hutan Riau adalah buktinya.

Penilaian kritis terhadap birokrasi sebenarnya sudah lama didengungkan. Alvin W. Gaudener menggambarkan bahwa posisi birokrasi dalam sistem budaya industri cenderung infersonal dan koruptif. Oleh karenanya, menurut Jurgen Habermas, agar kedudukan birokrasi memiliki posisi yang berimbang, dalam perubahan sistem global dan era reformasi saat ini, maka peran mereka sebaiknya diorientasikan sebagai katalisator.

Menumbuhkembangkan sistem birokrasi sebagai katalisator memang tidak gampang. Selama Orba, polesan sistem birokrasi negara sangat sinis terhadap pemberdayaan rakyat. Slogan ke arah

kesejahteraan memang banyak muncul, tetapi realita yang dihadapi masyarakat jauh sekali berbeda dengan berbagai spanduk yang mereka pasang. Untuk mendudukkan penguasa menjadi pelayan bagaikan, “*Menarik Kambing ke Air*” atau “*Menghela Bambu Sunsang*.” Proses ke arah itu, nampaknya harus dimulai dengan menegakkan sistem pemerintahan rakyat yang berdaulat.

Untuk masa yang akan datang *reinventing goverment* di Indonesia mutlak untuk dilakukan. Rakyat tidak akan pernah berada pada posisi berdaya bila *bureaucratic crime* masih subur. Proses reposisi birokrasi memang akan memakan waktu, namun harus dilakukan secara konsisten dan bertahap. *Pertama*, pengembangan kualitas SDM aparat birokrasi agar profesionalisme mereka dapat ditingkatkan. Caranya tidak hanya melalui pendidikan tetapi juga dengan membangun sistem pengawasan secara terpadu. Termasuk peningkatan kesejahteraan dan sistem karir yang mampu meningkatkan motivasi mereka.

Kedua, memberdayakan DPR dan DPRD agar mampu menjadi penyeimbang dalam kebijaksanaan pembangunan. Wakil rakyat yang memiliki kepekaan terhadap aspirasi rakyat secara efektif akan menjadi kontrol para birokrat. *Ketiga*, *law enforcement* yang konsisten. Upaya ini dimulai dengan merevisi berbagai produk perundang-undangan rezim Orba

yang memang keberadaannya tidak memihak rakyat. Penegakan hukum harus pula didukung oleh independensi lembaga peradilan agar tangan-tangan birokrasi tidak menjadikannya sebagai lembaga stempel pengaburan makna hukum.

Keempat, merampingkan organisasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja efisiensi. Banyak departemen yang dapat digabung agar kebijaksanaan dapat terpadu. Termasuk pula melakukan swastanisasi terhadap berbagai institusi publik. *Kelima*, otonomi daerah yang tidak hanya sekedar retorika. Pelaksanaannya dimulai dengan pemberian wewenang terhadap institusi di daerah untuk menentukan kebijakan termasuk pemanfaatan SDA yang dimilikinya.

Keenam, mereposisi fungsi TNI dan Polri secara bertahap ke arah profesionalisme pertahanan dan keamanan rakyat. Keberadaan mereka dalam berbagai institusi, baik negara ataupun swasta harus dikurangi atau dihilangkan sama sekali. Termasuk dalam lembaga legislatif yang memang sangat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. ♦

RUMAH JADI, PAHAT BERBUNYI

(Dinamika Riau Pasca Otonomi Daerah)

Mengamati perjalanan dan dinamika politik yang terjadi di Riau sangat menggelikan sekaligus merisaukan. Kalaupun tak dapat dikatakan sangat memalukan. Reformasi dan momentum otonomi daerah, ternyata menghasilkan perilaku-perilaku politik yang di luar dugaan. “Terjangan” pada pemberdayaan rakyat, rupanya tidak hanya datang dari ketidakikhlasan pemerintah pusat melaksanakan otonomi daerah. Pemain-pemain politik lokal juga ikut memberikan andil yang besar bagi melencengnya pencapaian sasaran reformasi dan makna desentralisasi.

Pada tingkat provinsi, tergambar dari adanya dugaan *mark-up* dan manipulasi anggaran pembangunan dalam APBD. Persoalan ini terkuak justru setelah RAPBD disaring dan diteliti DPRD. Sepertinya, pekerjaan para wakil rakyat pantas disebut dengan istilah, “*Nasi masak, periuk pecah.*” Ada kesan terdapat “pengkaplingan” anggaran oleh

krasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Di Kabupaten Pelalawan malah ada calon yang tidak terpilih menjadi “merajuk”, karena telah termakan oleh janji-janji politik yang memang tidak manis. Dalam dunia nyata, politik memang sulit diidentifikasi, mana lawan dan mana kawan. Rakyat terperanjat karena angin politik yang berputar kesana kemari telah meluluhlantakkan supremasi keilmuan dan ketokohan seseorang.

Berbeda halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Natuna, Rokan Hulu, dan yang baru saja usai di Kuantan Singingi. Isu politik uang (*money politics*) merebak setelah pemilihan dilangsungkan oleh anggota dewan setempat. Di Natuna, ada calon yang sepertinya mengakui telah melakukan politik uang tersebut. Sayangnya yang bersangkutan tidak terpilih dan ingin membongkar adanya praktik uang itu di kalangan DPRD. Di Rokan Hulu malah saat ini, setelah bupatinya dilantik, beredar foto copy tanda terima uang oleh beberapa anggota DPRD. Bahkan ada anggota DPRD yang mengakuinya, hanya saja mengatakan itu sebagai pinjaman.

Lebih menggelitik lagi yang terjadi di Kuantan Singingi. Di kabupaten ini ada anggota DPRD yang malah bersedia menandatangani surat pernyataan telah menerima uang. Pernyataan tersebut kemudian dibantah lagi seolah-olah adanya pemalsuan.

Kejujuran dan kemunafikan “begelincu” (campurbaur) di sini. Masyarakat sepertinya dipancing untuk saling berseteru satu sama lain, tanpa menghiraukan lagi dampak negatif yang akan ditimbulkannya. Perilaku politik “kekanak-kanakan”, seperti dipertontonkan pada masyarakat Kuantan Singingi, yang kabarnya banyak memiliki SDM berkualitas. “Jor-joran” politik ingin dikembangkan lagi, meskipun pesta demokrasi telah dijalankan bersama. Kondisi ini sama dengan bak kata pepatah, “*Rumah jadi, pabat berbunyi.*”

Ternyata dari berbagai kasus di atas, tidak gampang memang untuk menciptakan suasana politik yang apik di Riau. Budaya politik yang seharusnya mengandung etika politik, di dunia nyata sepertinya “kusut masai”. Masyarakat menjadi semakin mudah terbuai oleh siapa yang berbicara, bukan oleh apa yang dibicarakannya. Orang gampang saja berjihad untuk seorang tokoh politik, bukan untuk kebenaran hakiki yang mampu dipresentasikan oleh tokoh tersebut.

Mencermati semua itu, mungkin ada baiknya direnungkan apa yang dikatakan oleh mantan Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) untuk Asia Pasifik yang sekarang menjadi *Chairman Deutsche Bank Asia-Pasific*, Hubert Neiss, yang menyatakan, “Secara ilmiah, jika perhatian semua orang beralih ke isu-isu politik, Anda tidak akan

wakil-wakil rakyat untuk kepentingan pribadi mereka. Bahkan mencuat pula persoalan 'Koperasi Dewan' yang ingin menguasai sejumlah kebun sawit dengan tanpa malu-malu mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Fenomena di tingkat kabupaten lebih memprihatinkan lagi, terutama pada kabupaten-kabupaten pemekaran yang disibukkan oleh pemilihan bupati defenitif. Rakyat sangat terkesima ketika di Dumai sempat terjadi berbagai keributan setelah berlangsungnya pemilihan walikota. Kejadian yang paling menghebohkan adalah persoalan pemilihan Bupati Kepulauan Riau. Peristiwa culik-menculik, bahkan sampai pada isu peledakan bom, menjadi tragedi yang memilukan hati masyarakat yang sebenarnya sangat ingin berubah kehidupannya menjadi lebih sejahtera dan damai dibandingkan sebelum adanya otonomi daerah.

Lain lagi kejadiannya di Kabupaten Karimun. Isu pemalsuan ijazah oleh wakil bupati terpilih menguak setelah DPRD selesai melaksanakan pemilihannya. Persyaratan untuk dipilih, baru diteliti setelah proses pemilihan dilakukan. Tuntutan untuk mengulang pemilihan dimunculkan setelah sebelumnya proses demokrasi diselenggarakan secara kidmat. Energi yang sudah terkuras sebelumnya harus dikumpulkan kembali dan diarahkan untuk mementahkan ulang semua proses demo-

memiliki energi tersisa lagi untuk mendorong reformasi ekonomi". Pernyataan ini perlu diresapi secara arif oleh para politisi lokal kita, baik tingkat provinsi maupun kabupaten.

Secara ekonomi Indonesia sudah "karam" dan Riau hendaknya jangan sampai ikut tenggelam. Begitu banyak agenda penting yang secara konkret harus dikerjakan masyarakat Riau untuk menegakkan marwahnya di kemudian hari. Bukankah petuah, "*Takkan Melayu Hilang di Bumi*" masih menjadi pegangan kita? Oleh karena itu, energi yang masih ada sebaiknya diimplementasikan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang selama ini telah terkuras oleh kezaliman masa lalu. Semua itu tidak mungkin diperoleh dengan mempertontonkan perilaku-perilaku politik yang centang-perenang.

Perhatikanlah, begitu banyaknya bayi-bayi di Riau yang masih Kekurangan Energi Protein (KEP) dan 43,6% masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan. Berpalinglah pada 76,4% masyarakat yang hanya berpendidikan SD ke bawah dan hidup secara sub-sistem di pedesaan. Mereka terhimpit oleh desakan para konglomerat yang meluluhlantakkan tanah ulayatnya. CPP Blok belum di tangan dan 105.000 hektar kebun sawit eks Salim hengkang ke Malaysia. Pasir laut dikuras untuk kepentingan Singapura. Hutan terkelupas

dari kulit bumi, jalan bergelombang “dilunyek” truk kayu balak.

Mata masyarakat Riau terbelalak dengan jari yang menggenting. Kesengsaraan belum menunjukkan tanda usai. Para “panutan” membingkai diri dengan jargon-jargon reformasi. Mereka tak lagi pantas untuk diturut dan dirujuk. Bak anak ayam kehilangan induk, rakyat mencari justifikasi menurut selera sendiri. Tak ada yang menyusun, tak tiba yang menuntun. Harapan tergantung tak bertali. Angan melambung, kenyataan terhempas bagaikan cermin dibanting ke cadas.

Ke depan, seharusnya tekad makin dibulatkan, semangat kian dinyalakan, kerjasama dieratkan, dan sikap pantang menyerah diteguhkan. Bagaimanapun, Riau masih punya harapan. Momentum tetap masih ada. Dan, ikatan kemelayuan masih bisa dirajut, yang bila apik akan berbinar bagaikan sulaman gaun perempuan. Nurani masih bisa diajak kompromi dan SDA kita masih tersisa. Hanya saja waktu memang tidak pernah mau menunggu. ♦

CONDONG MENONGKAT, REBAH MENEGAKKAN

(Fenomena Penyusunan Anggaran Proyek Strategis di Riau)

Saat ini Riau sedang disibukkan oleh melimpahnya dana dari berkah desentralisasi fiscal yang diberlakukan di Indonesia sejalan dengan semangat otonomi daerah. Bermanfaatkah uang tersebut masih dalam perdebatan yang panjang? DPRD sebagai pemegang otoritas yang tinggi dalam menentukan sah tidaknya APBD sering dituding tidak lepas dari berbagai kepentingan, baik politik maupun pribadi dalam penyusunannya. Eksekutif sebagai pelaksana dari APBD yang disahkan oleh legislatif oleh berbagai pengamat malah memanfaatkan situasi tersebut untuk kepentingan mereka pula. Maka di Indonesia saat ini, baik secara nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota) semakin akrab dengan istilah *legal corruption*.

Melalui “kesepakatan” atau dalam istilah yang lebih mentereng di kalangan gerakan rakyat “kolusi”, antara eksekutif dan legislatif APBD

disahkan dengan berpedoman kepada mengkomodir berbagai kepentingan keduanya. Sepanjang kepentingan-kepentingan tersebut dapat ditampung dalam APBD maka suasana aman relatif dapat diciptakan. Namun sudah menjadi sifat manusia bahwa perasaan puas sulit diperoleh dan keinginan untuk “menggerogoti” sering lebih dominan ketimbang kesadaran akan manfaat bersama.

Akibatnya, warna-warna rakus mulai menguak dan perjuangan untuk kepentingan kelompok dan pribadi lebih didahulukan sehingga timbullah berbagai perbedaan pendapat yang signifikan. Bahkan bentuknya sudah mengarah pada “jor-joran”, saling sikut, dan adu argumentasi yang bila dikaitkan dengan kepentingan kesejahteraan rakyat sangat tidak mengena sama sekali. Dasar berpijak yang digunakan bukan lagi azas manfaat kepada rakyat melainkan hasrat untuk mengkapling anggaran. Prinsip *money follow the function* dalam penyusunan anggaran pembangunan telah terbalik “fungsi mengikuti uang”. Ada uang lalu dibuat-buatlah program untuk dikerjakan. Perencanaan pembangunan menjadi tidak holistik dan berpijak pada pemecahan masalah-masalah masyarakat yang sesungguhnya. Seharusnya programlah yang disusun sebagai alternatif pemecahan masalah rakyat dan dilanjutkan dengan kegiatan yang harus

dilakukan dalam mengimplementasikan program baru ditentukan besarnya dana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mungkin karena prinsipnya sudah terbalik maka tidak pernah ada sisa dari berapa pun besarnya uang yang datang ke Riau saat ini. Semua uang menjadi terkuras untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Baik di provinsi maupun kabupaten yang terjadi bukannya sisa anggaran karena kelebihan uang, tetapi sisa uang karena luncuran proyek yang tidak mampu dikerjakan secara tuntas pada tahun yang bersangkutan. Hal ini timbul karena lambatnya pengesahan APBD dan sering terjadi karena ketidakmampuan kegiatan tersebut untuk dilaksanakan.

Berbagai kegiatan seperti itu pada tahun 2002 lalu di Provinsi Riau makin terkuak. Berdasarkan pantauan DPRD sendiri malah ada beberapa proyek yang sudah dikucurkan dananya namun tidak sebatang besipun ada terpancang dilokasinya. Artinya kemajuan pengerjaan dari dana yang telah dikucurkan nol sama sekali. Padahal proyek tersebut dianggap sebagai proyek strategis. Beberapa kegiatan lainnya mengalami hal yang tidak jauh berbeda. Fenomena proyek strategis ini memang menarik untuk disimak. Selain tidak jelas dasar penetapan dan cara pandang yang digunakan dalam mengkategorikan suatu kegiatan

atau proyek itu strategis atau tidak substansi dan mekanisme pelaksanaannya pun tidak kalah serunya untuk didiskusikan.

DPRD Provinsi Riau sepertinya makan buah simalakama. Maju kena mundur pun kena. Dulu tahun 2002 telah menyetujui akan dibangunnya beberapa proyek strategis, tetapi nampaknya tidak melengkapi persetujuannya dengan mekanisme yang harus ditempuh dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dianggap strategis tersebut. Pendekatan apa yang harus digunakan tidak dirinci dengan tegas sehingga eksekutif menterjemahkannya sesuai selera mereka. DPRD selanjutnya saling tuding dan berbeda pendapat. Padahal seharusnya ketidakbecusan yang terjadi di lapangan hanya dapat ditentukan dari ketidaksesuaian rencana dengan kenyataan yang terjadi. Bukan berdasarkan selera orang perorang atau selera politik partai.

Sebenarnya pendekatan multiyears dalam pembangunan ada dua cara, yakni pembayaran di muka dan pembayaran di belakang. Dalam pelaksanaan pembangunan proyek strategis di Riau nampaknya cara pembayaran di belakang yang dipakai. Untuk itu perlu kiranya ditetapkan sampai tahun berapa pemerintah akan melunasi pembayarannya dan jumlah yang harus dibayarkan setiap tahunnya diserahkan kepada DPRD untuk diang-

garkan dalam APBD. Pelaksana proyek diwajibkan menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang disepakati. Pembayaran dilakukan “berbilang tahun” sampai batas waktu yang disepakati. Jumlahnya setiap tahun sebaiknya ditentukan pada awal pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu DPRD dan Pemprov serta pelaksana pekerjaan seharusnya membuat perjanjian terlebih dahulu tentang lamanya waktu pengerjaan, lamanya tahun pembayaran dan besarnya anggaran, baik secara keseluruhan maupun angsuran setiap tahunnya. Penyesuaian setiap tahun dapat saja dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Bisa lebih dari yang disepakati sebelumnya bisa juga kurang. Namun penentuannya dilakukan secara transparan dan atas dasar kesepakatan bersama dan kualitas serta kemajuan pengerjaannya.

Melalui cara itu maka diharapkan isu-isu “pembabatan” anggaran proyek strategis maupun “pembengkakannya” dapat dihindarkan dari kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, dan apalagi kepentingan politik partai menghadapi pertarungan suksesi kepemimpinan Riau 2003 dan Pemilu 2004. APBD sebaiknya memang lebih diarahkan pada hal-hal yang bersifat strategis dalam menyelesaikan permasalahan Riau dan kepentingan eksistensinya di masa yang akan datang. Untuk itulah semakin diperlukan kehati-

Kedokteran memang dan peralatan yang akan mengisinya diperlukan dana mencapai Rp 53,6 milyar? Apakah untuk Proyek Sinkronisasi dan Integrasi Program Pembangunan Bidang SDM Provinsi Riau memang diperlukan mencapai Rp 1,983 milyar? Begitu rumitkah melakukan sinkronisasi dan integrasi antar program sehingga memerlukan dana sebanyak itu dan bagaimana pula cara yang akan dilakukan dalam melakukannya? Apakah Proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana pada instalasi teknis Dinas Perikanan dan Kelautan Riau dengan dana mencapai Rp 3,750 milyar memang terkait dengan Program Pembangunan Ekonomi Rakyat?

Banyak lagi pertanyaan yang dapat dilayangkan dalam anggaran yang diajukan pemerintah dan mampukah DPRD mensikapinya secara arif dan bijaksana terutama bila dikaitkan dengan aspek efisiensi dan efektivitas anggaran serta kinerja yang akan dihasilkan jika anggaran tersebut disetujui. Perlu kiranya diingat bahwa kegagalan menyusun sebuah rencana sama saja dengan merencanakan kegagalan. Rakyat sangat berharap adanya perbaikan kehidupan mereka yang seharusnya dapat distimulus melalui anggaran pengeluaran pemerintah namun bila pemerintah dan penyelenggara negara hanya “menabur” luka hati rakyat maka khawatir akan “menuai” prahara. Mungkin

hatian dalam memanfaatkan setiap rupiah dana yang dimiliki. Prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu dikedepankan agar semua informasi yang ada dalam perencanaan anggaran dapat terukur dan dipertanggungjawabkan dengan jelas dan tegas. Dalam hal ini bukan saja jenis kegiatan dan besarnya anggaran yang harus diketuk palunya, tetapi juga mekanisme dasar pelaksanaannya sehingga tidak menimbulkan kerancuan di kemudian hari. Termasuk tujuan dan sasarannya serta manfaat yang bakal diperoleh masyarakat dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Aspek lain adalah menyangkut disiplin anggaran yang berkait dengan persoalan efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan kesesuaiannya dengan kondisi di lapangan. Apakah mematok anggaran rutin mencapai setengah trilyun lebih memang sudah efisien dan tepat guna? Anggaran Gubernur mencapai Rp 4,046 milyar pertahun dan anggaran belanja lain-lain DPRD mencapai Rp 9,327 milyar pertahun memang merupakan kondisi yang sesuai dengan apa yang seharusnya. Apakah belanja barang di Sekretariat Daerah (Sekda) memang harus mencapai Rp 15,067 milyar setiap tahunnya? Apakah untuk mengadakan satu unit peralatan labor pada sebuah SLTP memang mencapai Rp 180 juta? Apakah untuk melahirkan sebuah Gedung Fakultas

sekaranglah saatnya kita meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi kesejahteraan masyarakat Riau. Para pemimpin hendaklah makin menyadari bahwa merekalah yang seharusnya membantu rakyat yang sedang dalam kesusahan. Bak istilah, “*Condong yang akan menongkat, rebah yang akan menegakkan*”, bukan menjadikan rakyat sebagai objek yang malah harus dihisap dan ditelantarkan. ♦

BIAR BERPUTIH TULANG DARIPADA BERPUTIH MATA

(Polemik Dana Alokasi Umum untuk Riau)

Sedari awal, proses desentralisasi memang memiliki dua kutub yang saling tarik-menarik. Salah satu sisinya adalah pemerintah pusat yang menampilkan wajah tak ikhlas, gamang dan tak ingin kekurangan kuasa dan uang. Selama ini, mereka memang *remote control* bagi apapun yang akan dan harus dilakukan di Indonesia. Di sisi lainnya, pemerintah dan masyarakat daerah dengan segunung harapan, dan (sayangnya) sering terkontaminasi oleh eforia dan ego kedaerahan.

Tarik menarik kedua sisi ini, selalu melahirkan kebijakan yang tidak optimal pada penyelenggaraan negara dengan menerapkan otonomi daerah. Salah satu contoh konkretnya adalah menyangkut soal desentralisasi keuangan (*fiscal decentralization*). Konsep *revenue sharing* ini merupakan prasyarat mutlak bagi dilakukannya desentralisasi kewenangan. Hanya saja dalam implementasinya, mulai dari sistem perundang-

undangan yang mengaturnya sampai kepada eksekusinya, memiliki banyak jebakan yang berakibat pada adanya distorsi.

Pemberlakuan UU No. 25/1999 ternyata menimbulkan implikasi yang besar bagi munculnya benih-benih disintegrasi bangsa. Maklumlah, jika sudah bicara soal uang, manusia cenderung lupa bahwa itu sangat tipis jaraknya pada hal yang berbau maksiat. Dari kaca mata pemerintah pusat, UU No. 25/1999 adalah kebebasan yang diberikan pada daerah untuk melaksanakan pembangunan dari dana yang bersifat *block grant*, tetapi harus tetap dalam pemantauan dan pembinaannya.

Keleluasaan yang dimaksud pemerintah pusat hanya diletakkan pada penentuan prioritas dan melihat aspek penyelesaian masalah yang paling dekat dengan rakyat di daerah tertentu. Daerah tidak pernah diberi kesempatan untuk maju dan menikmati sumber-sumber yang dieksploitisir di wilayahnya. Padahal, pemerintah daerahlah yang paling tahu dan mengerti kondisi objektif di daerahnya. Oleh karena itu, sudah selayaknya daerah diberi kebebasan menentukan akan dibawa ke mana anak daerah tersebut, meskipun masih tetap dalam bingkai negara kesatuan.

Dalam bahasa sederhana, perseteruan dua kutub tadi dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat tak ingin kehilangan muka dan pundi-pundi

uang yang selama ini menjadi ajang penggrogotannya. Sedangkan bagi daerah, tidak ada masanya lagi menjadi “terjajah” oleh bangsa sendiri. Pada akhirnya, kedua kutub tersebut telah berkembang menjadi perang terbuka. Masing-masing memainkan trik dan strateginya. Indikasi yang paling menonjol dapat kita lihat pada polemik mengenai Dana Alokasi Umum (DAU).

Sulit Ngocor

Kesalahan konsep desentralisasi fiskal di Indonesia adalah penetapan pola alokasi keuangan. Terdapat empat sumber penerimaan keuangan daerah dalam UU No. 25/1999, yakni Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah yang diatur melalui undang-undang tersendiri. Dalam prakteknya, baik pusat maupun daerah dibuat pusing oleh aturan ini dan selalu tidak terdapat kesamaan pandangan antara pemerintah pusat dengan daerah.

Pertama, bagi hasil SDA dan pajak ternyata tidak mudah dilakukan. Perbedaan persepsi muncul terhadap berapa sebenarnya penerimaan daerah dari eksploitasi SDA tertentu di suatu wilayah. Termasuk adanya perbedaan peta wilayah SDA dengan peta wilayah administrasi pemerintahan. Ego departemen juga menjadi pemicu sulitnya penerapan sistem ini. Konon khabarnya

sampai bulan Desember 2001 ini dana PSDH belum dapat dibagi ke daerah, karena Departemen Kehutanan tidak bersedia mengeluarkan SK mengenai alokasinya ke daerah, sehingga Departemen Keuangan tidak bisa mendistribusikan dana tersebut kepada daerah. Apa yang sudah menjadi hak daerah, ternyata belum bisa dinikmati sebagaimana mestinya.

Persoalan ini memancing adanya pengkapolingan, pemblokiran, pengambilan sepihak oleh daerah (seperti PT Semen Padang) yang pada akhirnya mampu memicu disintegrasi bangsa. Dapat dibayangkan, jika masyarakat Riau dan Kaltim berjibaku untuk lebih, "*Berputih tulang dari pada berputih mata*" terhadap Migas yang dieksploitasi di daerahnya. Oleh karenanya, jangan lagi berharap negara Indonesia ini akan ada. Akan sulit menata kembali sebuah bangunan Indonesia, bila pada akhirnya muncul "Solidaritas Sumatera" untuk membentuk negara sendiri dalam bentuk Negara Federasi Sumatera (NFS). Kalaupun akan diredam oleh pemerintah Jakarta, biayanya tentu akan sangat mahal. Apalagi dalam kondisi yang terpuruk saat ini.

❁ *Kedua*, DAU yang semula akan dijadikan sebagai alat penyeimbang, ternyata dalam praktiknya malah menjadi alat akal-akalan pusat untuk tetap mencecoki daerah. Formulasi untuk alokasi

dana ini sangat tidak memuaskan daerah, karena dinilai mengandung unsur “penipuan”. Dana bagi hasil SDA dan PAD malah dijadikan variabel yang amat mengganggu bagi kepentingan daerah. Belum lagi trik-trik tersembunyi dalam formulasi tersebut yang diduga hanya menguntungkan wilayah-wilayah tertentu dan kurang memahami kebutuhan pembangunan wilayah yang selama ini tertinggal, tetapi menjadi penopang pendapatan negara.

Ketiga, bagi hasil pajak dan klasifikasi pajak di Indonesia dinilai sangat tidak adil. Pajak dengan potensi yang “gemuk” menjadi hak pusat, sedangkan yang potensinya “bincit” menjadi sumber PAD. Akibatnya, daerah-daerah berlomba-lomba menciptakan Perda untuk menggenjot PAD. Sampai-sampai kuburan pun “dicukaikan”. Saat ini diduga ada ribuan Perda di Indonesia yang dianggap bermasalah dan menjadi penyebab *high cost economy*. Semua itu muncul akibat kengangan pemerintah pusat untuk berbagi dengan daerah dan menggebu-gebutnya pemerintah daerah untuk mendapatkan dana sesuai kewenangan yang telah dilimpahkan kepada mereka.

Selanjutnya mekanisme penyaluran danan dari pusat ke daerah salurannya juga cukup panjang. Jangankan ngocor, tetesannya pun sangat tersendat-sendat, akibat jalan berliku yang dilaluinya. Semua penerimaan negara di daerah harus

dikumpul (*pool*) dulu ke pusat, baru nanti ditetaskan ke daerah. Padahal rumus baginya sudah ada dalam undang-undang. Cara seperti ini ternyata masih menjadi penyebab adanya dana yang tetap nyangkut di Jakarta dan disinyalir untuk menurunkannya ke daerah masih dibutuhkan “upeti” tertentu.

Waktu untuk mendapatkan dana tersebut selalu saja tidak dapat disinkronkan dengan jadwal pelaksanaan pembangunan yang sudah direncanakan di daerah. Kondisi ini memberi peluang bagi munculnya proyek-proyek karbitan pada tingkat lokal. Berbagai trik atau akal-akalan pusat untuk menutupi ketidakmampuannya membawa bangsa ini keluar dari krisis, kesulitan memperoleh pendapatan dan membengkaknya cicilan hutang dan bunganya. Oleh karenanya, kucuran dana ke daerah harus dikurangi.

Diduga Bocor?

Isu pertama yang dilontarkan pusat untuk menjustifikasi keengganannya untuk melakukan otonomi dan desentralisasi fiskal adalah melontarkan keinginan menjual obligasi pemerintah kepada daerah-daerah yang dinilai memiliki surplus keuangan. Skema ini diduga dapat mengatasi adanya defisit anggaran. Hanya saja hutang negara kepada anak bangsanya sendiri semakin membeng-

kak, setelah negara ini digadaikan pada pihak asing dengan melakukan pinjaman luar negeri yang tidak diketahui manfaatnya.

Rencana ini tentu saja ditentang oleh daerah, karena kepercayaan daerah terhadap pusat mulai minim. Sekarang saja pemerintah telah mengeluarkan obligasi untuk rekapitulasi perbankan sebanyak Rp 656 triliun yang dikelola oleh *Debt Management Office* (DMO) di bawah Departemen Keuangan. Jumlah ini diperkirakan mengalami peningkatan sejalan dengan dikeluarkannya obligasi kepada daerah sebagai konversi dana perimbangan menjadi sangat tidak menarik. Belum lagi persoalan hutang swasta yang jumlahnya mencapai Rp 604 triliun. Beban yang ditanggung oleh perekonomian Indonesia sudah mencapai Rp 1.951 triliun atau telah melampaui PDB 2001 yang hanya Rp 1.468 triliun.

Isu kedua yang lebih spesifik diarahkan ke Riau adalah soal penyewaan pulau untuk membayar hutang negara. Dari beberapa pulau yang tidak berpenghuni di Riau, yang letaknya sangat strategis diperkirakan dapat diperoleh sewa yang cukup besar, sehingga digunakan untuk membayar hutang negara. Rencana kebijakan ini langsung ditentang oleh Gubernur Riau. Beberapa komponen masyarakat menilai, ini merupakan kebijakan yang menginjak-injak marwah Riau. Meskipun

masih terdapat beberapa orang yang mencoba mencari manfaatnya untuk mengejar Visi Riau 2020, namun kebijakan ini dianggap kurang populer dan sulit diterapkan.

Isu terakhir yang kemudian menjadi isu yang sangat kontroversial adalah dengan bocornya DAU di tingkat daerah yang mencapai angka 40% lebih. Tidak tanggung-tanggung, sinyalemen ini dilontarkan langsung oleh Ketua Panitia Anggaran DPR RI. Tentu saja banyak orang tersentak, termasuk Menkeu dan Mendagri. Reaksi dari daerah pun bermunculan untuk menangkisnya. Persoalannya, jika berita itu benar, maka dari Rp 60,5 triliun DAU Tahun 2001 kebocorannya adalah mencapai Rp 24,2 triliun. Suatu jumlah yang tidak kecil tentu.

Khusus untuk Provinsi Riau, dari Rp 251 miliar DAU yang diperolehnya, maka angka dugaan kebocoran 40% itu nilainya mencapai Rp 100,4 miliar. Jumlah ini jauh lebih besar dari dana yang direncanakan untuk digulirkan dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat yang hanya sebesar Rp 77 miliar. Total DAU yang diterima Riau melalui 15 kabupaten pada tahun 2001 adalah sebesar Rp 2.267,15 miliar ditambah dengan dana bagi hasil sebesar Rp 4.081,15 miliar, maka Riau memperoleh kucuran dana mencapai Rp 6.348,30 miliar. Tanpa perencanaan dan manajemen pengelolaan dana yang matang dan profesional, tentunya sangat

wajar bila dugaan kebocoran menjadi mengemuka.

Bila diamati alokasi pemanfaatannya dalam APBD, maka pada level Provinsi Riau dugaan kebocoran dana DAU belum tentu memiliki landasan yang kuat. Sesuai dengan kepentingannya, DAU diperuntukkan bagi membayar gaji PNS dan menutupi kebutuhan rutin lainnya. Jumlah pegawai yang harus dibayar gajinya oleh Pemprov Riau, setelah adanya pelimpahan pegawai pusat mencapai 4.897 orang. Jika dimasukkan anggota keluarga, yang harus diberikan tunjangan oleh negara, jumlahnya mencapai 15.498 orang.

Total belanja rutin Pemprov Riau untuk tahun 2001, yang tercantum dalam Keputusan Gubernur No. KPTS 87/III/2001 adalah sebesar Rp 342.121.428.243, yang terdiri dari sembilan jenis pengeluaran. Pengeluaran terbesar adalah untuk belanja pegawai, yakni Rp 110.715.006.723 diikuti oleh belanja barang Rp 78.203.410.720, dan biaya lain-lain sebesar Rp 44.030.839.550 serta biaya pemeliharaan Rp 11.996.242.000. Termasuk biaya perjalanan dinas yang jumlahnya mencapai Rp 9.590.893.000.

Jika dibandingkan dengan penerimaan dari DAU yang berjumlah Rp 251.940.940.000.000 untuk menutupi kebutuhan rutin dimaksud, maka masih terdapat ketekoran yang mesti ditutupi dengan sumber penerimaan lain sebesar Rp

90.181.428.243. Lantas pertanyaan yang muncul; darimana sumber adanya dugaan kebocoran dana yang diperkirakan mencapai 40% tersebut?

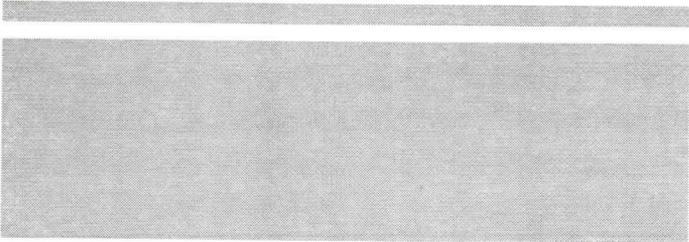
Bila diamati secara mendalam seluruh pos pengeluaran rutin mulai dari keperluan DPRD, gubernur dan wakil gubernur, serta seluruh dinas dan instansi serta berbagai pengeluaran lainnya sampai pada pengeluaran yang tak terduga, mungkin dugaan bocor tersebut bisa ditimbang benar atau tidaknya. Namun, kini sudah menjadi gunjingan bahwa selama ini pos keperluan DPRD sangatlah fantastis! Di mana untuk tahun 2001 saja mencapai angka sebesar Rp 31.546.220.750. Untuk kebutuhan gubernur dan wakilnya, jumlahnya mencapai Rp 5.295.500.000 dan pejabat-pejabat lainnya. Seluruh kebutuhan mereka ditanggulangi oleh negara, baik langsung maupun tidak langsung.

Adakah kemungkinan penghematan terhadap seluruh jenis pengeluaran tersebut? Bila diperhatikan kesembilan jenis pengeluaran rutin Provinsi Riau, maka tidak mustahil bila penghematan mencapai 40% tersebut dapat dilakukan. Biaya perjalanan dinas dan belanja barang bisa saja ditekan seefisien mungkin. Sebab, dalam anggaran pembangunan kedua jenis biaya ini sudah ada. Ketiga item biaya ini, selain berindikasikan tumpang-tindih dan berulang-ulang setiap tahunnya, juga disinyalir berbau *mark up*.

Penghematan 40% dari seluruh pengeluaran rutin ini jumlahnya mencapai Rp 136.848.571.097. Jika jumlah itu dilarikan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat dan pengembangan SDM, tentunya upaya mengejar Visi Riau 2020 akan lebih mudah. Hanya saja, semua itu tentu harus ditenggarai dengan melakukan analisa belanja dan kebutuhan anggaran yang akurat, sehingga penilaiannya tidak menimbulkan bias makna dan persengketaan. Pendekatannya harus diletakkan pada prioritas, kepatutan, mutu, manfaat, dan kemampuan mengantisipasi resiko masa mendatang. ♦

BAGIAN 4

**DINAMIKA
SOSIAL-
EKONOMI RIAU
PASCA
REFORMASI**



NAHKODA LENGAH, BAHTERA BERKECAI

(Ketimpangan Ekonomi Masyarakat Riau)

Kegetiran yang dialami masyarakat Riau nampaknya belum jua beranjak. Masyarakat miskin di Riau yang jumlahnya mencapai 43,8%, rupanya belum jua dapat menikmati berkah dari kehadiran otonomi daerah dan limpahan rezeki desentralisasi fiskal. Kondisi ini terungkap dari data yang dirilis BPS Riau dalam sebuah diskusi akhir tahun yang diselenggarakan *Institute of Public Interest and Regional Development (INSPIRED)*. Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Riau mencapai 10,2%, tetapi tahun 2001 diperkirakan hanya tumbuh 7,8%. Padahal, semenjak otonomi, dana pemerintah yang mengucur ke Riau mencapai Rp 78 triliun lebih. Dana sebesar itu justru tidak menunjukkan adanya perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi, yang terjadi justru keadaan sebaliknya.

Bila dikaitkan dengan aspek pemerataan, kenyataan pahit dan memilukan ini makin mengguncang dada. Jika dikeluarkan peranan migas dan

kontribusi Pulau Batam, maka bagian yang dinikmati masyarakat hanya tinggal 31%. Itu pun masih termasuk bagian dari sub-sektor kehutanan, perkebunan, jasa, dan angkutan. Sektor ini justru lebih banyak dinikmati oleh sekelompok orang saja. Bila penduduk Riau yang 42,46% di antaranya bekerja di sektor pertanian, maka paling banyak yang dapat mereka nikmati dari pertumbuhan ekonomi yang melambat tadi hanya berkisar 10%. Jumlah mereka dengan tingkat pendidikan SD ke bawah yang mencapai 63%, tentunya tidak akan mungkin menikmati “kue” ekonomi secara lebih besar. Seolah rakyat Riau sudah jatuh tertimpa tangga pula.

Berdasarkan pengamatan BPS Riau, pertumbuhan ekonomi yang demikian dapat terjadi hanya ditopang oleh pengeluaran pemerintah (*government expenditure*). Artinya, hanya konsumsi pemerintah yang membuat ekonomi itu bergerak. Sedang ekspor dan investasi swasta belum. Sayangnya, dari dana Rp 7 triliun yang diperkirakan masuk ke Riau sebagai pengeluaran pemerintah yang melalui BPD hanya sekitar Rp 3 triliun. Ini berarti, ada penguapan sebesar Rp 4 triliun lebih. Menyakitkan, dana sulit pula membuktikannya.

Rapor buruk ini, bila tetap diabaikan, maka memasuki tahun 2002 permasalahan akan bertambah besar. Pemberdayaan ekonomi rakyat

sebagaimana digembar-gemborkan, ternyata tidak menunjukkan perkembangan yang berarti. Dari Rp 75 miliar dana yang dianggarkan, ternyata hanya Rp 8 miliar yang terealisasi. Ini berarti, kinerja pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan modal murah hanya mencapai 10,7% saja.

Lantas, masih adakah harapan di tahun 2002 mendatang? Bila diamati besarnya hutang luar negeri yang jatuh tempo sekitar bulan Mei 2002, implikasinya ke daerah adalah tidak mengucurnya dana perimbangan. Paling banter pemerintah pusat hanya menurunkan dana sesuai kebutuhan pembayaran gaji saja. Itu pun akan sangat disesuaikan dengan standar yang telah mereka tentukan. Keleluasaan untuk mematok keperluan anggaran sudah akan didasarkan pada standar belanja yang ketat.

Bagi Riau, saat-saat kritis akan datang perlu kiranya dicermati secara arif. Masyarakat miskin yang sudah mampu mendapat informasi, namun belum dapat menterjemahkannya secara baik, akan mulai gerah dengan kondisi yang menghimpit. Bahkan pernik-pernik itu sudah mulai terlihat dari munculnya kerusuhan-kerusuhan massal dan perkelahian antara etnik.

Harapan membaik tetap saja ada, bila momentum otonomi daerah dan terbukanya peluang pasar asing dapat dimanfaatkan dengan baik. Riau harus mengarahkan pembangunannya secara ter-

fokus pada masyarakat lapis bawah. Konsumen lokal harus diangkat daya belinya melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Setiap pimpinan daerah harus jeli melihat mana sektor-sektor unggulan yang paling banyak terkait dengan kehidupan masyarakat. Bila ini tidak tersentuh, maka ketimpangan akan tetap tinggi dan kerawanan tetap akan menghantui.

Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, disiplin anggaran yang makin mengedepankan manfaat daripada sekedar menghabiskannya. Untuk ini, skala prioritas harus lebih diperketat ke arah perbaikan ruang gerak ekonomi masyarakat, ketimbang membangun “istana-istana megah” yang hanya dapat dilihat rakyat dengan perut yang melilit kosong.

Kedua, efisiensi yang berpijak pada kinerja dan produktivitas, sehingga setiap dana yang dikeluarkan mampu menjadi pendorong Bergeraknya kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi ini bisa diterapkan, bila pemerintah daerah mampu menemukan titik-titik yang dapat memicu perbaikan ekonomi rakyat dan menstimulus dinamikanya, sehingga mereka terpacu untuk berkembang.

Ketiga, kemampuan men-*direct* semua sumber-sumber secara holistik dan tepat. Jangan sampai ada kebijakan yang bersifat parsial dan tidak punya kait kelindan satu sama lain. Keberhasilan dalam

melakukan koordinasi memang sangat tergantung pada siapa yang memegang komando. Masing-masing unit yang berfungsi sebagai penggerak, maupun penopang keberhasilan pencapaian kinerja harus tidak hanya mampu bekerjasama, tetapi juga harus dididik untuk dapat sama bekerja.

Keempat, pengawasan yang kontinyu yang dilandasi oleh kepentingan melakukan koreksi di masa yang akan datang. Bila tidak, mental-mental birokrasi yang korup selama ini, tetap saja akan meng-hantui keberhasilan pembangunan. *Nakhoda lengah, bahtera bisa berkecai*. Lebih parahnya lagi, jika malah nakhodanya yang lebih berasyik ria melakukan pembocoran kapal.

Berpegang pada keempat arah kebijakan tersebut, Riau akan mampu menjadikan tahun 2002 ini sebagai tahun dasar dalam proses menuju Visi Riau 2020. Tidak perlu harus bernafsu mengejar pertumbuhan yang tinggi, tetapi ketimpangan makin menganga. Dalam proses yang wajar, ekonomi Riau dapat saja tumbuh mencapai 7,5% tahun 2002, asal perbaikan kebijakan diarahkan pada titik-titik yang selama ini menjadi faktor pengganggu.

Namun, beberapa faktor pengganggu harus juga diantisipasi. Beberapa perusahaan-perusahaan besar yang mungkin akan mengalami kesulitan menghadapi gejolak ekonomi 2002, perlu di-

waspada agar tidak menjadi pemicu konflik horizontal, baik terbuka maupun secara tersembunyi.

Bila kerusuhan terjadi, maka alasan untuk tidak memenuhi kewajiban pada negara dan kreditor sangat mungkin dilakukan. Pemilik perusahaan dapat melenggang kemana-mana, sementara rakyat berantuk satu sama lain. Hasil kerja yang dicapai selama ini akan hancur sia-sia. Ini berarti, kata kunci untuk menapaki tahun 2002 adalah kerja keras, hemat, dan selalu waspada. ♦

LUBUK AKAL TEPIAN MANDI

(Perebutan Lahan Perpustakaan Daerah untuk Bank Riau)

Salah satu ajaran yang pernah dikemukakan pemimpin besar China, Mao Tse Tung adalah bagaimana pentingnya ilmu pengetahuan didalami. Dalam ajarannya kepada rakyat China salah satu yang disampaikannya strategi menaklukkan musuh. Bila ingin menghancurkan suatu negara dengan segala peradabannya maka satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah menghancurkan perpustakaan dan laboratorium yang ada di negara tersebut.

Pada sisi yang berlawanan, ajaran ini secara filosofis mengandung makna, majunya suatu bangsa dengan peradaban yang dapat diandalkan sangat tergantung pada berkembangnya ilmu pengetahuan dan adanya pusat-pusat penggalian ilmu yang memadai. Belajar dari sejarah China masa lalu itu, maka imbalan antara temuan-temuan teknologi dan aspek-aspek kemanusiaan sebagaimana dikembangkan Adam Smith menjadi penting bagi kepentingan kemakmuran bangsa China mendatang.

Sejarah Jepang setelah diluluhlantakkan bom atom di Hiroshima-Nagasaki, menunjukkan bukti bahwa kebangkitan masyarakat Jepang hanya bisa diperoleh melalui penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan. Ada dua cara yang ditempuh Jepang, yakni menyekolahkan warganya ke berbagai perguruan tinggi ternama di seantero dunia dan menterjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan dan menyebarkannya kepada masyarakat untuk dibaca dan dipahami. Transfer iptek terlaksana berkat fungsi dan peranan perpustakaan yang efektif dan optimal melayani masyarakat yang haus akan rasa ingin tahu dan memiliki motivasi tinggi untuk berkreasi dan manut terhadap peran kedisiplinan serta norma-norma kemanusiaan yang hakiki.

Malaysia yang dulu banyak berguru ke Indonesia memacu kemajuan masyarakatnya dengan pendidikan yang memadai. Perguruan tinggi yang dulunya banyak diisi oleh para dosen dari Indonesia kini ditempati oleh kader-kader muda yang berpendidikan doktor lulusan dari berbagai manca negara. Masyarakat Indonesia malah banyak yang saat ini menuntut ilmu ke sana. Setiap negara bagian mengembangkan pendidikan tinggi yang berupaya memenuhi taraf internasional. Tidak saja dengan tenaga pengajar yang berpendidikan baik dan gaji yang cukup, tetapi dengan perangkat-perangkat teknologi yang canggih. Bila masuk di

perpustakaan perguruan tingginya, informasi yang serba *online* dan *instant* dapat dinikmati secara percuma.

Mahasiswa Malaysia sangat dimanjakan oleh kemudahan mengakses ilmu pengetahuan melalui perangkat multimedia yang tersedia di berbagai perguruan tinggi. Didukung oleh kemampuan berbahasa Inggris yang baik, jendela dunia terbuka lebar bagi mereka. Para raja di berbagai wilayah bertindak sebagai *counselor* bagi perguruan tinggi di wilayah kekuasaannya sehingga jaminan mendapatkan dukungan penguasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan memiliki legitimasi yang cukup. Termasuk sokongan dana negara bagian yang memang sangat penting bagi kelangsungan pelayanan yang optimal dan efisien oleh perguruan tinggi terhadap para pelajarnya. Semakin banyak masyarakat yang terpelajar maka semakin memungkinkan adanya peluang untuk masyarakat berkembang. Orang cerdas pandai dalam khasanah Melayu memang seharusnya menjadi tempat bertanya. Sehingga semakin banyak jumlah kaum terpelajar, maka semakin mungkin berbagai lapisan masyarakat menggantungkan harapan demi kemajuan. Orang Melayu bilang, "*Lubuk akal tepian mandi.*"

Di Indonesia pengalaman kolusi antara aparat pemerintah dan pemburu rente melakukan

penetrasi terhadap tidak saja kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga tatanan sosialnya telah menyebabkan wilayah Indonesia seperti ladang perburuan para kapitalis dan kroni-kroninya. Pengembangan Iptek hanya menjadi ajang masyarakat kampus dengan segala keterbatasan dan ketidakcukupannya. Menyedihkan sekali bahwa upaya-upaya membekali masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan mencoba menemukan kemampuan pengetahuan malah dicurigai sebagai masyarakat yang anti pemerintah, merongrong wibawa negara, dan segala jargon negatif yang dilekatkan padanya.

Masyarakat ilmiah dikesampingkan karena melalui itu ada ancaman bagi keberlangsungan kekuasaan yang distorsif sekarang. Kenikmatan memporak-porandakan kualitas umat manusia Indonesia oleh sekelompok kecil elit harus terus berlangsung dan karenanya proses pembelajaran dan perbaikan kualitas dan kapabilitas masyarakat tak perlu menjadi prioritas konkrit. Ia hanya layak dijadikan komoditas politik yang masih mujarab bagi perolehan suara.

Di Riau kenyataan paradoks seperti itu belakangan ini banyak muncul. Betapa terperanjatnya rakyat yang sedang dilanda musibah banjir ketika sang pejabat malah berencana membeli helikopter untuk berwira-wiri mengunjungi berbagai wilayah Riau. Ketika kemiskinan diteriakkan

penetrasi terhadap tidak saja kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga tatanan sosialnya telah menyebabkan wilayah Indonesia seperti ladang perburuan para kapitalis dan kroni-kroninya. Pengembangan Iptek hanya menjadi ajang masyarakat kampus dengan segala keterbatasan dan ketidakcukupannya. Menyedihkan sekali bahwa upaya-upaya membekali masyarakat dengan ilmu pengetahuan dan mencoba menemukan kemampuan pengetahuan malah dicurigai sebagai masyarakat yang anti pemerintah, merongrong wibawa negara, dan segala jargon negatif yang dilekatkan padanya.

Masyarakat ilmiah dikesampingkan karena melalui itu ada ancaman bagi keberlangsungan kekuasaan yang distorsif sekarang. Kenikmatan memporak-porandakan kualitas umat manusia Indonesia oleh sekelompok kecil elit harus terus berlangsung dan karenanya proses pembelajaran dan perbaikan kualitas dan kapabilitas masyarakat tak perlu menjadi prioritas konkrit. Ia hanya layak dijadikan komoditas politik yang masih mujarab bagi perolehan suara.

Di Riau kenyataan paradoks seperti itu belakangan ini banyak muncul. Betapa terperanjatnya rakyat yang sedang dilanda musibah banjir ketika sang pejabat malah berencana membeli helikopter untuk berwira-wiri mengunjungi berbagai wilayah Riau. Ketika kemiskinan diteriakkan

dimana-mana maka isu itu menjadi secercah harapan yang selama ini memang sangat didambakan. Namun kekagetan kembali muncul pada saat sebuah rencana strategis disusun tidak satupun ada standar yang menunjukkan berapa persen masyarakat miskin yang akan dikurangi di Riau. Artinya persoalan-persoalan kemiskinan yang demikian kompleks yang membutuhkan penanganan secara komprehensif malah terlupakan dalam kerangka perencanaan pembangunan Riau.

Tidak lama berselang ketika isu kebodohan dikumandangkan aspek paradoks lain juga muncul. Secara budaya label bodoh yang dilekatkan pada masyarakat Riau sebenarnya sangat menyakitkan. Angka statistik memang menunjukkan betapa banyaknya masyarakat Riau yang hanya berpendidikan SD ke bawah. Tetapi prediket bodoh tentunya sangat sulit diterima meskipun salah satu indikatornya yakni strata pendidikan dapat membuktikan hal tersebut. Kata “bodoh” bermakna sangat kompleks yang tidak hanya ditinjau dari rendahnya tingkat pendidikan formal, tetapi lebih dari itu ia menunjukkan lemahnya akal dan fikiran serta budi pekerti. Dalam perspektif itu tentu hati masyarakat terasa liris karena meskipun pendidikannya rendah, tetapi ia tidaklah lemah dari akal dan fikiran apalagi budi pekerti sehingga prediket bodoh yang dilekatkan pada mereka belumlah pada

tempatnyanya. Justru menurut mereka banyakkah para sarjana dan orang terpadang, ter-masuk pejabat pemerintah dan para anggota legislatif yang memiliki strata pendidikan tinggi, tetapi justru lemah dari akal dan fikiran dan bahkan terlihat kurang memiliki budi pekerti.

Bagaimanapun upaya memberantas kebodohan sangatlah patut didukung. Sasarannya tentu saja bukan hanya mereka yang berpendidikan rendah, tetapi mereka yang berpendidikan tinggi dan lemah akal dan fikiran serta rendah budi pekertinya harus pula terlingkup di dalamnya. Secara bersama masyarakat Riau harus menyadari dan belajar dari sejarah bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk itulah sebenarnya sebuah perpustakaan yang komprehensif dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang canggih sangat dibutuhkan. Ini berarti upaya penggusuran perpustakaan Riau oleh kroni-kroni kapitalisme sangat bertentangan dengan semangat memberantas kebodohan. Justru yang seharusnya dilakukan adalah mempercanggihnya sehingga ia bisa menjadi sumber pembelajaran dan penulanan Iptek bagi masyarakat Riau.

Pemerintah Riau seharusnya tidak menerapkan sisi negatif dari ajaran Mao Tse Tung. Memberangus perpustakaan berarti menghancurkan suatu bangsa dan peradabannya. Sisi positif dari ajaran itu yang harus dipetik, bahwa memajukan

suatu bangsa dan suatu kaum harus didukung oleh pengembangan Iptek yang memadai. Sumbernya ada di perpustakaan dan laboratorium. Masyarakat ilmiah Riau secara khusus sebenarnya sangat membutuhkan adanya perpustakaan yang *online* dan dilengkapi berbagai fasilitas internet yang mudah diakses. Berbagai situs di dunia maya saat ini memberikan berbagai suguhan pengetahuan secara percuma. Termasuk perkembangan tekhnologi terkini yang mudah di *-download* untuk diterapkan di tengah masyarakat serta informasi produk, baik oleh pembeli maupun penjual sebagai ajang transaksi modern (*e-commerce*).

Lantas kemana Bank Riau harus diusung? *Pertama*, tidak lain adalah ke dunia maya. *Email Banking* saat ini bukan lagi sesuatu yang dapat ditunda. Orang tidak butuh kantor yang besar. Dalam sebuah *handpone* genggam semua transaksi bisnis dapat diatur dengan mudah. Termasuk berbagai transaksi keuangan. Perbankan memanjakan *customer*-nya dengan berbagai layanan *digital* dan *mobile*. Bank Riau perlu berfikir keras mengubah tradisional *approach*-nya pada cara-cara yang lebih canggih. Kedekatan dengan pasar global menuntut hal itu secara mutlak.

Kedua, pemisahan *head-office* dengan *branch-office* secara jelas. Sebaiknya kantor pusat dipisahkan dengan kantor cabang utama agar pelayanan

nasabah dapat dilakukan secara cepat. Kantor kas perlu diperbanyak sehingga penyebaran pelayanan nasabah dapat dilakukan. Hanya saja itu harus *online* mengingat transaksi bisnis saat ini membutuhkan penanganan yang cepat, tepat, dan memuaskan. *Ketiga*, membersihkan Bank Riau dari pegawai-pegawai yang korup dan meningkatkan profesionalisme semua karyawan sebagai tenaga perbankan yang handal dan siap menghadapi masa depan yang kompetitif.

Trade-mark perbankan sekarang tidak diukur dari kemegahan kantor, tetapi pada kualitas pelayanan pada masyarakat nasabah dan calon nasabah. Kita memimpikan Bank Riau yang terpercaya, bisa diakses dimana dan kapan saja. Kita ingin bangga memiliki *Card Bank Riau* yang dapat digunakan di dunia bisnis manapun. Bukan hanya sekedar bank penampung kas Pemda apalagi tukang berangus perpustakaan demi proyek pembangunan perkantoran. Semoga Bank Riau tidak terjebak oleh kepentingan-kepentingan elit yang distorsif secara bisnis dan ekonomi. ♦

DAYUNG SERENTAK, UNTUNG SEREMPAK

(Memilih Pemimpin yang “Core Competence” di Riau)

Banyak bakal calon gubernur (Balongub) yang sudah dilansir media massa untuk memimpin provinsi ini di masa datang. Semua nama pada dasarnya memiliki kelebihan masing-masing, dan karena itu pula mungkin masyarakat ada yang mencalonkan mereka. Beberapa di antaranya ada yang telah menyampaikan pemikiran tentang aspek membangun masyarakat Riau pasca Soeripto yang dinilai kurang berhasil mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat.

Hal yang menarik untuk dicermati dari pemikiran yang masuk adalah diskusi seputar visi dan misi. Disyaratkan seorang gubernur nantinya haruslah orang yang memiliki visi ke depan dan misi yang jelas, sehingga Provinsi Riau dapat berkembang dengan baik. Jika direnungkan lebih dalam mungkin di situ letak kelemahan dari pemikiran tersebut.

Visi dan Misi Riau sebenarnya sudah sangat

jelas dan tegas. Sebagai bagian integral dari NKRI, maka Visi dan Misi Provinsi Riau tidak dapat lepas dari apa yang dikehendaki bangsa ini. Dalam Pembukaan UUD 1945 secara konkrit dicantumkan Indonesia ingin mengantarkan masyarakatnya pada kehidupan yang berkesinambungan, baik material dan spritual, dunia dan akhirat. Karena itu, misi yang diemban dari keberadaan bangsa Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya dan membentuk negara kesatuan adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Jadi, jika Provinsi Riau masih dalam lingkup NKRI, maka visi dan misi itu yang harus diemban. Caranya dengan menyusun strategi dan program yang mampu diimplementasikan untuk mencapai visi dan misi yang dimaksud. Bukannya mencari visi dan misi lain yang belum tentu lebih baik. Apalagi mencari orang yang memiliki visi dan misi lain, yang tentunya memiliki keteladanan dari apa yang sudah ada sekarang. Ini berarti, pertanyaan yang amat penting dalam kerangka pemilihan Gubernur Riau mendatang bukanlah seputar visi dan misi baru, tetapi adalah siapa dari Balongub yang sudah

mencuat saat ini, yang diperkirakan mampu men-terjemahkan visi dan misi yang sudah ada ke dalam suatu strategi yang jitu dan mengakomodasi kompetensi inti (*core competence*) yang dimiliki provinsi ini untuk menyusun dan mengimplementasikan program yang sejalan dengan strategi yang sudah ditetapkan. Terutama sekali dihadapkan pada tatanan kehidupan global yang berubah cepat.

Tatanan Kehidupan Global

Memasuki masa transisi era milenium ketiga dengan karakteristik interdependensi ekonomi yang tinggi, arus informasi yang deras, dan percepatan perubahan teknologi serta alam keterbukaan, meskipun dalam keadaan “sakit parah” karena krisis ekonomi dan kepercayaan, Provinsi Riau harus memperhatikan tatanan kehidupan global agar dapat berperan dan sukses. *Pertama*, organisasi provinsi ini harus dibuat lebih mapan dengan rancangan strategi yang konsisten dan pola manajemen yang berbudaya.

Selama ini organisasi bangsa ini (termasuk Riau) sangat konvensional yang mengarah pada *bureaucratic* atau *hierachical organization* yang bersifat kaku dan cenderung memperlakukan rakyat seperti “budak jajahan”. Mematikan kreativitas dan inovasi serta *enterpreneurship* SDM karena segala aktivitas dan tindakan harus dikontrol melalui

prosedur dan perintah atasan.

Kedua, Provinsi Riau harus menjadi lembaga yang cermat memperhatikan perubahan dan sebagai *corporate citizen* yang mampu mengenali kebutuhan dan keinginan segenap lapisan masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dengan provinsi ini. Menjawab tantangan ini harus diciptakan *build in* fleksibilitas organisasi pemerintahan supaya proaktif beradaptasi dengan perubahan yang cepat, tanpa kehilangan identitas melalui pemanfaatan *core competence* yang dimiliki.

Daya Saing Berkelanjutan

Jika berjalan sebagaimana baiknya, maka pasca reformasi bangsa Indonesia akan berada pada alam demokrasi, keterbukaan dan berhadapan dengan tatanan kehidupan masyarakat global. Muaranya adalah makin menajamnya persaingan, sementara masyarakat sedang terpuruk dalam krisis perekonomian. Untuk itulah pemerintah dituntut mampu mengkristalisasi *core competence* daerah ini, sehingga rakyatnya memiliki daya saing yang berkelanjutan (*sustainable competitive advantage*) agar tidak lagi seperti “*Ayam yang mati dilambung padi*”. Ada tiga bentuk *core competence* yang menghasilkan daya saing berkelanjutan, di mana provinsi ini harus mampu menggerakkannya.

Pertama, kita bersyukur pada Tuhan Yang

Maha Esa bahwa negeri ini punya sumberdaya fisik (*physical capital*) yang melimpah. Lebih dari itu kita perlu mendukung gerakan reformasi di daerah ini yang telah berjuang gigih agar sumberdaya fisik (terutama minyak bumi) itu dapat kita miliki dan memanfaatkan dalam arti yang sesungguhnya. Ini berarti, gubernur mendatang hanya perlu mengaplikasikan sumber-sumber tersebut dengan strategi dan program implemementasi pembangunan yang berkualitas yang akan dilaksanakan di provinsi ini. Sektor penting yang perlu diperbaiki infrastruktur yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat, bukan mempercantik kantor-kantor pemerintah yang justru melahirkan inefisiensi.

Kedua, sumberdaya organisasi (*organization capital*) yang lebih luwes dan tanggap terhadap perkembangan masyarakat. Organisasi pemerintah harus lebih diarahkan menjadi *enterpreneurial government* yang tidak “menggerogoti” sumber daya lain, apa lagi rakyat. Untuk itu peran dan fungsi setiap lembaga harus dilakukan pada posisi yang sebenarnya. Artinya, semua lini organisasi harus didorong menjadi SBU (*Strategic Business Unit*) yang efisien dan produktif berpegangan pada prinsip “*Dayung Serentak*” bahtera provinsi ini, agar mendapat “*Untung Serempak*” bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Ketiga, sumberdaya manusia (*human capital*) Provinsi Riau sangat tertinggal. Masih rendahnya

kualitas SDM sebagian besar masyarakat Riau tidak dapat dipungkiri, tetapi bukan tidak ada yang dapat dimanfaatkan dari mereka. Filosofi manajemen Riau sudah lama mengatakan, “*Sibuta untuk meniup Lesung (tempat menumbuk padi) dan Sipekak untuk menyulut Cagak (meriam).*”

Proses kristalisasi *core competence* dalam bentuk SDM di Provinsi Riau memang merupakan faktor kunci. Dalam khasanah manajemen jenis kompetensi ini memang memiliki daya saing (*competitive advantage*) yang tinggi. Karena itu, konfigurasi ketiga *core competence* di atas harus mampu mendorong semakin ke depannya kompetensi SDM. Pemanfaatan sumberdaya fisik dan reformasi total proses struktur semua lini organisasi di Provinsi Riau (ke arah yang fleksibel terhadap tatanan kehidupan global) di samping mampu mengakomodasi sifat *intellectual human capital* harus pula menjadi pendorong bagi lahirnya sifat-sifat tersebut.

Gubernur Riau Mendatang

Akhirnya mengingat banyaknya calon yang dimunculkan masyarakat, kiranya DPRD dan siapa saja yang terkait dengan pemilihan Gubernur Riau pasca Soeripto, ada baiknya memperhatikan beberapa simpulan dari uraian di atas. *Pertama*, gubernur hendaknya orang yang mampu menterjemahkan visi dan misi bangsa ini ke dalam bentuk strategi

dan program implementasi pembangunan di Provinsi Riau. *Kedua*, proses transformasi struktur organisasi pemerintah dari *bureaucratic goverment* ke *entrepreneurial goverment* sangat mendesak agar provinsi ini mampu menghadapi tatanan kehidupan global.

Terakhir, tiga jenis *core competence* yang diperlukan agar provinsi ini memiliki daya saing berkelanjutan (*sustainable competitive*) adalah sumber daya fisik, sumber daya organisasi, dan SDM. Seorang gubernur mendatang di samping harus mampu mengakomodasi tiga jenis *core competence* tersebut dan menggunakannya secara cermat dan akurat juga harus memiliki komitmen yang tinggi dan jujur untuk melahirkan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi. Bukannya orang yang menjadikan lembaga pembinaan SDM sebagai batu loncatan untuk mengejar ambisi dan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. ♦

DUDUK MERAUT RANJAU, TEGAK MENINJAU JARAK

(Ketergantungan Ekspor Riau pada Singapura)

Keteringgalan masyarakat dalam bidang ekonomi tidak hanya dapat diselesaikan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya pada skala lokal. Peran perdagangan selama ini telah diyakini sebagai solusi bagaimana keberagaman peran dan ketersediaan sumber-sumber dapat diramu dan dipertukarkan secara ekonomis dan harmonis sehingga mampu menaikkan kesejahteraan. Keunggulan komparatif satu wilayah atau negara dibandingkan dengan wilayah lain atau negara lain memberi peluang untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang dapat digunakan bagi pemenuhan kebutuhan lainnya.

Memproduksi sebuah barang bisa jadi tidak efisien sehingga lebih baik membeli. Sebaliknya jika memproduksi lebih optimal sementara pihak lain lebih ekonomis untuk membeli. Dalam khsanah tersebut terbitlah pertukaran yang dalam

tataran normatif menuju kepada keseimbangan pasar untuk menghasilkan tingkat efisiensi yang optimum.

Sejalan dengan berkembangnya peradaban dunia maka perkembangan transaksi antar negara tidak saja dilakukan oleh institusi negara tetapi juga pihak swasta. Bahkan dalam era yang serba canggih saat ini keterbukaan pasar semakin meluas. Lalu lintas perdagangan internasional menjadi sangat ramai. Masing-masing negara dan pelaku bisnis di dalamnya mencari keunggulan demi keunggulan untuk memenangkan kompetisi global yang makin tajam.

Dalam formulasi pertumbuhan ekonomi peranan perdagangan internasional menjadi sangat dominan disamping investasi dan konsumsi. Seli-sih antara kinerja ekspor dengan impor akan menjadi penentu ketahanan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara serta eksistensinya dalam percaturan internasional. Menguasai pasar ekspor yang dominan akan memberi dampak positif bagi perkembangan ekonomi masyarakat tempatan. Oleh karenanya ketergantungan ekspor pada satu komoditas dan pasar tertentu akan membawa dampak pada ketidakleluasaan kinerja ekonomi suatu wilayah.

Di Riau perkembangan ekspor ternyata tidak menggambarkan kontribusi yang mampu

menaikkan kekuatan ekonomi rakyat. Meskipun ekspor Riau (khususnya non-migas) meningkat, namun sangat tidak beragam. Bila tahun 2001 total ekspor non-migas Riau baru sebesar US\$ 5,739 juta maka pada tahun 2002 naik menjadi US\$ 6,560 juta dan tahun 2003 naik lagi menjadi US\$ 6,755 juta. Hanya saja sebagian besar tujuan ekspor non migas Riau adalah ke negara-negara Asia khususnya Singapura dan sangat terbatas lini produknya.

Pada tahun 2001 *share* ekspor non-migas Riau ke negara-negara Asia adalah sebesar 88,37% dengan porsi Singapura mencapai 66,85% dari total ekspor Riau. Pada tahun 2002 meskipun ekspor ke negara-negara Asia turun menjadi 85,64%, tetapi porsi ekspor ke Singapura mengalami kenaikan sehingga menjadi 68,08%. Pada tahun 2003 porsi ekspor Riau ke Singapura naik lagi menjadi 68,67%. Hal ini sejalan dengan kenaikan porsi ekspor Riau kenegara ASEAN yang pada tahun 2003 mencapai 73,99%. Sebahagian besar negara tujuan ekspor Riau memang hanya tertuju ke Asia. Pada tahun 2003 porsinya mencapai 91,35%. Pasar Eropa hanya mendapat pangsa sebesar 6,74% dan Amerika hanya 5%.

Ketergantungan ekspor ke Singapura akan menyebabkan *bargaining position* bisnis Riau terhadap negara tersebut menjadi lemah. Nilai tambah yang dapat dinikmati oleh para eksportir akan

sangat tergantung pada keleluasaan para importer Singapura memainkan peranan bisnisnya. Apalagi bila komoditas yang diekspor adalah barang-barang mentah yang nilai jualnya relatif rendah dan resiko bisnisnya tinggi. Pengalaman pemasaran sayur daun lebar membuktikan bagaimana pasar Singapura merupakan pasar berpotensi tetapi tidak layak bagi eksportir sayur Riau. Kalah bersaing dalam kualitas produk dan kemampuan menyelaraskan keinginan dan kebutuhan konsumen akan ditekan oleh posisi pasar yang tidak menguntungkan. Kerugian akan tetap berada pada para eksportir Riau mengingat perilaku pasar sangat sensitif terhadap harga sehingga implikasinya terhadap kemampuan menutup biaya menjadi rendah. Ujung-ujungnya adalah ketidakmampuan memperoleh keuntungan dan terganggunya kesejahteraan petani sebagai produsen.

Dilihat dari jenis komoditas yang diekspor maka porsi terbesar adalah alat-alat listrik sebesar 31,99% dan Pulp kertas 10,11% serta minyak sawit 8,33%. Nilai ekspor alat-alat listrik pada tahun 2001 mencapai US\$. 1.835.840.000,- hanya mengalami kenaikan relatif kecil pada tahun 2002. Porsi ekspor komoditas ini pada tahun 2002 menyusut menjadi 28,03%. Porsi ekspor yang meningkat pada tahun 2002 adalah pulp kertas (10,30%) dan minyak sawit (12,57%). Sedangkan pada tahun 2003 ekspor alat-alat listrik porsinya kembali mem-

besar yakni 32,93%. Minyak sawit sebesar 16,08% dan Pulp Kertas porsinya sedikit mengalami penurunan. Pada tahun 2003 porsi nilai ekspor ketiga komoditas ini mencapai 57,75% dari total nilai ekspor Riau.

Gambaran ini mengindikasikan diversifikasi komoditas ekspor Riau sangat terbatas. Ekspor sangat tergantung pada tiga komoditas utama, yakni alat-alat listrik, pulp kertas, dan minyak sawit. Ketiga komoditas tersebut merupakan produk-produk yang banyak dihasilkan perusahaan-perusahaan besar. Berbagai komoditas yang dihasilkan masyarakat belum banyak tersentuh oleh kegiatan ekspor. Alat-alat listrik pada umumnya dihasilkan oleh industri yang ada di Pulau Batam, sedangkan Pulp Kertas adalah hasil produksi perusahaan-perusahaan besar yang ada di Riau seperti IKPP dan RAPP.

Kedua komoditas ini kurang bersentuhan dengan kegiatan ekonomi masyarakat di sektor hulunya. Minyak sawit merupakan produk yang bersentuhan dengan beberapa komponen masyarakat. Namun demikian dominansi perusahaan-perusahaan perkebunan besar menyebabkan kinerja ekspor hanya akan signifikan bagi para konglomerat ketimbang masyarakat kecil di pedesaan. Kenaikan harga TBS memang sangat mempengaruhi kesejahteraan petani sawit Riau tetapi data

menunjukkan lebih kurang 80% lahan sawit dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar dengan performa pasar yang monopsonis.

Untuk meningkatkan kinerja ekspor Riau dimasa datang perubahan orientasi ekspor mutlak diperlukan. *Pertama*, peluang-peluang pasar selain Singapura harus diantisipasi sehingga ketergantungan terhadap satu negara tujuan ekspor dapat dikurangi. Pasar Eropa di luar negara-negara MEE merupakan peluang yang cukup menjanjikan. Geliat ekonomi Eropa Timur yang mulai menerapkan pasar terbuka merupakan kesempatan untuk mendapatkan pasar bagi berbagai komoditas yang diproduksi Riau. *Kedua*, diversifikasi produk guna menjamin kelangsungan ekonomi masyarakat. Menggalakkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi barang-barang berorientasi ekspor mutlak diperlukan. Investasi terhadap industri hilir komoditas primer harus dipercepat dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar manca negara.

Ketiga, keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) komoditas ekspor Riau harus terhindar dari perilaku pasar yang monopsoni sehingga kerugian masyarakat selaku produsen ter Hulu yang pada umumnya merupakan produk-produk sektor primer dapat diminimalisir. Untuk itu diperlukan adanya keberagaman institusi bisnis yang eksis dalam salah satu komoditas tertentu dimana peme-

rintah diharapkan mampu menjadi motivator sekaligus wasit yang adil untuk menjamin tidak terjadinya distorsi pasar yang hanya menguntungkan para pemburu rente.

Keempat, membuka informasi pasar ekspor seluas-luasnya kepada masyarakat dan mengarahkan kemampuan mereka untuk menangkapnya. Penyediaan infrastruktur ekonomi guna menumbuhkan gairah investasi terhadap komoditas ekspor sangat diperlukan. Akses informasi tanpa adanya motivasi untuk menggunakan informasi tersebut sebagai basis bisnis yang *profitable* tidak akan membawa hasil yang memadai. Melalui Master Plan pengembangan ekspor Riau yang holistik dapat diterjemahkan peranan instansi-instansi lain dalam mendukung berkembangnya ekspor Riau yang lebih *profitable*, berkait dengan kesejahteraan masyarakat, dan berkesinambungan.

Tanpa itu, masyarakat Riau hanya akan mampu gigit jari terhadap perkembangan pasar global yang pada dasarnya sangat menggiurkan. Menghadapi persaingan yang makin tajam tidak ada lagi kesempatan untuk berleha-leha. Keberhasilan Riau ke depan hanya mampu diraih oleh orang yang mau apa yang dikenal dalam budaya Melayu, “*Duduk merant ranjau, tegak meninjau jarak.*” Hanya pekerja keras yang tidak mau membuang waktulah yang akan sukses dalam percaturan ekonomi global saat ini dan masa datang. ♦

RAJA BUNCIT KEDEKUT

(Fenomena Pemimpin dan Masyarakat di Era Reformasi)

Berbagai berita yang dilansir media massa, baik cetak maupun elektronik tidak saja membuat bulu kuduk kita merinding tetapi ada hal-hal aneh yang kini terjadi di Indonesia. Secara akal sehat sulit dipercaya semua itu dapat terjadi. Tetapi, itulah yang sedang berlangsung. Setiap hari masyarakat disuguhi peristiwa-peristiwa menarik dan mencengangkan yang terjadi di sekitar mereka. Itu bukan impian atau khayalan. Realita menunjukkan hal-hal yang dulu dianggap tidak mungkin kini menjadi mungkin terjadi.

Pada tataran nasional, kasus Akbar Tanjung menyeret akal dan pikiran masyarakat tentang betapa tidak berartinya hukum di Indonesia saat ini. Bagaimana mungkin orang yang telah ditetapkan bersalah oleh majelis hakim malah mewakili bangsanya dikancah internasional. Pengamat dan media asing mencemooh. Menganggap hal itu merupakan tindakan yang sangat

tidak patut. Masyarakat secara telanjang menyaksikan dan merasakan itu. Para pejabat negara tidak lagi diisi oleh orang-orang yang bersih dari persoalan pelanggaran hukum.

Masih dari gedung rakyat, yang seharusnya menjadi sakral karena di situlah tempat didewakan hati nurani rakyat. Tempat dimana sesuatu yang diperdebatkan dengan pendekatan kebenaran dan kepatutan. Kini gedung tersebut, baik di pusat maupun di daerah, malah penuh dengan kemunafikan yang menganggangi hati nurani rakyat. Isu suap menjadi sesuatu yang erat dengan perilaku mereka. *Money politic* bukan lagi terselubung dilakukannya. Untuk sebuah keputusan secara transparan proses “barter dan dagang sapi” terjadi di depan mata kepala rakyat. Sebagai konstituen, kepentingan rakyat semestinya dikedepankan oleh wakil-wakilnya malah diposisikan menjadi marginal. Padahal kedudukan mereka ada tidak lain adalah dari proses yang mengumpulkan pilihan dari hati nurani rakyat.

Pada sisi lain banyak pula penegak hukum yang malah “melapukkan” tiang-tiang kebesaran dari hukum itu sendiri. Bahkan rakyat menjadi korban dari kebejatan mereka. Perlindungan hukum yang diharapkan malah tekanan hukum dan kebejatan penegak hukum yang didapatkan. Peristiwa Binjai merupakan bukti dimana para aparat

yang seharusnya melindungi rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku malah saling baku tembak tanpa memperhatikan sedikitpun ketentuan hukum. Sedihnya, peristiwa itu malah dipicu oleh persoalan narkoba yang seharusnya diberantas secara hukum.

Rakyat tidak lagi dapat membanggakan tentara dan polisi mereka sebagai pahlawan bangsa dan penegak hukum. Citra tentara dan polisi saat ini dibangun oleh perilaku-perilaku mereka yang justru memperburuk citra itu sendiri. Rakyat mengenal tentara dan polisi saat ini bukan lagi sebagai pembela negara dan penegak kebenaran, tetapi sebagai pembeking judi, narkoba, dan prostitusi. Termasuk kegiatan-kegiatan yang merugikan negara lainnya seperti penyeludupan, *illegal logging*, penjarahan, dan lain-lain. Bahkan rakyat yang tidak berdosa menjadi korban dari perkelahian mereka dalam berebut lahan maksiat yang seharusnya mereka berantas.

Pada tingkat kejaksaan sekarang ini marak pula berbagai isu ketidakwajaran yang mencegangkan. Bahkan pada level tertinggi (Jaksa Agung) persoalan ketidakwajaran tersebut mengemuka dengan lakon yang amat memalukan. Harta siluman yang diperdebatkan hanyalah memberi sembilu nan pedih pada rakyat yang sedang dihimpit krisis multidimensional. Para

pengungsi yang menahan pedih di Nunukan (Kalimantan Barat) tentunya sangat terpuak oleh berita tentang para pembesar negara yang penuh dengan para pencoleng.

Saat ini persoalan moral bangsa menjadi sulit dibangun. Anak bangsa tidak lagi segan-segan melakukan hal-hal yang sudah di luar perikemanusiaan. Seorang yang diduga mencuri harus menerima hukuman yang sangat bringas dari masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang harus menerima hukuman yang tidak setimpal dengan apa yang harus mereka terima. Tanpa proses yang jelas mereka dihakimi massa secara brutal. Dipukuli hingga tewas dan bahkan dibakar hidup-hidup seperti seekor binatang yang tidak perlu dipertimbangkan harkat manusianya. Masyarakat Indonesia seperti gampang marah, mengamuk dan cenderung melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbau anarkis tak terkendali. Negara seperti tidak lagi memiliki hukum yang harus dipatuhi.

Fenomena yang terjadi antara negara dan rakyat pasca reformasi ini memang menarik untuk direnungkan. Apakah rakyat masih punya negara? Dan lebih ekstremnya apakah Indonesia ini masih memiliki rakyat? Aparatur negara bukannya tambah membaik. *Good government* yang diharapkan malah menjadi alat bagi berbagai oknum aparat untuk saling meniadakan satu dengan lainnya.

Fitnah dan perasaan saling curiga tumbuh dalam keseharian pejabat birokrasi. Namun demikian penjarahan mereka terhadap uang rakyat tidak mengecil. Pengabdian bukan lagi menjadi dasar perilaku yang melahirkan pelayanan yang prima. Pengendalianlah yang dipakai sebagai alat untuk mempertahankan penguasaan terhadap asset-asset negara yang justru meluluhlantakkan pelayanan terhadap masyarakat.

Pengelola negara menjadi loba dan tamak sehingga mereka lebih memperdulikan upaya menghamburkan harta rakyat. Dalam istilah Melayu para pemimpin seperti ini disebut sebagai “*Raja Buncit Kedekut*”. Pemimpin yang loba dan tamak serta sangat kikir terhadap rakyatnya. Ia hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kroninya untuk menambah dan memupuk kekayaan melalui cara yang tidak terpuji dan sangat merugikan umat.

Tidak adanya keserasian antara rakyat dan negara muncul karena para pengelola negara tidak lagi meletakkan prinsip-prinsip pengelolaannya pada aturan main yang benar. Untuk itu ke depan di Indonesia diperlukan adanya upaya kongkrit menumbuhkan kembali perasaan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh peradaban hakiki umat manusia. *Pertama*, melalui pemutahiran kembali cara-cara pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip universal keagamaan. *Kedua*,

membangun sebuah kesepakatan nasional untuk menuju suatu kondisi Indonesia masa depan yang lebih baik.

Ketiga, menemukan berbagai aturan hukum yang memihak pada kepentingan rakyat dan mengimplementasikannya secara konsekwen. Sekaligus memberikan sanksi yang tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran. *Keempat*, memberdayakan institusi-institusi masyarakat paling bawah dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil untuk mampu memainkan peranan dalam menjaga keutuhan dan pelaksanaan kerangka hukum yang jelas dan tegas. *Kelima*, menjaga tidak terjadinya distorsi ekonomi dan ketidakseimbangan yang dominan dari kepemilikan asset ekonomi dalam masyarakat dengan mengembangkan rasa saling mengisi dan kesetiakawanan yang tinggi. Kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat eksklusif harus dihindarkan untuk mengurangi adanya kecemburuan sosial yang tinggi sebagai pemicu kerawanan.

Keenam, menata ulang aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dengan mengedepankan prinsip kepatutan dan kemungkinan sesuatu dikerjakan dan dilakukan. Pembangunan dilaksanakan tidak hanya dalam perspektif para pejabat, tetapi lebih didekati dari aspek peluang rakyat untuk memperbaiki kehidupannya.

Ketujuh, mencari titik-titik dimana kesejahteraan rakyat dapat diangkat dan lebih diberdayakan secara baik. Penyediaan infrastruktur dasar dengan kualitas yang memadai menjadi kunci dari upaya-upaya pemberdayaan rakyat. Alokasi anggaran yang jelas terhadap masalah ini mutlak diperlukan.

Kedelapan, perhatian yang serius terhadap masalah pendidikan harus dilakukan sesegera mungkin. Mulai dari tingkat paling bawah sampai paling tinggi. Tidak hanya masalah prasarana, tetapi juga masalah prosesnya harus ditata ke arah proses yang mampu melahirkan sumberdaya manusia yang unggul karena ketrampilan dan jati dirinya. Keberadaan manusia beradab menjadi kunci terselenggaranya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkesinambungan. ♦

MENANGGUK DI AIR KERUH

(Mengembalikan Lokomotif Reformasi di Riau)

Masyarakat sangat terkejut ketika tersiar berita Kabinet Reformasi berhasil “menilep” uang negara sebesar Rp. 1,7 triliun dalam waktu yang relatif pendek. Seolah-olah mereka “*Menangguk di air keruh*” dengan label reformasi. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin pudar sejalan dengan tidak terselesaikannya berbagai kasus kerusuhan di Indonesia. Termasuk “plintat-plintutnya” soal likuidasi perbankan. Lebih mencengangkan lagi, privasi seorang presiden sudah dapat ditembus secara gamblang. Bocornya pembicaraan telepon Habibie-Ghalib menunjukkan rapuhnya pemerintah Indonesia sekarang.

Warna reformasi memang telah berubah, karena berbagai kepentingan pribadi telah dikedepankan. Semua orang ingin menjadi reformis dan banyak yang memanfaatkannya untuk memuaskan kebutuhannya, mumpung kesempatan berteriak terbuka lebar. Contoh yang amat menggelitik ada-

lah ketika mahasiswa Riau berduyun-duyun datang ke kantor DPRD.

Sebelum Soeharto turun, sumbangan Indomie datang dengan kardus tanpa nama. Setelah Soeharto dapat dilengserkan kardus Indomie yang datang sudah lengkap dengan nama dan alamat pengirim. Sangat mudah ditebak oleh mahasiswa ketika itu, bahwa “begajul udik” yang bersangkutan ingin dipandang sebagai kaum reformis sejati, walaupun sebelumnya orang tahu ketika pemerintah Soeharto berkuasa ia adalah koruptor tulen.

Malang bagi gerakan mahasiswa Riau yang selanjutnya berjuang untuk kepentingan pembelaan hak-hak masyarakat. Mereka terkontaminasi oleh proses suksesi gubernur yang terjadi di Riau. Mahasiswa Riau terjerembab ke dalam permainan politik para pendukung kontestan peserta suksesi. Pengalaman politik yang kurang mendalam dari beberapa tokoh mahasiswa menyebabkan mereka mudah terbius oleh “angin segar” para pemain politik.

Mahasiswa yang sedang terlena dengan keberhasilannya melengserkan Soeharto menjadi terkotak-kotak, bahkan berhadapan satu sama lain. Sebab, mereka berhasil diinfiltrasi oleh kepentingan politik suksesi. Bukti konkretnya adalah hancurnya kantor SMPT-Unri.

Muara dari semua itu adalah melemahnya gerakan mahasiswa Riau pada hal-hal yang sangat prinsipil bagi kepentingan daerah. Konsolidasi semakin sulit dilakukan, karena saling curiga satu sama lain menjadi dominan. Pada tahap selanjutnya mahasiswa kalah cepat dengan reformis-reformis dadakan. Ditunjang oleh masa libur kuliah, gerakan mahasiswa semakin “melempem”. Perjuangan hak-hak masyarakat Riau, khususnya tuntutan bagi hasil minyak, hanya dilakukan oleh sebagian kecil kelompok mahasiswa yang memang masih mau peduli. Pada bagian lain, perjuangan diambil alih oleh kelompok reformasi yang menamakan diri sebagai gabungan kekuatan masyarakat Riau.

Tidak tanggung-tanggung, usulan langsung disampaikan ke Presiden dan DPR-RI. Janjipun diperoleh, masyarakat Riau akan diberitahukan hasilnya dalam waktu yang relatif singkat. Namun, sampai batas waktu yang telah ditentukan “durian belum jua runtuh”. Isu pemberontakan pun ditebar. Gerakan mendatangkan 1000 ulama bersorban ke PT. CPI dicanangkan.

Tanpa mengurang rasa hormat pada gabungan pejuang-pejuang reformasi tersebut, hasil tuntutan bagi hasil SDA Riau sebesar 10 persen nampaknya “masih jauh panggang dari api”. Entah “mengenyek”, akhirnya Bappenas mengeluarkan

statement yang amat menyakitkan, yakni masyarakat Riau hanya pantas “disangoni” sebesar Rp. 600 miliar setiap tahunnya. Ini dibuktikan mereka dengan menaikkan jatah Riau menjadi Rp. 756,547 miliar pada tahun anggaran 1999/2000. Jumlah ini meningkat tajam jika dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp. 90,901 miliar. Di masa depan, tuntutan 10 persen bagi hasil eksploitasi SDA untuk Riau nampaknya akan makin kabur. Sejalan dengan akan diselenggarakannya Pemilu, maka masyarakat Riau kembali akan terkotak-kotak ke dalam partai mereka masing-masing.

Kalau keanekaragaman tersebut manghasilkan kesatuan perjuangan, maka akan sangat produktif bagi kepentingan daerah, tapi bila yang terjadi hanya perbedaan yang mengarah pada perpecahan gerakan, masyarakat Riau akan semakin melemah. Substansi tuntutan hanya akan menjadi komoditas politik untuk kepentingan mencari suara masyarakat.

Agar perjuangan masyarakat Riau untuk memperoleh 10% hasil produksi SDA yang dieksploitasi di wilayahnya tidak sekedar “menggantang angin”, maka pola gerakan haruslah diubah. Gerakan yang hanya mirip “klompencapir ala Harmoko”, tidak mungkin akan berhasil. Mengutus wakil-wakil ke Istana Presiden lebih mirip degan

“gaya Tutut membawa suku Asmat menghadap bapaknya untuk memamerkan Koteka ke mancanegara”. Masyarakat Riau harus menyadari sepenuhnya arti dan esensi gerakan mahasiswa, jika tuntutannya ingin berhasil baik.

Sudah saatnya “lokomotif reformasi” dikembalikan ke tangan mahasiswa. Para reformis dadakan dan para “bunglon” yang selama ini merasa lebih reformis, harus beralih peran menjadi pendamping atau bahkan minggir sama sekali. Jika masih ingin terlibat yang terbaik adalah menjadi rel dan bantalan bagi Bergeraknya lokomotif reformasi mahasiswa.

Upaya mengkonsolidasikan mahasiswa untuk secara gigih memperjuangkan kepentingan masyarakat Riau memerlukan tokoh panutan, bukan tokoh yang mengambil alih peran mereka dengan “sambung rasa ala Soeharto”. Kemauan politik pemerintah daerah harus menjadi bahan bakar bagi gerakan lokomotif tersebut.

Terminal yang dituju oleh lokomotif reformasi ini, tentunya bukan Presiden Habibie (yang keberadaannya di Istana Negara saat ini seperti di ujung tanduk), tetapi perusahaan-perusahaan yang selama ini telah mengeksploitasi hasil bumi Riau. Termasuk secara intensif menggugat keberadaan Otorita Batam sebagai “lambang pelecahan” masyarakat Riau.

Untuk itulah, kesadaran moral para mahasiswa harus kembali ditumbuhkan dan dikonsolidir mengingat kebutuhannya sudah sangat mendesak. Banyak orang berharap mahasiswa tetap independen dan berjuang melalui cara mereka sendiri, tanpa harus terimbas oleh percaturan politik yang terjadi selama ini.

Sejarah Indonesia telah berkali-kali membuktikan bahwa gerakan moral mahasiswalah yang mampu menumbangkan tirani kekuasaan dan *status quo* pemasangan masyarakat. Rakyat Riau, tentunya menunggu “geliat” mahasiswa dan sekali lagi menunjukkan eksistensinya sebagai kekuatan riil di masyarakat. Bukan terlena oleh “sumbangan biji kacang kedelai”. ♦

BAGAI SI KUDUNG MENDAPAT CINCIN

(Ego Sektoral Pembinaan UKM)

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia telah memberi warna tersendiri bagi kehidupan bangsa Indonesia. Kalaupun tidak dapat dikatakan melenceng dari apa yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, banyak pakar dan masyarakat umum mulai merasakan bahwa hasil yang telah dicapai selama ini memiliki ketimpangan-ketimpangan yang mendasar dan substansial. Terutama sekali bila dikaitkan dengan pemerataan hasil pembangunan itu sendiri.

Sampai akhir Pelita V apa yang telah dicapai dari proses pembangunan yang dijalankan menunjukkan fakta yang memerlukan pemikiran yang mendalam, usaha yang gigih, serta kesepakatan yang bulat dan seksama untuk menanggulanginya. Data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia masih tergolong negara yang miskin dengan tingkat pendapatan

perkapita US\$ 675. Meskipun demikian ada pengurangan yang cukup tajam pada jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, di mana pada tahun 1970 adalah sebesar 60%, sedangkan tahun 1990 tinggal 15%.

Sisi lain yang perlu mendapat perhatian serius adalah bahwa kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia ditopang oleh keberadaan pengusaha kecil. Data terakhir menunjukkan jumlah pengusaha kecil di Indonesia mencapai 32,6 juta. Bila satu unit usaha kecil menghidupi satu keluarga dengan dua anak berarti jumlah jiwa masyarakat Indonesia yang bergantung hidupnya dari usaha tersebut mencapai lebih kurang 130,4 juta jiwa, atau lebih kurang 76,71 dari total penduduk Indonesia.

Dibandingkan dengan sebagian kecil masyarakat Indonesia (lebih kurang 10%) yang menikmati porsi yang amat besar dari hasil pembangunan, maka kenyataan yang digambarkan di atas merupakan sesuatu yang amat pahit. Hal ini jelas bila dikaitkan dengan apa yang dicita-citakan oleh proklamasi kemerdekaan Indonesia seperti yang dimaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang antara lain mengatakan bahwa negara pemerintahan Indonesia dibentuk tidak lain adalah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Untuk masa-masa yang akan datang negara Indonesia sepertinya punya niat yang sungguh-sungguh agar kenyataan tersebut dientaskan. Terbukti dengan disepakatinya GBHN 1993 oleh MPR yang antara lain menyatakan bahwa pembangunan dan pembinaan usaha nasional yang meliputi usaha koperasi, usaha negara dan swasta diarahkan agar tumbuh menjadi kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak terutama pembangunan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam pembangunan usaha nasional harus dijaga penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan ekonomi pada satu kelompok atau golongan masyarakat tertentu dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat. Khusus mengenai pembinaan usaha kecil, usaha informal dan tradisional GBHN menekankan perlu ditingkatkannya pembangunan sarana dan prasarana usaha yang disertai dengan perbaikan iklim usaha yang mendukung. Agar usaha tersebut tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang andal, mandiri dan maju serta mampu berperan dalam menciptakan usaha dan lapangan kerja.

Amanat GBHN tersebut tidak lain merupakan misi utama yang diemban oleh seluruh

masyarakat Indonesia dalam rangkaian strategis pembangunan dimasa yang akan datang. Untuk itu pulalah presiden ditetapkan sebagai mandataris yang akan menjalankan misi dan strategi tersebut. Melalui segenap jajaran birokrasi pemerintahan yang ada harus ditetapkan program-program yang konstruktif dan aplikatif sehingga mengena pada arah yang ditetapkan seperti apa yang telah digariskan.

Masalah sekarang, siapakah jajaran birokrasi pemerintahan Indonesia yang menerjemahkan keinginan tersebut ke dalam bentuk kegiatan yang betul-betul mampu mencapai sasaran yang ditetapkan?

Meskipun baru berjalan dalam waktu yang relatif singkat, ternyata ada semacam kendala baru yang timbul di samping kendala yang sudah melekat dalam upaya pembinaan usaha kecil dan koperasi. Pada dasarnya kendala tersebut sudah merupakan sesuatu yang selama ini menjerat birokrasi pemerintahan Indonesia. Setiap departemen terkait seperti dijangkiti “demam pembinaan usaha kecil dan koperasi”. Akibatnya tidak jarang program yang dijalankan tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh para pengusaha tersebut. Ego sektoral yang muncul dalam program pembinaan menyebabkan usaha kecil dan koperasi bagaikan, “*Si kudung mendapatkan cincin*”. Beta-

papun cantiknya cincin permata yang ia dapatkan, namun karena ia tidak mempunyai jari-jari tangan tempat ia memasangnya, maka ia hanya bisa *cengar-cengir* dengan cincin itu.

Pada dasarnya sekumpulan usaha kecil memiliki produk yang angat beraneka ragam. Oleh karena itu strategi pengembangannya akan berbeda untuk setiap produk dan lini produk yang dihasilkan. Dengan demikian peran setiap usaha kecil yang dibina akan berbeda-beda pula. Sebenarnya besar cakupan peran setiap usaha kecil tersebut di dalam lingkungan usahanya yang demikian kompleks, merupakan suatu aspek yang harus benar-benar yang harus dipahami oleh instansi pembina.

Departemen koperasi dan PKK harus mampu memberikan informasi yang akurat pada setiap lembaga lain yang akan ikut serta menyukseskan upaya pembinaan usaha kecil dan koperasi tentang unit-unit usaha kecil yang potensial untuk dikembangkan. Dasar pemikirannya harus berpijak pada pemikiran strategis dengan mengamati factor internal dan eksternal yang seksama dan teliti dari setiap unit usaha kecil yang akan dikembangkan akan lebih transparan dan baku.

Selanjutnya untuk setiap daerah tingkat II sudah selayaknya dibentuk suatu lembaga tersendiri yang bertugas mengkoordinir program pembinaan yang akan dilaksanakan. Lembaga tersebut

merupakan *projec team* yang personalnya diambil dari berbagai instansi terkait, termasuk pula dari unsur perguruan tinggi. Akan sangat menguntungkan pula bila dalam *projec team* tersebut melibatkan unsur ABRI untuk memperkokoh proses pelaksanaan program. ♦

ELOK LENGGANG DI TEMPAT DATAR

(Strategi Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Riau)

Selama ini secara ekonomi, rakyat merasa terkungkung dengan dua pilar yang sangat kokoh. *Pertama*, kekuatan birokrasi yang menciptakan parsialitas dan perbedaan kelas masyarakat. Rakyat berada pada posisi objek yang hanya layak untuk di eksploitasi. *Kedua*, kekuatan modal dari sebahagian kecil masyarakat yang berkooptasi dengan birokrasi. Akses masyarakat terhadap sumber-sumber (modal, bahan mentah, dan informasi) seperti membentur tembok. Bahkan yang sering terjadi adalah perampasan hak rakyat yang pada akhirnya bermuara pada proses pemiskinan berulang dan kontinyu.

Ke depan, kondisi demikian seharusnya tidak terulang lagi. Proses pemberdayaan rakyat selanjutnya tergantung pada kesungguhan untuk menempatkan ulang (*repositioning*) masyarakat itu sendiri. Pola otonomi dan partisipatif yang dilandaskan kepada eksistensi masyarakat dimana ia berada akan sangat penting dan terkait dengan

keragaman adat istiadat yang dianut masyarakat tersebut. Rakyat Kuantan Singingi yang ingin membentuk kesatuan wilayah sendiri menjadi sebuah kabupaten, dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyatnya harus mampu mengkristalisasikan keberadaan adat sebagai pilar utama. Pola dan model yang dikembangkan harus bermula dari keberadaan sosio-kultur masyarakat itu sendiri.

Visi dan Misi

Ke arah mana ekonomi rakyat Kuantan Singingi harus dibawa sudah tergambar sangat jelas. Visi ekonomi rakyat Kuantan Singingi dalam perspektif adat menyatakan, *Bumi sonang padi menjadi. Padi kuniang jaguang moupia. Teronak bekombang biak. Anakbua sonang sentosa. Bapak kayo Ondek berome. Mamak disomba urang pulo*. Dalam visi ini terdapat sektor-sektor tertentu yang menjadi unggulan. *Pertama*, sektor pertanian dengan dua sub-sektor, yakni pertanian tanaman pangan dan peternakan (*Padi kuniang jaguang moupia. Teronak bekombang biak*). Ini berarti swasembada pangan menjadi arah utama kesejahteraan masyarakat Kuantan Singingi. Latar belakangnya tentu dari kondisi alamnya yang sangat subur.

Kedua, sektor tenaga kerja yang secara sadar ditempatkan pada posisi *partner*. Dalam perspektif adat Kuantan Singingi tenaga kerja ditempatkan

bukan hanya sebagai aset yang dieksploitisir, tetapi harus diberdayakan (*Anak bua sonang sentosa*). Ketiga, sektor keuangan dan investasi. Kemakmuran masyarakat harus ditopang oleh tersedianya modal dan aset ekonomi yang likuid. Kepemilikannya haruslah berada pada masyarakat itu sendiri, sehingga ketergantungan dari pihak lain dapat diminimalkan (*Bapak kayo Ondek berome*). Perspektif ini juga dapat diartikan bahwa sektor pertambangan juga menjadi andalan. Ini diperkuat oleh tersedianya sumber-sumber pertambangan di Kuantan Singingi. Sudah sejak dulu masyarakat terlibat dalam mendulang emas untuk menambah penghasilan keluarga.

Keempat, sektor budaya sebagai pengikat dari perkembangan sektor lain. Pengembangan budaya di Kuantan Singingi memiliki arti ekonomi yang sangat penting. Pacu Jalur yang dilakukan selama ini merupakan atraksi budaya yang laku dijual sebagai komoditas pariwisata. Dalam kaca mata masyarakatnya, budaya merupakan alat yang sangat penting untuk menata kehidupan dan dinamika masyarakat. Karena itu, Ninik Mamak harus dikedepankan sebagai simbol kesejahteraan suatu komunitas (*Mamak disomba urang pulo*).

Upaya untuk mencapai visi tersebut oleh masyarakat Kuantan Singingi dituangkan ke dalam misi kegotong-royongan dan kekeluargaan yang sangat kental. Masyarakat dalam perspektif adat-

nya mengakui adanya kesamaan hak dan tanggung jawab dalam mengemban kesejahteraan bersama sebagaimana disebutkan, *Ke bukik samo mendaki, ke lurah samo menurun. Tatungkuik samo makan tanah, tatelontang samo minum aia. Kato surang dibulati, kato basamo dipeiyokan. Meukua samo panjang, menimbang samo borek. Kenek kayu kenek baan, godang kayu godang baan.* Misi ini dalam praktek diimplementasikan dalam bentuk *betobo* atau *perari*, yaitu bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan yang membawa hasil.

Sistem ekonomi yang diterapkan dalam mengemban misi tersebut didasarkan kepada; *Elok lenggang pek nan datar. Ilang rono dek panyakik, ilang bangso dek berome. Dek ome segelo kome, dek padi segelo jadi.* Artinya, diperlukan kondisi yang kondusif untuk menjalankan inisiatif dan kreativitas masyarakat agar produktivitasnya meningkat dan sustainable. Tidak akan tercapainya kinerja yang tinggi bila secara fundamental masyarakat tidak memiliki aset ekonomi yang saling berkesesuaian dan adil. Investasi diperlukan di segala sektor. Untuk itu kebiasaan menabung harus dikembangkan agar memiliki kekuatan dan berdaya secara ekonomi.

Strategi ke Depan

Memasuki millenium kedua mendatang,

sempena akan dibentuknya Kabupaten Kuantan Singingi yang mandiri, maka strategi pemberdayaan ekonomi rakyat hendaknya tidak keluar dari visi dan misi dalam perspektif adat di atas. Menjadi kabupaten sendiri mengandung beban yang cukup berat, yakni mengembalikan posisi masyarakat Kuantan Singingi pada kesejahteraan ekonominya. Strateginya dimulai dari pengembangan partisipasi masyarakat, penataan kepemilikan aset ekonomi secara adil, penciptaan lingkungan investasi yang kondusif, pembukaan akses terhadap sumber-sumber dan keterisolasian masyarakat, kristalisasi nilai-nilai adat dan budaya, dan pengembangan sistem informasi dan pemasaran yang merata.

Langkah-langkah yang implementatif harus disesuaikan dengan tahapan kepentingannya. *Pertama*, keberadaan lembaga pembiayaan yang independen dan memihak kepada rakyat mendesak untuk direalisasikan. Untuk itu pembentukan Bank Rakyat Kuantan Singingi (BRKS) yang sahamnya selain dimiliki oleh swasta dan masyarakat perlu ditindaklanjuti sesegera mungkin. *Kedua*, Badan Informasi dan Pengembangan Kerjasama Ekonomi Rakyat (BIPKER) dibentuk di setiap kecamatan sebagai lembaga konsultasi dan advokasi pemberdayaan ekonomi rakyat.

Ketiga, pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk pengembangan komoditas perikanan

berkualitas ekspor. Termasuk pula pengembangan potensi danau-danau kecil yang tersebar di berbagai daerah untuk usaha keramba ikan. *Keempat*, penataan agroindustri dari hulu sampai ke industri hilir dengan skala ekonomi yang berorientasi pasar. *Kelima*, pengembangan peternakan dan industri pengolahan hasil ternak untuk pemenuhan kebutuhan lokal dan ekspor.

Keenam, mengombinasikan aset budaya, potensi alam, dan souvenir tradisional ke dalam suatu paket wisata yang menarik. Termasuk di sini memposisikan kembali kota Teluk Kuantan sebagai kota budaya dan pendidikan. Untuk itu keberadaan perguruan tinggi yang berorientasi teknologi industri dan manajemen informasi sangat diperlukan. *Ketujuh*, mereposisikan potensi perkebunan dan pertambangan untuk kemakmuran rakyat. *Kedelapan*, penataan kelembagaan ekonomi rakyat dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang pada akhirnya dapat diarahkan menjadi Koperasi yang berbasis masyarakat. Terakhir, pembangunan sarana dan prasarana pendukung seperti perbaikan prasarana transportasi ke setiap desa sebagai pembuka isolasi masyarakat. ♦

TENTANG PENULIS



EDYANUS HERMAN HALIM, SE., MS, lahir di P. Aro Taluk, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, 8 Januari 1963. Menyelesaikan sarjana pada Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau (1987). Program S2-nya diraih pada Universitas

Airlangga (1993), spesialisasi bidang Ilmu Manajemen. Kini sedang menyelesaikan Program Doktor (PhD) bidang studi Urban and Regional Planning Universiti Teknologi Malaysia (UTM) di Johor Baharu Malaysia.

Pernah menjadi staf peneliti pada Pusat Studi Kependudukan (PSK) Unri (1986-1990); Ketua Badan Pengkajian Ekonomi dan Pengembangan Dunia Usaha (BPE-PDU) FE Unri (1995-sekarang); Sekretaris Pusat Konsultasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil (1995-1996); Sekretaris Jurusan Manajemen FE Unri (1996-1999); dan sebagai Pembantu Dekan Bidang Mahasiswa FE Unri (2002-sekarang). Banyak melakukan kajian-kajian ilmiah di Riau dan juga terlibat di berbagai perusahaan swasta. Sampai saat ini masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Sarana Penjaminan Riau dan Staf Ahli pada CV. Paduan Usaha Berjaya.

Suami dari Rini Sahida, SE, ini juga cukup *concern* dalam upaya pemberdayaan nasib rakyat kecil. Komitmen dan kepeduliannya untuk memberdayakan kaum *papa* tersebut ia buktikan lewat pemikiran-pemikiran

bernasnya yang ia tuangkan dalam bentuk tulisan yang dimuat di beberapa media massa lokal seperti *Riau Pos*, *Suara Riau*, *Riau Mandiri*, *Riau Tribune*, Tabloid *AZAM*, dan Tabloid *GENTA* serta beberapa surat kabar lainnya. Tulisannya yang tajam dan berani dalam melihat fenomena sosial ekonomi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah nasib rakyat kecil tadi yang sering menjadi korban aparat birokrasi, banyak membuat orang mengacungi jempol padanya. Selain itu, puluhan tema judul penelitiannya juga sebagian besar lebih berorientasi kepada upaya bagaimana pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM).

Selain konsisten di bidang kepenulisan dan penelitian, ayah dari dua anak ini juga aktif di berbagai organisasi-organisasi sosial, baik internal maupun eksternal perguruan tinggi. Tercatat pernah menjadi pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Pekanbaru (1987-1993); pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau (1988-1991); Wakil Sekretaris DPD I Musyawarah Kekeluargaan Gotong-Royong (MKGR) Riau (1997-2002). Dan pernah menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) Daerah Riau (2001-2002).

Beberapa buku yang telah diterbitkannya adalah *Siapa Menjarah Uang Rakyat?* (Unri Press, 2001), *Mengapa Harus Merdeka?* (Unri Press, 2001), dan *Menangkap Momentum Otonomi Daerah* (Unri Press, 2002). Selain itu ia juga menerbitkan buku *self motivation* terutama berkenaan dengan manajemen, di antaranya adalah *Menjadi Wirasabawan Handal* (Bahana Press, 2002), *Pemasaran Interaktif* (Bahana Press, 2002), *27 Tanya Jawab Bisnis* (Bahana Press, 2002), *Ekonomi Rakyat Dalam Tanya Jawab* (Alaf Riau, 2003), dan *Mereka yang Sukses dan Unggul* (REDC Press, 2003). ♦